

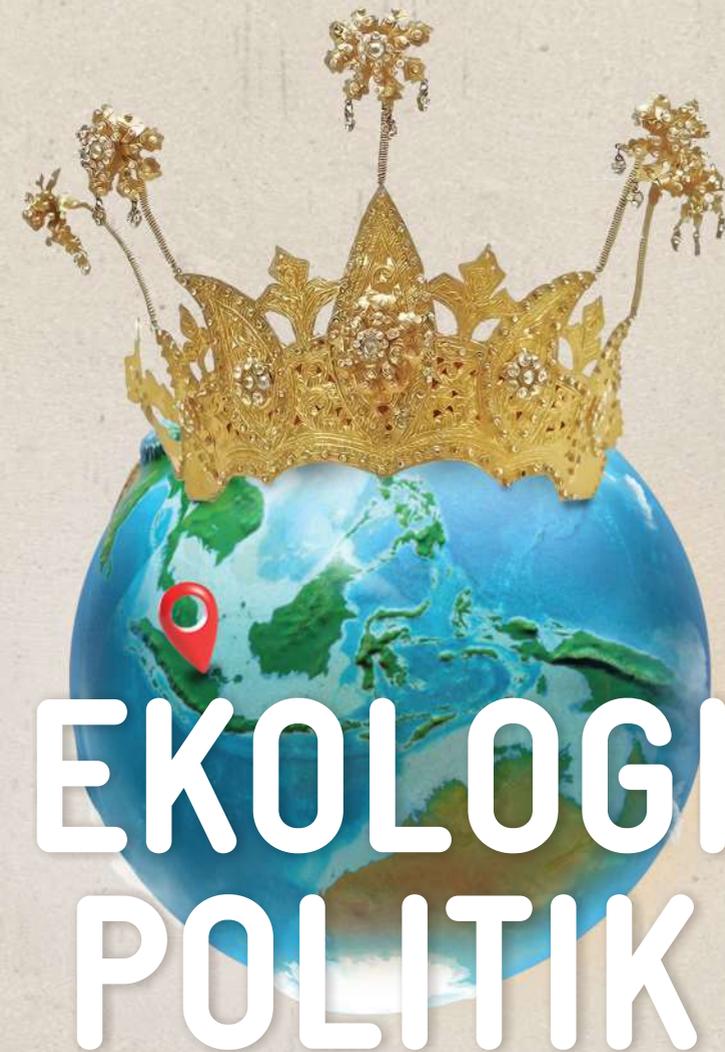
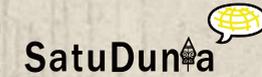
# EKOLOGI POLITIK

## DI SEMBILANG-DANGKU:

Sumbangsih Bumi Sriwijaya  
untuk Pelestarian Dunia

KELOLA Sendang hadir untuk mendukung transformasi kebijakan sektor kehutanan dan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Selatan pasca-kebakaran hutan tahun 2015. Meskipun dikelola dan dijalankan oleh lembaga non-pemerintahan, proyek dibangun dengan semangat *government-led*, demi pengelolaan lanskap berkelanjutan.

Buku ini hadir untuk memberikan gambaran kiprah KELOLA Sendang dalam menciptakan momentum, peluang, dan jaringan demi perubahan yang lebih baik dalam perspektif ekologi politik. Buku ini memotret konstelasi politik sumber daya alam, dinamika politik lokal, kerangka sosial ekonomi, dan keterbatasan program serta organisasi yang terlibat. Buku ini juga menyajikan studi kasus di tiga area model yang mewakili pemodelan di tingkat tapak dalam kaitannya dengan konstelasi tersebut. Buku ini memberikan bukti bahwa ekologi politik memengaruhi suatu proyek konservasi, baik pada tataran konsep, lingkup proyek, maupun implementasi.



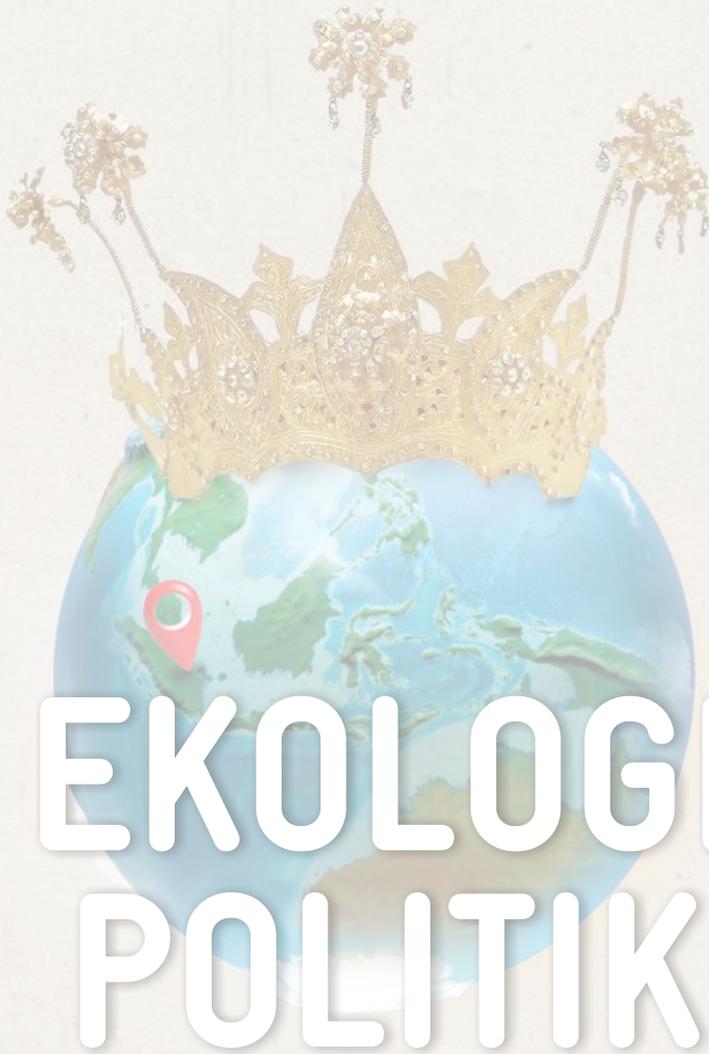
# EKOLOGI POLITIK

## DI SEMBILANG-DANGKU:

Sumbangsih Bumi Sriwijaya  
untuk Pelestarian Dunia



E. Pantja Pramudya (INRISE) • Lukas R. Wibowo (P3SEKPI, INRISE)  
Irfan Nugraha (INRISE, LPPSP - FISIP UI) • Mamat Rahmat (Balitbang LHK Palembang)  
Aria A. Satwiko (INRISE, LPPSP - FISIP UI) • Dewi Ratna Kurniasari (P3SEKPI)  
Dwi Aris Subakti (SatuDunia)



# EKOLOGI POLITIK

**DI SEMBILANG-DANGKU:**

Sumbangsih Bumi Sriwijaya  
untuk Pelestarian Dunia



**ZSL**  
LET'S WORK  
FOR WILDLIFE

**SatuDunia** 

# EKOLOGI POLITIK

**DI SEMBILANG-DANGKU:**

Sumbangsih Bumi Sriwijaya  
untuk Pelestarian Dunia

## **PENYUSUN**

E. Pantja Pramudya (INRISE)  
Lukas R. Wibowo (P3SEKPI, INRISE)  
Irfan Nugraha (INRISE, LPPSP – FISIP UI)  
Mamat Rahmat (Balitbang LHK Palembang)  
Aria A. Satwiko (INRISE, LPPSP – FISIP UI)  
Dewi Ratna Kurniasari (P3SEKPI)  
Dwi Aris Subakti (SatuDunia)

---

**DESAIN & TATA LETAK**

GRIYABASKARA

---

**DITERBITKAN OLEH**

SATUDUNIA

Jl. Tebet Timur Dalam VIII V No.21, RT.6/RW.9, Tebet

Jakarta Selatan, Jakarta 12820

telepon: +62-21-29475653

e-mail: info@satudunia.net

# KATA PENGANTAR

Proyek KELOLA Sendang merupakan proyek yang unik. Proyek berangkat dari tujuan mendukung dan memperkaya kebijakan publik sektor kehutanan dan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan transformasi pasca-kebakaran hutan dan lahan yang parah di tahun 2015. Walaupun merupakan proyek yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga bukan pemerintah, proyek KELOLA Sendang sedari awal mulanya menyadari pentingnya peran pemerintah dalam melakukan transformasi menuju pembangunan berkelanjutan. Kesadaran sebagai *government-led project* dijiwai dalam seluruh aspek proyek.

Dipimpin oleh lembaga konservasi Zoological Society of London dalam mengupayakan pengelolaan lanskap berkelanjutan. Dalam pengelolaan lanskap berkelanjutan tersebut, diharapkan adanya upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati di tengah pemanfaatan lahan yang sudah digunakan oleh berbagai sektor, termasuk sektor ekstraktif. Tentu saja, sekilas ini merupakan misi yang sulit dilaksanakan. Apalagi bila pendekatannya hanya berdasarkan konsep konservasi yang hanya menekankan penyelamatan spesies dan aspek biofisik semata. Di sinilah pemahaman akan konsep pengelolaan lanskap berkelanjutan dituntut, bukan hanya berhenti pada wacana tapi menjadi implementasi. Tidak bisa diabaikan ialah peran konsorsium yang dibangun dengan berbagai lembaga pembangunan, yang bekerja dengan kapabilitas masing-masing untuk mendorong ide besar yang didorong oleh proyek KELOLA Sendang.

Dalam kiprohnya sepanjang waktu pelaksanaan proyek, banyak hal yang terjadi dan dihadapi oleh proyek KELOLA Sendang. Sebagian dari hal-hal tersebut menciptakan momentum untuk peluang-peluang baru dalam membangun jaringan dan kepedulian bersama dalam mendorong perubahan. Walaupun demikian, sebagian lain hal tersebut tentu ada saja menimbulkan penghambat bagi pelaksanaan proyek. Upaya untuk mencari jalan bagi terus didorongkannya agenda pembangunan berkelanjutan memerlukan pemahaman bukan hanya pada aspek-aspek teknis program dan isu konservasi.

Selain pemahaman dan penguasaan atas aspek-aspek teknis program dan isu konservasinya sendiri, diperlukan langkah-langkah terobosan membangun kerja sama lintas lembaga dan lintas tingkat pemerintahan, bekerja sama dengan para aktor kunci di berbagai pemangku

kepentingan, dan mengembangkan strategi dalam sistem sosial politik yang dinamis. Aspek-aspek ini terjadi di luar ranah teknis, dan di sinilah ekologi politik memainkan peranannya. Ekologi politik dituntut dalam tataran praktik, dan beroperasi dalam jejaring yang bergerak bersama menuju peningkatan tata kelola keberlanjutan.

Buku ini hadir dalam menyajikan pembahasan mengenai ekologi politik dari proyek KELOLA Sendang. Sebagai sebuah dokumen tertulis, buku ini sebetulnya masih terbatas dalam menangkap semua fenomena ekologi politik yang terjadi pada tataran program. Belum lagi berbagai keterbatasan waktu dan sumber daya menjadikan tantangan tersendiri dalam mewujudkan terealisasinya buku ini.

Para penulis dari buku ini berasal dari lintas lembaga dan lintas bidang keahlian. Benang merah yang menyatukan para penulis buku ini ialah keinginan untuk bersumbangsih dalam memberikan analisis dari ilmu sosial terhadap program konservasi yang dilaksanakan. Perspektif ilmu sosial dirasakan sangat mendesak untuk disuarakan dalam rangka membumikan program-program konservasi.

Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan informasi terkait proyek ini. Demikian pula peran penting dari organisasi-organisasi mitra seperti Penabulu, HaKI, dan lain-lain yang sangat membantu meluangkan waktu dan memberikan akses terhadap informasi yang diberikan. Namun, kiranya perlu diingat bahwa buku ini tidak akan selesai tanpa dukungan koordinasi para penulis dari SatuDunia (One World Indonesia).

Terakhir, kami berharap kiranya buku ini ada manfaatnya sebagai referensi dari pemahaman ekologi politik dalam program konservasi.

Palembang, 11 Maret 2020

Prof. Dr. Damayanti Buchori  
Project Director KELOLA Sendang

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
<b>BAB I</b>	<b>9</b>
<b>MEMUTUS TAKDIR API DI BUMI SRIWIJAYA</b>	
Lingkup Pembahasan Buku	12
Mencari Akar Leluhur bagi Pertumbuhan Ekonomi Hijau	13
Ekologi Politik di Sembilang–Dangku: Tinjauan Konsep dan Metodologi	15
Tinjauan Singkat Konsep: Ekologi Politik	15
Metodologi	15
ZSL dan Proyek KELOLA Sendang	18
Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Sumatera Selatan	20
Struktur Pembahasan Buku	24
<b>BAB II</b>	<b>27</b>
<b>KELOLA SENDANG MENUJU PENGELOLAAN LANSKAP BERKELANJUTAN</b>	
Cakupan Geografis Proyek KELOLA Sendang	27
Landasan Pemikiran Proyek KELOLA Sendang	31
Konsep <i>Sustainable Landscape</i> Proyek KELOLA Sendang	32
Proyek KELOLA Sendang: Proposal dan Capaian	34
<b>BAB III</b>	<b>45</b>
<b>MENJAGA PUYANG DAN AKSES KAWASAN HUTAN: STUDI KASUS PERHUTANAN SOSIAL AREA MODEL I</b>	
Aspek Historisitas Area Model 1	47
Menata Keseimbangan Hubungan: Manusia, Alam, dan Budaya	48
Harimau dan Mitos <i>Puyang</i>	51
Dinamika Lubuk Bintialo dan Perkembangannya	52
Pribumi dan Pendetang: Siapa yang Berwenang?	54
Sumber Ekonomi dalam Terbatasnya Pemanfaatan SDA	55
Intervensi NGO dalam Upaya Memajukan Desa	58
Perhutanan Sosial: Penjagaan Akses Kawasan Hutan	61
Implementasi Berbagai Aktor dalam Penerapan Perhutanan Sosial	63

---

<b>BAB IV</b>	69
<b>MIMPI BURUK LENYAPNYA IKAN BELIDA</b>	
Sejarah Desa dan Lintasan Pengelolaan SDA Muara Medak	71
Potensi Konflik	74
<i>Juggernaut</i> dan Lenyapnya Pempek Ikan Belida	76
Dapatkah Perhutsos sebagai Solusi?	78
Capaian KELOLA Sendang: Perhutsos dan <i>Agroforestry</i>	80
Centang Perenang Problem Perhutsos di Muara Medak	82
Hikmah dari Perhutsos: Politik Transformasi Hijau	84
<b>BAB V</b>	87
<b>MELAWAN WABAH SAMPAH DI TEPIAN SEMBILANG</b>	
Aral bagi Model Berkelanjutan di TN Sembilang dan Sekitarnya	88
Wabah Sampah, Wabah bagi Keberlanjutan	92
Rumitnya Melawan Wabah Sampah	95
Sampah adalah Persoalan Struktural	96
Membangun Inisiatif Akar Rumput: Strategi Para Mitra dalam Menghadapi Sampah	97
Mencari Penyelesaian Jangka Panjang	101
<b>BAB VI</b>	105
<b>EKOLOGI POLITIK DI LANSKAP PROYEK KELOLA SENDANG</b>	
<b>BAB VII</b>	123
<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	
Kesimpulan	123
Rekomendasi	125
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	128

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Lapangan Usaha pada Tahun 2014–2018	20
TABEL 1.2.	Simulasi Penghitungan PDRB Semi-Hijau dan PDRB Hijau Provinsi Sumatera Selatan	21
TABEL 3.1	Daftar Jenis Satwa	60
TABEL 3.2	Pendapatan Rumah Tangga	56
TABEL 3.3	Pengelolaan <i>Tenurial</i>	57
TABEL 3.4	Penguasaan Objek-Objek <i>Tenurial</i>	58
TABEL 4.1	Tata Guna Lahan Muara Medak	73
TABEL 4.2	Luas Potensi Sumber Daya Alam Muara Medak Berdasarkan RPJMDes	74

# DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Prasasti Talang Tuo	12
GAMBAR 2.1	Lanskap Sembilang–Dangku	28
GAMBAR 2.2	Situasi Area Model 1	29
GAMBAR 2.3	Situasi Area Model 2	30
GAMBAR 2.4	Situasi Area Model 3	30
GAMBAR 4.1	Petani <i>Agroforestry</i> dan Bibit yang Siap Ditanam di Desa Medak	78
GAMBAR 4.2	Capaian Perhutsos di Muara Medak	82
GAMBAR 4.3	Bibit <i>Agroforestry</i> di Desa Medak	83
GAMBAR 6.1	Desa-Desa di Area Model 3 Kelola Sendang	112





# BAB I

---

MEMUTUS TAKDIR API  
DI BUMI SRIWIJAYA

Bumi Sriwijaya mencatat titik api terbanyak di Indonesia pada peristiwa kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015. Citra yang bertolak belakang dari kejayaan sejarah Bumi Sriwijaya di masa lampau. Sriwijaya merupakan imperium besar di era Nusantara kuno. Seperti dikutip di laman *Historia.id*, Dr. Ninny Soesanti, sejarawan Universitas Indonesia menerangkan tiga pilar kejayaan Kerajaan Sriwijaya, yaitu posisi geopolitik yang menghubungkan Samudera Hindia, Laut Cina Selatan, dan Samudera Pasifik; kekayaan alam berlimpah (berupa rempah, kayu cendana, kapur barus, kemenyan, besi, timah, dan emas); serta menghubungkan simpul-simpul perdagangan internasional di India, Arab, dan Tiongkok.

Citra kebesaran dan keagungan masa lalu menjadi tercoreng pada tahun 2015 ketika Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan yang sangat parah. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan kebakaran hutan terluas di Indonesia. Bila ditilik dari total luasan, kebakaran hutan dan lahan tahun 2014 seluas 8.504,86 hektar, tahun 2015 meningkat drastis dan merupakan yang terluas antara tahun 2014–2019 yaitu sebesar 646.298,80 hektar (Direktorat PKHL KLHK, 2020). Luas ini dihitung dari analisis citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS yang di-*overlay* dengan data sebaran *hotspot*, laporan hasil *groundcheck*

*hotspot*, dan laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni.<sup>1</sup> Berdasarkan data titik api per 15 Oktober 2019, dari total 102 titik api yang terjadi di Sumatera Selatan, terdapat tiga kabupaten dengan titik api terbanyak, yaitu: Kabupaten Ogan Komering Ilir (49 titik api), Kabupaten Banyuasin (31 titik api), dan Musi Banyuasin (15 titik api) (Direktorat PKHL KLHK, 2020).

Pemerintah, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melakukan beragam upaya untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dapat terlihat dari menurunnya luas kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan pada tahun 2016, menjadi 8.784,91 hektar, dan tahun 2017 seluas 3.625,66 hektar, walaupun kemudian meningkat kembali pada tahun 2018 dan 2019 (Direktorat PKHL KLHK, 2020).

Menolak untuk terpuruk meratapi kondisi yang ada, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 mendeklarasikan reorientasi arah pembangunan menuju Ekonomi Hijau. Reorientasi arah pembangunan ini pertama-tama harus menghadapi kenyataan bahwa ekonomi di Sumatera Selatan sangat tergantung pada pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Menurut catatan dari World Agroforestry (ICRAF), sampai tahun 2015 sektor perekonomian berbasis lahan berkontribusi pada 17,28% dari PDB regional, dan menopang hajat hidup 1,33 juta KK. Mau tidak mau, diperlukan upaya-upaya untuk melakukan perubahan dalam cara memanfaatkan lahan, sehingga bisa menjamin dijalankannya agenda-agenda pertumbuhan perekonomian yang selaras dengan dukungan terhadap keberlanjutan (*sustainability*).

Proses diskusi antara ICRAF dengan Provinsi Sumatera Selatan sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 2013. Adanya peristiwa kebakaran hutan dan lahan menyebabkan pembahasan ini menjadi semakin intensif sejak tahun 2015. Dalam pelaksanaan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk kelembagaan Green Growth Plan dan kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion Provinsi Sumatera Selatan yang disebut dengan KOLEGA Sumsel, melalui Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2017. KOLEGA Sumsel ditetapkan/dibentuk pada tanggal 24 Mei 2017, sementara struktur dan komitennya disahkan pada tanggal 11 Juli 2017.

KOLEGA Sumsel merupakan lembaga yang bersifat non-struktural yang dibentuk oleh Gubernur Sumatera Selatan dalam rangka melaksanakan pengelolaan lingkungan alam, pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian

<sup>1</sup> Data lengkap dapat dilihat pada [http://sipongi.menhk.go.id/pdf/luas\\_kebakaran](http://sipongi.menhk.go.id/pdf/luas_kebakaran)

dan pelestarian sumber daya alam, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang saling terintegrasi untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan alam yang lestari dan berkelanjutan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. KOLEGA Sumsel terdiri atas Dewan Pembina, Dewan Pengarah, Tim Teknis Badan Eksekutif, Pusat Data, Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi, serta Koordinator Lanskap. Lembaga ini beranggotakan berbagai organisasi dan pihak-pihak yang peduli peningkatan tata kelola lingkungan hidup lokal, nasional, dan internasional. Di dalam berbagai inisiatif yang terlibat ini adalah proyek KELOLA Sendang yang dijalankan oleh Zoological Society of London (ZSL).

Pelaksanaan dari Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau dipandu oleh Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan. Sejalan dengan upaya pemerintah, DPRD Provinsi Sumatera Selatan berhasil membuat Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dalam penyusunan drafnya, DPRD Sumatera Selatan meminta bantuan Pemerintah Sumatera Selatan. Pemerintah Sumatera Selatan meminta TRG Sumatera Selatan serta Biro Hukum dan HAM Pemprov Sumatera Selatan membentuk tim penyusun naskah akademik yang dipimpin Prof. Dr. Robiyanto Susanto, selaku ketua Tim Ahli TRG Sumatera Selatan. Perda ini disepakati melalui Rapat Paripurna DPRD Sumatera Selatan pada 9 Februari 2018. Kebijakan ini menjadi Perda gambut pertama di Indonesia.<sup>2</sup>

Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan didasarkan pada tiga prinsip yaitu inklusivitas (yang berarti melibatkan berbagai pihak), integrasi (keterpaduan), dan sinkronisasi (keselarasan). Kesemuanya itu didasarkan pada data yang akurat. Ada tujuh strategi yang dirumuskan, yaitu:

- 1) Alokasi dan tata guna lahan berkelanjutan yang merupakan penyesuaian antara kebutuhan lahan dengan ketersediaan lahan;
- 2) Peningkatan akses masyarakat terhadap modal yang berhubungan dengan penghidupan;
- 3) Peningkatan produktivitas dan diversifikasi;
- 4) Perbaikan rantai nilai dengan pembagian manfaat yang adil;
- 5) Peningkatan konektivitas dan skala ekonomi;
- 6) Restorasi lahan dan hutan terdegradasi, dan;
- 7) Insentif jasa lingkungan dan pendanaan inovatif komoditas berkelanjutan.

---

<sup>2</sup> <https://www.mongabay.co.id/2018/02/11/resmi-sumatera-selatan-miliki-perda-perlindungan-dan-pengelolaan-gambut/>

Inisiatif Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini memberikan reputasi tersendiri bagi Sumatera Selatan di tingkat internasional, yaitu dalam Master Plan for Renewable Resources-Driven Green Growth 2017–2030 yang dirilis pada Pertemuan Tingkat Tinggi Bonn Challenge I di Asia, yang digelar di Palembang pada Mei 2017. Sumatera Selatan terpilih dari hasil pertemuan tingkat regional Amerika Latin di Panama. The Bonn Challenge adalah suatu inisiatif untuk merestorasi lanskap yang kritis di dunia. Targetnya, 150 juta hektar lahan dapat direstorasi pada 2020 mendatang, dan 200 juta hektar lahan pada 2030. Acara Bonn Challenge sendiri dihadiri 40 negara di Asia dan lima menteri lingkungan hidup.

Pemerintah Sumatera Selatan juga aktif menjadi tuan rumah dalam berbagai *event* lingkungan hidup tingkat internasional. Pada bulan Juli 2018, diselenggarakan Festival Lanskap Internasional di Sumatera Selatan. Saat itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi tuan rumah Sidang Internasional Man and Biosphere UNESCO. Pada tahun 2019, Palembang menjadi tuan rumah Urban Environmental Summit yang diselenggarakan UNEP.

## LINGKUP PEMBAHASAN BUKU

Sumatera Selatan melakukan lompatan dari provinsi yang dicap terpuruk karena karhutla yang parah menjadi provinsi yang menunjukkan komitmen dan kepemimpinan dalam perekonomian hijau (*green economy*). Lompatan ini merupakan prestasi tersendiri, di tengah pragmatisme yang memberikan perhatian yang minim pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. Apalagi langkah ini dimulai dari tingkat pemerintah daerah, yang sejak diberlakukannya otonomi daerah lekat dikaitkan dengan berbagai kebijakan yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Dalam mencoba menyingkap tentang apa yang terjadi di Sumatera Selatan, buku ini menggali dari perspektif ekologi politik.

Buku ini berupaya memahami bagaimana ekologi politik berpengaruh pada program konservasi lanskap yang dijalankan oleh proyek KELOLA Sendang. Proyek KELOLA Sendang sendiri merupakan proyek yang cukup kompleks dan berinteraksi dengan kompleksitas yang dinamis di lokasi proyek. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proyek bukan menjadi penentu utama dalam mendorong transformasi kebijakan menjadi lebih ramah lingkungan.

Berbagai keterbatasan dan kendala dihadapi, yaitu karena konstelasi politik sumber daya alam yang sudah ada, dinamika politik lokal, kerangka sosial ekonomi makro yang dibentuk dari kebijakan tingkat

nasional, dan keterbatasan dalam program serta organisasi yang terlibat. Semua hal ini memang tidak mungkin diulas secara lengkap dalam pembahasan buku ini. Pengumpulan dan penulisan buku dilakukan dengan keterbatasan waktu, harmonisasi dengan tahap-tahap penyelesaian proyek sendiri, dan sumber daya keuangan yang pada gilirannya membatasi kesempatan untuk melaksanakan riset secara mendalam.

Dalam berbagai keterbatasan ini, setidaknya buku ini mencoba memberikan ulasan bagaimana langkah-langkah yang dilaksanakan pada proyek sudah memberikan sumbangannya sendiri untuk mendorong dan memperkuat inisiatif tingkat lokal dalam transformasi menuju Pembangunan Hijau.

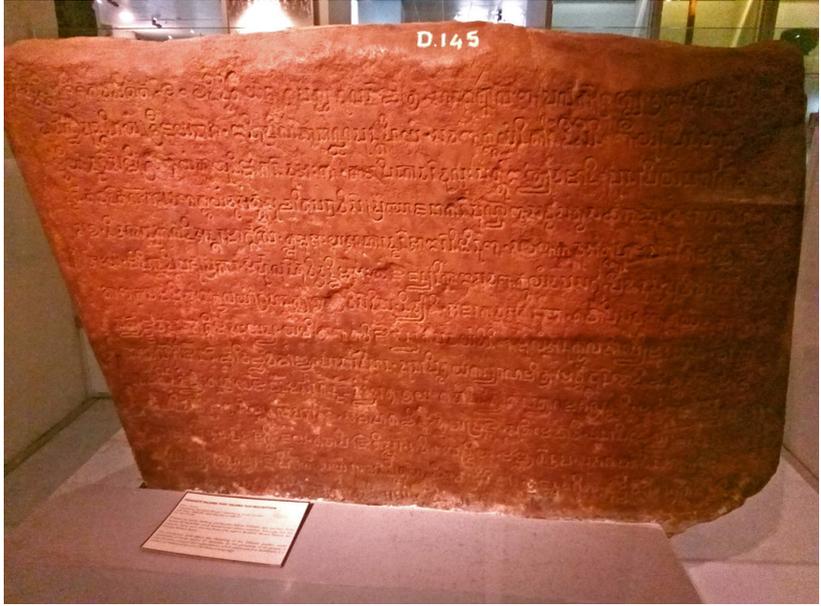
## **MENCARI AKAR LELUHUR BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU**

Istilah ‘ekonomi hijau’ merujuk pada perekonomian berbasis lahan seperti *agroforestry*, pertanian, kehutanan, beserta turunannya. Komoditas yang menjadi fokus adalah kopi, karet, kelapa sawit, padi, dan pulp. Ekonomi Hijau diagendakan untuk mencapai pertumbuhan melalui peningkatan produksi sektor pertanian dan kehutanan, dengan tetap melindungi dan memulihkan hutan serta lahan gambut sebagai penyedia jasa lingkungan.

Dalam pembangunan Ekonomi Hijau, lanskap ditata dengan memperhatikan keseimbangan dan keharmonisan semua aspek melalui kebijakan, rencana kerja, dari hulu ke hilir, dari hutan ke kota. Misalnya, pada bidang energi, kebutuhan energi juga memperhatikan potensi dari pembangkitan dan penggunaan energi terbarukan. Sementara itu, untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, lahan digunakan secara optimal dengan memperhatikan tata guna tanah dan hidrologi, serta mengembangkan ekowisata. Dalam prinsip ini, disadari pentingnya penguatan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, pemerhati konservasi, dan masyarakat umum.

Ekonomi Hijau merupakan tantangan tersendiri karena memerlukan wawasan, cara kerja, dan kemitraan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Sumatera Selatan menggandeng ICRAF untuk menyusun Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Plan). Konsep Pertumbuhan Ekonomi Hijau merupakan hal yang baru. Provinsi Sumatera Selatan sebagai pelopor dari berbagai provinsi di Indonesia, berupaya mencari akar yang sifatnya lokal. Pemerintah Sumatera Selatan mencoba mengaitkan agenda ini dengan sejarah dan budaya

setempat.<sup>3</sup> Untuk ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggali inspirasi dari sejarah, yaitu Prasasti Talang Tuo tahun 684 M.



GAMBAR 1.1 Prasasti Talang Tuo. Sumber: Wikipedia

Prasasti Talang Tuo diperintahkan untuk dibuat oleh Śrī Jayanāśa, Raja Sriwijaya. Tulisan pada prasasti tersebut menyebutkan konsep tempat hidup yang disebut Taman Śrīksetra, yang mengidealkan kemakmuran warga, tetapi tetap menjaga keragaman tumbuhan dan hewan. Baginda Śrī Jayanāśa menatahkan pendirian Śrīksetra dan ditanam di dalamnya berbagai jenis pohon—kelapa, pinang, aren, sagu, dan lainnya untuk dimakan buahnya, demikian pula aur, buluh, betung, dan sebagainya untuk digunakan dalam membangun tempat tinggal, serta tanaman-tanaman lainnya dengan bendungan-bendungan dan kolam-kolam—semuanya bisa digunakan untuk kebaikan sehingga mencapai jalan kebahagiaan bagi semua makhluk, baik yang memunyai mobilitas tinggi dan yang tidak.

---

<sup>3</sup> Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin yang memaparkan konsep Kemitraan Pengelolaan Lanskap (KELOLA) Sembilang–Dangku (Sendang) di forum International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) World Conservation Congress (WCC) 2016 di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat, tanggal 5 September 2016. <https://pemilu.kompas.com/read/2016/09/08/22203871/kelola.sendang.kemitraan.konservasi.ala.sumatera.selatan>.

Prasasti Talang Tuo, walaupun berasal dari abad VII, menunjukkan bahwa nenek moyang masyarakat Sumatera Selatan sudah mencapai pemahaman yang sangat tinggi mengenai pentingnya menyelaraskan penggunaan sumber daya alam dengan upaya menjaga kelestariannya.

## **EKOLOGI POLITIK DI SEMBILANG-DANGKU: TINJAUAN KONSEP DAN METODOLOGI**

### **TINJAUAN SINGKAT KONSEP: EKOLOGI POLITIK**

Ekologi politik merupakan paradigma penting yang berkembang dalam studi mengenai hubungan manusia dan lingkungan hidup. Secara umum, ekologi politik merupakan analisis yang berusaha memandang masalah lingkungan hidup dalam bingkai ekonomi politik yang terjadi (Anja Nygren dan Sandy Rikoon, 2008; Forsyth, 2003; Robbins, 2012). Mendefinisikan secara kaku apa itu ekologi politik merupakan tantangan tersendiri, karena yang ditemukan bukan hanya suatu teori tunggal yang kompak. Ekologi politik dibangun dengan pendekatan eklektik, di mana berbagai pemikiran beserta gerbongnya saling bertubrukan satu sama lain, dan dalam kondisi itu dilahirkan berbagai sintesis untuk memahami kaitan fenomena lingkungan hidup dan kehidupan sosial ekonomi dari masyarakat. Ekologi politik diharapkan menghadirkan analisis kondisi ekologis, hubungan sosial politik, dan praktik-praktik kebudayaan, di mana analisis tersebut berangkat dari kesadaran bahwa interaksi manusia dengan lingkungan hidup bukan terjadi pada ruang yang tidak mau tahu gejala politik dalam analisis masalah-masalah lingkungan (Peet, Robbins dan Watt, 2011).

Dalam memahami apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis ekologi politik, literatur terkait mengusulkan beberapa aspek yang layak menjadi perhatian. Aspek-aspek tersebut ialah:

1. Ekologi politik lahir dan berkembang dari asal muasal narasi lingkungan hidup, dengan memperhatikan apa saja yang didukung oleh narasi ini, dengan menekankan tentang masih langgengnya hegemoni narasi pembangunan ekonomi dan sosial yang menentukan pengambilan kebijakan publik (Stott dan Sullivan, 2000).
2. Analisis ekologi politik adakalanya menghadapi dua kemungkinan keterbatasan (Walker, 2005, 2007; Forsyth, 2003). Kemungkinan pertama ialah analisis ekologi politik lebih mencari akar pada ekologi budaya dan hanya memberikan pandangan sekilas tentang ekologi biofisik dan perubahan lingkungan. Kemungkinan kedua ialah analisis ekologi politik luput membicarakan relasi kuasa dan ketimpangan sosial yang menjadi akar kemiskinan dan marginalisasi masyarakat yang tidak memunyai akses terhadap kuasa.

3. Perubahan akses dan ketergantungan memberi manfaat kepada siapa, serta aktor-aktor tertentu memengaruhi interkoneksi pasar; aktor-aktor yang secara politis dan sosial kuat akhirnya menentukan apa yang akan dicapai (Ottens, Hein, Bondy dan Faust, 2020).
4. Negara hanya memunyai kuasa yang terbatas dalam mengarahkan kebijakan publik untuk melindungi lingkungan hidup (Peluso, 1993; Moeliono, Wollenberg dan Limberg, 2019). Negara mengendalikan sektor kehutanan melalui kebijakan-kebijakannya dan hal-hal operasional terkait sektor kehutanan maupun penguasaan kepemilikan hutan dan lahan hutan. Aktor non-negara pun bisa memengaruhi sektor kehutanan melalui jejaring-jejaring informal, gerakan sosial, atau organisasi-organisasi formal seperti bisnis, lembaga keagamaan, donor, dan kelompok-kelompok advokasi. Masyarakat tempatan hanya memunyai pengaruh yang kecil.
5. Di Indonesia, negara mendominasi sektor kehutanan melalui alokasi, regulasi, dan legalitas warga dalam kawasan hutan (Myers, Intarini, Sirait dan Maryudi, 2017; Bakker dan Moniaga, 2010). Kawasan hutan sendiri berangkat dari definisi lahan kosong yang dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk pengembangan sektor kehutanan dan berbagai kepentingan lain.
6. Tekanan terhadap sumber daya hutan di Indonesia meningkat seiring dengan kebijakan kapitalisasi sumber daya hutan sejak Orde Baru. Sumber daya hutan termasuk yang diandalkan untuk mencari jalan keluar dari krisis ekonomi dengan menarik modal asing yang disertai reformasi sektoral. Langkah-langkah ini di satu sisi memberikan jalan masuk bagi investasi sektor kehutanan, di sisi lain justru membatasi dan/atau mengeksklusi masyarakat tempatan (Hall, Hirsch dan Li, 2011). Sementara proses eksklusi distrukturasi oleh relasi kekuasaan, pada realitasnya, ragam kekuatan eksklusi ini sering kali mendapat resistensi, termasuk dalam konflik agraria yang berkepanjangan (Lutfi, 2013).
7. Dinamika sektor kehutanan bertambah kompleks semenjak berlakunya otonomi daerah dan kebangkitan kontestasi lokal terhadap pemerintah pusat setelah jatuhnya Orde Baru (McCarthy, 2000; Bettinger, 2015; Hapsari, 2011). Secara bersamaan, terjadi peningkatan ekstraksi sumber daya alam untuk perekonomian pasca-krisis ekonomi, sementara elite lokal memanfaatkannya untuk berjuang dalam memperoleh kekuasaan politik. Peningkatan tata kelola sumber daya alam pun kerap kali menghadapi resistensi dari kekuatan pendukung tatanan lama, baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional.

Aspek-aspek ini mewarnai, berkontribusi, memengaruhi, dan membentuk ekologi politik. Praktik-praktik dalam upaya melakukan konservasi lingkungan hidup tidak bisa lepas dari aspek-aspek ekologi politik ini. Analisis yang lebih panjang mungkin saja bisa menampilkan adanya aspek-aspek selain dari aspek-aspek yang sudah disebutkan di atas, tapi karena keterbatasan lingkup penulisan buku ini, fokus diberikan pada ketujuh aspek di atas.

## **METODOLOGI**

Pembahasan buku ini ialah mengenai ekologi politik yang berkaitan dengan proyek KELOLA Sendang yang dijalankan oleh ZSL di Sumatera Selatan. Dalam membahas ekologi politik dari proyek KELOLA Sendang, pengumpulan informasi dilakukan dengan menggunakan beberapa sumber informasi. Dalam pengelompokan data sekunder dan primer, informasi yang menjadi dasar untuk penyusunan buku ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer diperoleh dengan melaksanakan wawancara terhadap para aktor yang terlibat langsung dengan proyek KELOLA Sendang. Para aktor ini terdiri dari personil manajemen proyek, tenaga lapang, pejabat pemerintah terkait, dan komunitas dampingan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kunjungan lapang.

2. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari material tertulis. Material tertulis ini diperoleh dari dokumen program, yaitu proposal, materi komunikasi, dan laporan tahunan; karya tulis yang sudah dipublikasikan, yaitu buku dan artikel jurnal; serta artikel-artikel yang terbit di media, baik itu media cetak maupun media berbasis internet.

Dengan menggunakan informasi-informasi ini, dilakukan analisis terhadap berbagai aspek ekologi politik dari proyek KELOLA Sendang. Berdasarkan tinjauan terhadap konsep ekologi politik seperti dijabarkan di atas, ada beberapa aspek terkait dengan fenomena ekologi politik, yaitu narasi lingkungan hidup dalam kaitannya dengan narasi pembangunan ekonomi dan sosial, kemungkinan keterbatasan analisis ekologi politik, aktor-aktor yang memainkan pengaruh, keterbatasan dan kontestasi terhadap peran negara, dominasi negara pada sektor kehutanan di Indonesia, tekanan untuk melakukan eksploitasi secara lebih intensif sejak masa Orde Baru, beserta meningkatnya eksploitasi hutan setelah diberlakukannya otonomi daerah.

Keterbatasan waktu dan sumber daya mengharuskan pengamatan difokuskan pada tiga studi kasus yang dikembangkan dari tiga area model yang didefinisikan dalam program. Dari pemaparan studi kasus

dari ketiga area model ini, dilakukan pembahasan bagaimana ekologi politik terbentuk dan berpengaruh pada ketiga area model. Pembahasan ini dilakukan secara umum dan secara khusus untuk ketiga area model. Berdasarkan pembahasan studi kasus yang ada, kemudian dilakukan pengambilan kesimpulan dan pengembangan rekomendasi.

## ZSL DAN PROYEK KELOLA SENDANG

Proyek KELOLA Sendang bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan model pengelolaan tata guna lahan yang berkelanjutan yang ramah secara sosial dan lingkungan di Sumatera Selatan. Adanya model yang dikembangkan di KELOLA Sendang diharapkan dapat menjadi acuan untuk dikembangkan di berbagai tempat. Hasil yang diharapkan dari proyek ini ialah untuk mencapai adanya ekosistem campuran hutan dan gambut yang berdaya guna dan dapat berkembang terus, yang mampu mendukung penghidupan manusia, keanekaragaman hayati, dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Di tingkat ZSL, proyek Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang-Dangku (KELOLA Sendang) di Sumatera Selatan yang dimulai sejak tahun 2016 menempati posisi yang penting. Proyek KELOLA Sendang merupakan upaya untuk melindungi habitat kunci dari harimau sumatera yang sangat terancam. Ruang yang tersedia bagi harimau makin sempit sehingga mereka tidak bisa bebas lagi berburu dan berkembang biak. Hanya sekitar 400 ekor harimau tersisa dalam kelompok-kelompok kecil dan terisolasi.

Kebanyakan dari harimau sumatera ini tinggal di ekosistem lahan gambut. Belakangan ini, dengan pengeringan, lahan gambut dipergunakan sebagai lahan pertanian. Merembaknya praktik pembukaan lahan dengan cara membakar menyebabkan habitat harimau berkurang cepat, di samping juga mengakibatkan pelepasan karbon dalam jumlah yang besar ke atmosfer. Harus ada perjuangan serius untuk mempertahankan wilayah hutan dan lahan gambut yang tersisa sebagai batu pijakan habitat. Cara untuk mempertahankan wilayah hutan dan lahan gambut ini ialah dengan mendukung terciptanya koridor satwa, sehingga harimau dapat berpindah dan memunyai masa depan yang memungkinkan mereka terus ada.

Sehubungan dengan hal ini, tekanan dari ekspansi penggunaan lahan oleh manusia harus dihadapi. Sejauh ini, ekspansi penggunaan lahan sudah mengakibatkan lanskap mirip mosaik dengan isi lahan pertanian dan perkebunan milik pribadi, lahan masyarakat, serta kawasan lindung yang acap kali hanya tersisa hutan dalam jumlah yang sedikit. Kebun

sawit dan hutan produksi terserak di sekitar Taman Nasional dan daerah-daerah yang penting perannya dalam menjaga keanekaragaman hayati. Pembalakan liar dan perambahan menambah parah kondisi bentang alam hutan yang ada.

Realitas yang dihadapi oleh proyek KELOLA Sendang ialah bahwa lanskap keanekaragaman hayati berada bersamaan dengan penggunaan lahan yang lain. Sedari awal, ZSL memahami bahwa pendekatan yang mutlak menekankan spesies tidak cocok. Pendekatan yang diambil ialah *sustainable landscape approach* (SLA), di mana proyek juga memperhatikan fakta bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar hutan umumnya kurang sejahtera, adanya kebutuhan dan permintaan akan tanah yang tinggi, serta kelembagaan yang lemah untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap kondisi lingkungan hidup. Penerapan SLA menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan upaya-upaya peningkatan nilai keanekaragaman hayati pada lanskap pertanian, kehutanan, dan perkotaan; bukan hanya eksklusif pada kawasan lindung.

Upaya proyek KELOLA Sendang mewujudkan tata guna lahan dengan tantangan terkait pelestarian keanekaragaman hayati yang berada penggunaan lahan yang beragam serta kebutuhan masyarakat menghadapi tantangan besar dari pengelolaan lahan dan sumber daya alam yang ada di Sumatera Selatan. Seperti dikemukakan pada aspek-aspek ekologi politik di atas, upaya-upaya peningkatan lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari kenyataan pembangunan ekonomi dan sosial. Kondisi pembangunan ekonomi dan sosial di Sumatera Selatan sendiri menyajikan tantangan untuk melakukan transformasi menuju pengelolaan lanskap berkelanjutan.

Proyek KELOLA Sendang sendiri merupakan proyek besar yang cukup kompleks. Kompleksitas terjadi ketika visi konservasi harus berkompromi dengan visi pemberdayaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Kompleksitas lain muncul ketika proyek ini berinteraksi dengan dinamika ekonomi-sosial-politik-budaya yang ada di Sumatera Selatan dan ketika proyek meletakkan diri pada komitmen lintas pemangku kepentingan dan lintas level tata pemerintahan.

Kebakaran hutan dan lahan yang meluluhlantakkan Sumatera Selatan menyadarkan para pemimpin untuk berkaca pada kebijaksanaan nenek moyang ini. ZSL melalui proyek KELOLA Sendang mengambil bagian dalam mendukung menghidupkan kebijaksanaan para leluhur ini. Nama KELOLA Sendang sebenarnya akronim dari (Ke)mitraan Penge(lo)laan (La)nskap (Se)mbila(n)g-(Dang)ku. Sepintas memang hanya seperti upaya penyingkatan nama proyek yang juga dilakukan oleh berbagai lembaga pembangunan pada umumnya. Namun demikian, ternyata

pemilihan nama KELOLA Sendang lebih dari sekadar akronim yang enak didengar. ‘Kelola’—yang bermakna manajemen atau pengelolaan—tetap berangkat dari konsep yang diusung dalam proyek ini, yaitu kemitraan untuk mengelola lanskap secara berkelanjutan. Sementara ‘sendang’ merupakan kata dalam bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa Jawa, yang berarti sumber air.

## PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU DI SUMATERA SELATAN<sup>4</sup>

Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan hingga saat ini masih disokong oleh sektor berbasis sumber daya alam, yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian. Kedua sektor yang terakhir disebut memberikan kontribusi hampir 40% terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2014–2018 (lihat Tabel 1.1). Walaupun kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan penurunan, namun sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan tren yang menaik. Sementara sektor lain yang menyumbang cukup signifikan terhadap PDRB Sumatera Selatan yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor.

TABEL 1.1 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Lapangan Usaha pada Tahun 2014–2018

No.	Lapangan Usaha	Distribusi PDRB (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertambangan dan Penggalian	21.88	21.78	21.47	21.94	22.11
2	Industri Pengolahan	18.35	18.53	18.74	19.35	18.82
3	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19.16	19.01	18.34	17.99	16.94
4	Konstruksi	11.66	11.18	11.57	12.21	11.89
5	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.73	9.65	9.99	10.42	10.39

Sumber: Diolah dari Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha: 2014–2018 (BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2019)

Green Growth Plan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2017 merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai visi Sumatera Selatan sebagai “provinsi bepertumbuhan hijau” (*green growth province*). Rencana induk tersebut memuat tujuh strategi pembangunan yang terdiri dari:

4 Sumber informasi untuk bagian ini berasal dari wawancara berbagai narasumber di Sumatera Selatan yaitu: Dr. Syafrul Yunardy, Sekretaris Eksekutif PSU (15 Januari 2020); Adios, Direktur Riset HaKI (16 Januari 2020); Ir. Pandji Tjahyanto, MP, Kepala Dinas Kehutanan (16 Januari 2020); Yanuar, Sekretaris Eksekutif PIU (17 Januari 2020); Yuwono Aries, *person in charge* Kabupaten Muba (Bappeda Kabupaten Muba) (19 Januari 2020); Iwan Adi Ratmoko, *person in charge* Kabupaten Banyuasin (Bappeda Kabupaten Banyuasin) (20 Januari 2020); Rabin Ibnu Zainal, PhD, Pilar Nusantara (PINUS) (22 Januari 2020); Abdul Halim, Kepala Resort Dangku, BKSDA Sumsel (23 Januari 2020); Purnasari, BKSDA Sumsel (23 Januari 2020); Ermita Sriwahyuni, APHI (Sinar Mas) (24 Januari 2020); Salim Jundan, KKP Lalan Mendis (26 Januari 2020).

1. Alokasi tata guna lahan berkelanjutan;
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap modal penghidupan;
3. Peningkatan produktivitas dan diversifikasi;
4. Perbaikan rantai nilai dengan pembagian manfaat yang adil;
5. Peningkatan konektivitas dan skala ekonomi;
6. Restorasi hutan dan lahan;
7. Insentif jasa lingkungan dan pendanaan inovatif komoditas berkelanjutan.

Ketujuh strategi tersebut diimplementasikan dalam 52 intervensi dan dipetakan dalam Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan.

Setelah adanya Green Growth Plan, hasil simulasi PDRB Semi-Hijau dan PDRB Hijau menunjukkan bahwa walaupun deplesi sumber daya alam yang disebabkan oleh kegiatan ekstraksi barang tambang pada tahun 2014–2018 menunjukkan peningkatan (nilai pengurangannya makin banyak), namun PDRB Semi-Hijau memperlihatkan tren menaik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai produksi dari sektor yang tidak berbasis sumber daya alam lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan nilai produksi (ekstraksi) barang tambang (lihat Tabel 1.2). Karena nilai degradasi lingkungan menggunakan pendekatan (*proxy*) nilai kerugian akibat kerusakan gambut yang ditaksir dalam perhitungan oleh Rahmat (2013). Meskipun nilai angka degradasi menggunakan nilai pendekatan yang masih bisa diperdebatkan, namun setidaknya simulasi perhitungan ini memberikan gambaran tren kasar pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan; apakah menuju *green growth province* atau tidak. Apabila melihat data tersebut, sejatinya masih optimis, pembangunan bepertumbuhan hijau tersebut dapat dicapai, dengan syarat ekstraksi dari barang tambang mulai dikurangi dan produksi dari sektor jasa ditingkatkan.

TABEL 1.2 Simulasi Penghitungan PDRB Semi-Hijau dan PDRB Hijau Provinsi Sumatera Selatan

Indikator	Nilai (Miliar Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
PDRB Coklat	243.297,78	254.044,87	266.857,41	275.331,01	298.569,33
Deplesi SDA	53.234,72	55.330,27	57.303,52	60.398,35	66.000,21
PDRB Semi-Hijau	190.063,06	198.714,60	209.553,89	214.932,66	232.569,12
Degradasi Lingkungan <sup>*)</sup>	55.806,00	55.806,00	55.806,00	55.806,00	55.806,00
PDRB Hijau	134.257,06	142.908,60	153.747,89	159.126,66	176.763,12

\*) Nilai degradasi lingkungan akibat konversi lahan gambut (Sumber: Rahmat, 2013)

Dinas Kehutanan sangat mendukung Green Growth Plan. Program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kehutanan antara lain: penataan batas kawasan hutan; pembentukan dan operasionalisasi kelembagaan KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan); rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan; pengelolaan DAS terpadu; mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan; pembangunan hutan tanaman; produksi kayu dari hutan tanaman; serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Selain itu, Perhutanan Sosial saat ini telah menjadi program strategis nasional, untuk mencapai pemerataan ekonomi. Izin/hak Perhutanan Sosial yang telah dikeluarkan untuk masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Maret 2019 sebanyak 94 izin/hak, dengan total luas areal 99.358,10 hektar dan jumlah masyarakat yang terlibat sekitar 14.700 KK. Keseluruhan areal tersebut terdistribusi dalam lima skema Perhutanan Sosial.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini memberi prioritas pada pembangunan sektor pertanian dengan arah kebijakan yang komprehensif. Kebijakan ini meliputi berbagai langkah, mulai dari hulu hingga ke hilir, hingga meliputi aspek pemasaran serta pengaturan harga. Adapun pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Sumatera Selatan berpegang pada prinsip peningkatan produksi sektor pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan, dengan tetap melindungi dan memulihkan hutan serta lahan gambut sebagai penyedia jasa lingkungan. Lebih sempit lagi, ruang lingkup pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Sumatera Selatan hanya berfokus pada peningkatan kontribusi lima komoditas unggulan, yaitu: kopi, karet, kelapa sawit, padi, dan pulp.

Berkaitan dengan pencegahan karhutla, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2016 Tentang Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan. Perda tersebut meliputi upaya pencegahan, penanggulangan, penanganan, dan pengawasan kebakaran hutan dan lahan. Selaras dengan Perda tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga telah menerbitkan Perda No. 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Hal ini tepat dilakukan sebagai upaya meminimalkan peluang terjadinya kebakaran hutan dan lahan, mengingat gambut merupakan ekosistem yang rentan terbakar, khususnya apabila telah dikeringkan. Selain itu, pimpinan daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan maklumat bersama tentang kebakaran hutan, lahan, dan semak belukar yang ditandatangani oleh Gubernur, Kapolda Sumatera Selatan, dan Pangdam II/Sriwijaya. Maklumat tersebut berisi tentang pasal-pasal tindak pidana terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan ancaman pidana penjara dan denda bagi pelaku pembakar, baik secara disengaja ataupun karena kelalaiannya.

Pada tataran teknis, pemerintah provinsi juga telah membentuk Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla), di bawah komando Danrem Garuda Dempo dan Kepala BPBD sebagai Wakil Dansatgas. Sebagai perangkat untuk memudahkan pemantauan karhutla, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan telah menyediakan aplikasi untuk memantau titik api yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bencana karhutla pada tahun 2019 yang lalu seakan menghapus berbagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Berbagai proyek pencegahan dan penanggulangan kebakaran padahal telah dilakukan oleh pemerintah, bekerja sama dengan berbagai donor dari dalam dan luar negeri. Aturan-aturan sudah diterbitkan dan maklumat juga telah disebar oleh pemerintah daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran telah mengembangkan sistem deteksi dini dan pemantauan titik api serta peringkat bahaya kebakaran, pembentukan dan pelatihan regu unit pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran. Tapi mengapa kebakaran masih terjadi?

Dalam sebuah artikel yang berjudul “Politik Bencana vs Bencana Politik”, Hariadi Kartodiharjo (2020) menyitir pendapat Tania Murray Li untuk memberikan titik terang jawaban atas kegunaan tersebut. Permasalahannya adalah bukan berarti tidak ada dukungan politis dari pemerintah ataupun tidak ada tindakan yang dilakukan para pihak, tetapi, karena solusi yang diambil untuk mengatasi bencana tersebut cenderung bersifat teknis. Menurut Hariadi, pendekatan seperti itu bukan hanya gagal mengembalikan fungsi-fungsi ekologi, tetapi juga gagal mempertimbangkan pola perubahan preferensi dan perilaku masyarakat.

Berhubungan dengan kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dan mungkin di seluruh Indonesia, terindikasi solusinya lebih bersifat teknis masalah. Mungkin kita gagal mengidentifikasi permasalahan mendasarnya, sehingga solusi tersebut tidak tepat. Solusi menarik disampaikan oleh Edwin Martin dalam sebuah artikel berjudul “Berbagai Proyek Dijalankan, Karhutla Tetap Terjadi di Sumatera Selatan. Mengapa?” yang ditulis oleh Taufik Wijaya dalam *Mongabay* (15 November 2019). Menurutnya, yang diperlukan untuk perbaikan lingkungan termasuk pencegahan adalah harmonisasi atau menyinergikan cara pandang dan cara tindak terhadap banyak masalah yang menjadi penyebab karhutla.

## STRUKTUR PEMBAHASAN BUKU

Buku ini berupaya mengungkapkan bagaimana program KELOLA Sendang berinteraksi, merespons, beradaptasi, serta memitigasi dinamika politik yang terjadi di Sumatera Selatan, dengan memberikan fokus pada dinamika lokal yang terjadi di lanskap Sembilang–Danguku. Dinamika politik diamati bukan hanya pada tingkat elite, namun juga pada kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari tersebut, dinamika politik berasal dari berbagai tataran yaitu politik praktis, politik bisnis, dan politik budaya.

Dalam rangka membahas ekologi politik dalam proyek KELOLA Sendang ini, setelah bab pengantar ini, buku ini akan membahas proyek KELOLA Sendang, tantangan yang dijumpai pada pelaksanaan, serta berbagai capaian proyek. Pemaparan mengenai proyek KELOLA Sendang memberikan pengantar untuk memahami bagaimana proyek ini disusun, prinsip apa yang dikembangkan, dan berbagai tantangan untuk implementasinya.

Bab Tiga buku ini membahas mengenai studi kasus dari ketiga area konservasi. Pada masing-masing area konservasi, selain perkembangan proyek juga akan dibahas mengenai interaksi proyek dengan multipihak, bagaimana politik memengaruhi capaian proyek, dan bagaimana proyek KELOLA Sendang merespons dinamika politik tersebut, sehingga tidak berpengaruh terlalu signifikan terhadap perubahan-perubahan yang telah dicapai dari pelaksanaan proyek.

Bab Empat mendiskusikan bagaimana ekologi politik memengaruhi suatu proyek konservasi, baik pada tataran konsep, lingkup proyek, maupun implementasi. Pembahasan ini juga mencoba mengidentifikasi bagaimana ekologi politik berpengaruh pada keberlanjutan suatu proyek.

Buku ini ditutup dengan dua bab yang membahas kesimpulan dan rekomendasi.





# BAB II

---

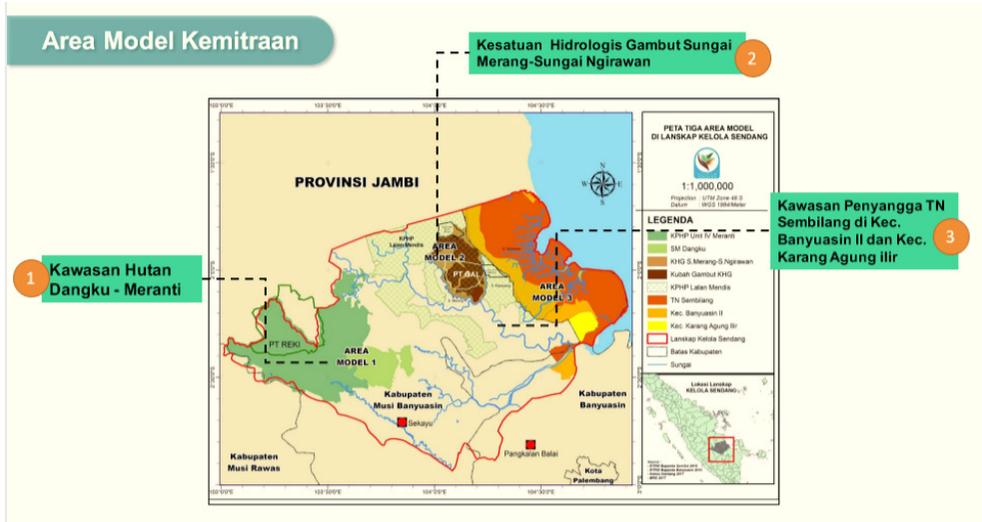
KELOLA SENDANG MENUJU  
PENGELOLAAN LANSKAP  
BERKELANJUTAN

Sebelum terlarut dalam pembahasan proyek KELOLA Sendang dalam berbagai dinamika yang kompleks tersebut, pada bab ini dibahas mengenai landasan proyek.

### **CAKUPAN GEOGRAFIS PROYEK KELOLA SENDANG**

Cakupan luas wilayah yang dikelola oleh proyek KELOLA Sendang mencapai 1,6 juta hektar di Sumatera Selatan. ZSL membandingkan luasan ini dengan 10 kali luasan London dan daerah-daerah satelitnya. Luasan ini mencakup dua kawasan lindung: Taman Nasional Sembilang dan Suaka Margasatwa Dangku. Keduanya merupakan kawasan yang masih terdapat harimau di Sumatera Selatan. Di kedua kawasan tersebut, terdapat Daerah Aliran Sungai (DAS) Banyuasin dan sub-DAS yang mengalir ke arah timur melalui Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Lokasi proyek meliputi area prioritas berupa lahan gambut di dataran rendah Sumatera Selatan. Di antara kedua kawasan tersebut, terdapat kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam. Sebagai suatu wilayah konservasi untuk penyelamatan satwa liar, kondisinya tidak ideal karena lanskap terfragmentasi sementara desakan ekonomi penggunaan lahan meningkat, baik untuk meningkatkan produktivitas perusahaan maupun penghidupan masyarakat.

GAMBAR 2.1 Lanskap Sembilang–Dangku



Lanskap Sembilang–Dangku ini bisa dibagi menjadi dua kawasan utama. Kawasan pertama terletak di utara dan timur dari Sungai Lalan, yang didominasi oleh lahan gambut dan bakau yang berada di sekitar Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Di daerah ini ada pemangku kepentingan dari publik dan swasta, yaitu pada hutan alam dan konsesi kehutanan, serta KPH Lalan Mendis. Daerah ini mencakup kawasan restorasi ekosistem, dua hutan desa, dan beberapa daerah berhutan yang masih bebas dari konsesi. Kawasan kedua ialah lanskap yang terdiri dari bagian selatan dan barat dari lanskap Sembilang–Dangku, yang didominasi oleh tanah mineral dan DAS yang membentang sepanjang dataran rendah Sumatera Selatan. Pada kawasan kedua ini, banyak perkebunan sawit dan desa transmigrasi yang sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Hutan di kawasan ini diatur di bawah KPH Meranti, kecuali Suaka Margasatwa Dangku dan Bentayan yang dikelola langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan citra satelit lanskap Sembilang–Dangku yang diambil pada bulan Juli 2015, diketahui bahwa tidak ada lagi hutan primer pada tanah mineral yang tersisa, melainkan hanya tersisa hutan sekunder seluas 34.445,75 hektar (atau sekitar 3,8% dari seluruh wilayah). Sejumlah 51,29% (atau 468.753,22 hektar) dari seluruh lanskap didominasi oleh pertanian, yang terdiri dari pertanian lahan kering, perkebunan campur, perkebunan akasia, perkebunan sawit, perkebunan campur karet dan sawit, dan sawah. Ada sejumlah 29,45% (269.132,90 hektar) yang merupakan kawasan hutan, terdiri dari hutan sekunder, hutan gambut, dan hutan bakau. Dari kawasan ini, selebihnya ialah kawasan bukan hutan yang terdiri dari daerah rawa berjumlah 14,17% (129.534,73

hektar) dan lahan basah (rawa pinggir pantai, tambak di pesisir, atau kawasan di sekitar sungai) sejumlah 1,65% (atau 15.068,62 hektar).

Lanskap Sembilang–Dangku meliputi 10 kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin dan 5 distrik di Kabupaten Banyuasin. Jumlah penduduk yang terdampak dari proyek ini diperkirakan sejumlah 465.000 orang yang tersebar di 206 desa. Kelompok masyarakat terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat transmigran. Mata pencaharian penduduk kebanyakan berbasis pada sumber daya alam seperti produk-produk pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Dari sebaran geografis dan demografis seluas ini, proyek KELOLA Sendang membatasi fokus pada 21 desa. Kegiatan-kegiatan proyek di 21 desa berperan penting dalam mengatasi masalah ketidaksetaraan dan kesenjangan pendapatan. Dua puluh satu desa yang dipilih merupakan desa-desa yang letaknya strategis di lintas lanskap. Pendekatan pembangunan yang inklusif—di mana melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat—berusaha dipahami dengan contoh-contoh di tingkat lanskap dan desa.

Wilayah kerja program KELOLA Sendang kemudian dalam Masterplan KELOLA Sendang dikelompokkan menjadi 3 area model. Ketiga area model tersebut yaitu:

**Area Model 1**

Kawasan hutan Dangku–Meranti, yang mencakup kawasan KPH dan Suaka Margasatwa.

GAMBAR 2.2 Situasi Area Model 1. Sumber: ZSL – KELOLA Sendang



## Area Model 2

Kesatuan Hidrologi Gambut Sungai Merang–Sungai Ngrawan, yang mencakup Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG).

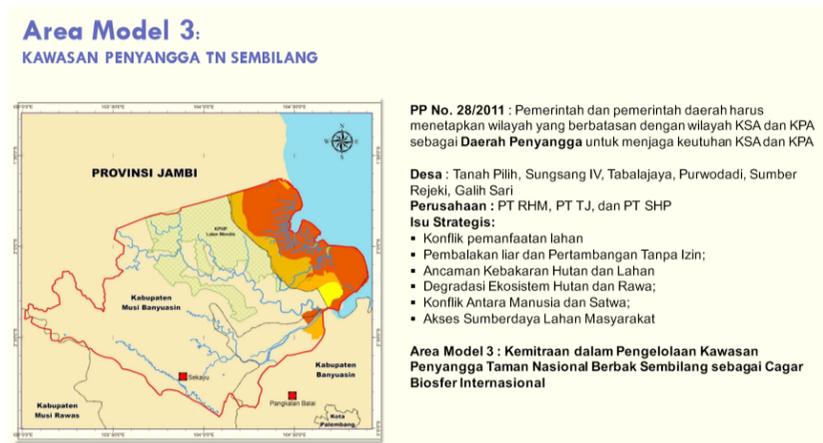
GAMBAR 2.3 Situasi Area Model 2. Sumber: ZSL – KELOLA Sendang



## Area Model 3

Kawasan penyangga TN Sembilang di Kecamatan Banyuasin II dan Karang Agung Ilir, yang mencakup dua wilayah administrasi kecamatan penyangga fungsi kawasan Taman Nasional Sembilang.

GAMBAR 2.4 Situasi Area Model 3. Sumber: ZSL – KELOLA Sendang



## LANDASAN PEMIKIRAN PROYEK KELOLA SENDANG

Proyek KELOLA Sendang dari awal mengambil posisi sebagai bagian dan pendukung pelaksanaan transformasi Sumatera Selatan menuju perekonomian yang berbasis Pertumbuhan Hijau. Dalam merealisasikan dukungan terhadap visi Pertumbuhan Hijau Sumatera Selatan, ada empat tujuan dari proyek KELOLA Sendang. Keempat tujuan tersebut ialah:

- (i) Membangun data biofisik, informasi, dan peta untuk pengambilan keputusan dalam meningkatkan sistem pengelolaan data dan informasi;
- (ii) Memperkuat kebijakan dan tata kelola pengelolaan lanskap berkelanjutan;
- (iii) Meningkatkan kapasitas, mengembangkan model percontohan, dan praktik di tingkat lokal;
- (iv) Mendukung pengembangan kerja sama dan mobilisasi sumber daya.

Proyek KELOLA Sendang memunyai Komite Pengarah yang beranggotakan perwakilan dari Pemerintah Sumatera Selatan, lembaga penyandang dana, dan mitra konsorsium yang memiliki tanggung jawab terhadap arah dan pengawasan proyek.

Ada enam komponen proyek KELOLA Sendang dalam mengembangkan bantuan teknis pada berbagai skala, yaitu:

1. Mengadakan pendataan *baseline* biofisik dan *monitoring* pengelolaan lahan gambut dan dataran rendah serta prioritas untuk konservasi;
2. Menciptakan kebijakan dan kerangka kelembagaan pengelolaan lanskap yang berkelanjutan dan lintas pemangku kepentingan di dalam pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memulai pilot kemitraan lanskap yang mempromosikan penggunaan lahan dan sumber daya lingkungan dan sosial yang berkelanjutan dengan keterlibatan para manajer pengelola lahan di pemerintahan dan dunia usaha serta anggota-anggota masyarakat;
4. Memfokuskan peningkatan kapasitas di lanskap pilot tersebut supaya bisa terlibat dalam perencanaan penggunaan lahan yang mendukung terlaksananya *sustainable livelihoods* dan konservasi keanekaragaman hayati;
5. Memfasilitasi *sharing*, *upscaling*, dan mobilisasi pengetahuan yang berhubungan dengan pengelolaan lahan berbasis *sustainable landscape*, termasuk Sustainable Palm Oil Transparency Tool (SPOTT);
6. Memberikan fokus untuk pengelolaan dan implementasi dari proyek ini.

Dalam pelaksanaannya, tujuan dan komponen ini menuntut komitmen untuk bekerja bersama-sama dengan berbagai pemangku kepentingan dan elemen masyarakat. Visi Pertumbuhan Hijau Sumatera Selatan menjadi tujuan bersama, sementara proyek KELOLA Sendang sendiri merupakan proyek yang *government-led*. Dalam mewujudkannya, proyek berupaya melakukan interkoneksi dari konservasi di tingkat sasaran proyek ke tingkat provinsi dan nasional. Produksi berkelanjutan didorong tidak hanya di tingkat lahan yang dikuasai negara, tapi juga melalui transformasi rantai pertambahan nilai yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta serta pada kegiatan penghidupan di tingkat masyarakat (meliputi 21 desa). Intervensi juga dikembangkan untuk ancaman mendasar bagi kawasan konservasi, seperti masalah sampah.

Dampak yang diharapkan dari proyek KELOLA Sendang ialah tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesejahteraan masyarakat, konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan dan restorasi hutan, dan pengurangan emisi gas rumah kaca melalui penghentian deforestasi, pengeringan lahan gambut, serta kebakaran hutan dan lahan. Konsep proyek KELOLA Sendang didasarkan pada kenyataan kondisi kemiskinan masyarakat sekitar akibat ketidaksetaraan sosial dan kesenjangan pendapatan yang besar.

### **KONSEP *SUSTAINABLE LANDSCAPE* PROYEK KELOLA SENDANG**

Apa sebenarnya kegiatan utama proyek KELOLA Sendang? Proyek KELOLA Sendang bukan sekadar proyek konservasi biasa. Kegiatan utama dari proyek KELOLA Sendang ialah menciptakan landasan untuk *sustainable landscape approach* yang dibangun dari data *baseline* lanskap yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan kolaboratif dan pengembangan intervensi proyek dan model pilot di tingkat lokal.

Dalam menguraikan konsep *sustainable landscape* pada proyek KELOLA Sendang, ada baiknya untuk mengurai beberapa konsep yang ada di dalamnya. Konsep-konsep tersebut ialah sebagai berikut:

- ‘Lanskap’ (*landscape*), yaitu sistem sosio-ekologis yang terdiri dari ekosistem alam dan yang sudah diubah-ubah oleh manusia, dan dipengaruhi oleh berbagai proses dan aktivitas ekologis, historis, ekonomi, dan sosial budaya;
- ‘Pendekatan lanskap’ (*landscape approach*), yaitu kerangka konseptual di mana para pemangku kepentingan berupaya merekonsiliasikan berbagai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan;
- ‘Pengelolaan lanskap terpadu’ (*integrated landscape management*),

yaitu cara mengelola lanskap yang melibatkan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan dengan tujuan untuk mencapai pengelolaan lanskap secara berkelanjutan;

- ‘Lanskap berkelanjutan’ (*sustainable landscape*), yaitu lanskap yang mengupayakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan masa kini tanpa mengorbankan pilihan-pilihan untuk generasi mendatang;
- Lima langkah menuju *sustainable landscape* (*five landscape elements*), yaitu adalah lima langkah merealisasikan prinsip-prinsip *sustainable landscape approach*:

- Elemen 1: Lintas pemangku kepentingan (*multistakeholder*)  
Menciptakan platform lintas pemangku kepentingan yang melibatkan semua pemangku kepentingan kunci melalui proses partisipatoris untuk mendiskusikan, mendesain, mengelola, dan memonitor aksi-aksi di tingkat lanskap;
- Elemen 2: Pemahaman bersama  
Membangun pemahaman bersama terhadap isu, penyebab, dan relasi-relasi spasial di antara para pemangku kepentingan serta mengetahui motivasi dari aktor-aktor kunci di antara para pemangku kepentingan;
- Elemen 3: Perencanaan kolaboratif  
Perencanaan kolaboratif dibangun dari pemahaman sasaran multifungsi dari para pemangku kepentingan. Langkah-langkah pelaksanaan kolaboratif disusun berdasarkan relasi spasial dari berbagai aktivitas dan diarahkan untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat, perekonomian, dan lingkungan bagi semua pemangku kepentingan;
- Elemen 4: Implementasi efektif  
Implementasi yang efektif mencoba menjamin upaya-upaya untuk dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu dengan melakukan adaptasi seperlunya melalui pembelajaran dari berbagai *lesson-learned*;
- Elemen 5: *Monitoring*  
*Monitoring* dilakukan dengan memperhatikan terlaksananya pengelolaan secara adaptif dan akuntabel.

Konsep-konsep tersebut bukan hanya sebatas konsep di atas kertas. Konsep-konsep ini dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi proyek KELOLA Sendang oleh ZSL.

## PROYEK KELOLA SENDANG: PROPOSAL DAN CAPAIAN

Dalam melakukan analisis ekologi politik dari proyek KELOLA Sendang, perkembangan historis dari proyek ini memberikan informasi mengenai duduk perkara dan perkembangan arah strategis proyek. Dari setiap tahapan perkembangan proyek, dapat dilakukan analisis mengenai perkembangan ekologi politik yang terjadi selama proyek berjalan.

Proposal proyek KELOLA Sendang disusun oleh ZSL dalam merespons komitmen kuat yang ditunjukkan oleh Pemerintah Sumatera Selatan. Proposal ini diajukan sebagai bagian dari “South Sumatera Partnership for Landscape Management Support Project”. Pengaju proposal ialah konsorsium dari ZSL, SNV, Daemeter, Deltares, IDH, dan Forest Peoples Programme. Proposal ini bertujuan untuk membangun pilot dan mengembangkan *jurisdictional landscape approach* untuk mendukung visi Pertumbuhan Hijau Sumatera Selatan. Ide awal dari proposal proyek KELOLA Sendang ialah untuk memperluas area kerja ZSL, sehingga konektivitas hutan pada skala lanskap akan tercapai dengan adanya strategi tambahan untuk memperkuat konservasi hutan dan produksi yang berkelanjutan. David and Lucile Packard Foundation mendukung ZSL – KELOLA Sendang untuk mengembangkan SPOTT, pengembangan proposal dan kegiatan-kegiatan pada fase *inception*. Namun demikian, begitu proyek dimulai, David and Lucile Packard Foundation tidak terlibat lagi.

Proposal yang ditulis memberikan acuan akan capaian-capaian yang direncanakan oleh proyek. Bila mengacu pada *logframe* dari proyek KELOLA Sendang, capaian-capaian yang diharapkan terjadi pada akhir proyek ialah model lanskap Pembangunan Hijau berdasarkan kemitraan di Sumatera Selatan akan berhasil dikembangkan dan diimplementasikan. Indikator dari tercapainya model lanskap Pembangunan Hijau ini ialah:

1. Tersedianya data dan informasi *baseline* biofisik yang mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi yang menggunakan satu peta terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan bagi realisasi SLM (*sustainable landscape management*) dan konservasi habitat keanekaragaman hayati;
2. Tersedianya dukungan kebijakan pada level internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten, beserta basis kelembagaan dan kapasitas yang mendukung kemitraan publik-swasta-komunitas dalam melaksanakan SLM;
3. Adanya bukti bahwa sektor publik berpartisipasi dalam kemitraan dengan sektor swasta dan komunitas untuk merealisasikan SLM;
4. Adanya bukti bahwa sektor swasta berpartisipasi dalam kemitraan

dengan sektor publik dan komunitas untuk merealisasikan SLM, dan;

5. Adanya bukti bahwa komunitas dan pemilik lahan skala kecil berpartisipasi dalam kemitraan SLM untuk meningkatkan perlindungan terhadap *tenurial*, SLM, dan upaya-upaya yang menjamin peningkatan *livelihood*.

Pada pertengahan November 2015, proposal tersebut berhasil menggalang dana sejumlah £11 juta dari United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU) dan Pemerintah Norwegia. ZSL dipercaya para donor untuk memimpin konsorsium organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk mendukung Pemerintah Sumatera Selatan dalam mengembangkan kemitraan *sustainable landscape management*. Terpilihnya ZSL juga ditopang oleh pengalaman ZSL menangani proyek serupa, yaitu pada proyek di Taman Nasional Berbak dan Sembilang dan Suaka Margasatwa Dangku untuk perlindungan harimau sumatera. Kerja sama antara ZSL dengan Gubernur Sumatera Selatan untuk membentuk konsorsium KELOLA Sendang ditandatangani pada tanggal 26 Mei 2016.

Terlihat pada awalnya, proyek ini berupaya menggalang konsorsium dengan aktor-aktor yang cukup lengkap untuk masing-masing memberikan kontribusi dalam meletakkan dasar bagi jalannya proyek. Dalam konsorsium tersebut, kapabilitas yang ditawarkan oleh ZSL ialah dalam manajemen proyek secara keseluruhan, konservasi keanekaragaman hayati, dan transparansi untuk lanskap produksi. Namun demikian, kondisi lapangan memerlukan kemitraan dengan lembaga-lembaga yang mempunyai kapabilitas yang khas. Di sinilah kemudian peran dari para anggota konsorsium lainnya. Deltares memiliki kapabilitas terkait gambut, termasuk hidrologi dan pencegahan karhutla, Daemeter untuk mengembangkan strategi, kebijakan, rencana, dan mekanisme institusional. Forest Peoples Programme menangani masalah *tenurial*, pemetaan partisipatif di desa, dan pertimbangan sosial budaya. IDH mempunyai kapabilitas untuk pengelolaan lanskap multipihak yang melibatkan berbagai aktor, baik dari sektor publik dan sektor swasta. SNV mengembangkan intervensi untuk mendukung ekspansi secara berkelanjutan dan intensifikasi sawit dan karet.

Pada tahun pertama, proyek terdiri dari fase *inception* (November 2015–Juli 2016) dan fase implementasi (Agustus 2016–sekarang). Selama fase *inception*, beberapa hal yang sudah dicapai ialah: (1) struktur manajemen proyek sudah dibentuk dan para personil teras kunci sudah ditunjuk; (2) proyek KELOLA Sendang telah disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan terkait melalui serangkaian *kick-off meeting* dan rapat-rapat persiapan; (3) ditandatanganinya perjanjian kerja sama antara Gubernur Sumatera Selatan dan ZSL; (4) Komite Pengarah Proyek dan Komite Teknis Senior sudah dibentuk; (5) batas proyek dan

seleksi tapak sudah ditentukan; (6) pengumpulan data melalui studi lapangan, FGD, dan penelitian pendahuluan sudah dilaksanakan dan siap digunakan untuk masukan bagi rencana implementasi, dan; (7) rencana implementasi proyek sudah dikembangkan. Capaian tahun pertama ini didukung oleh dua hal, yaitu penerimaan yang baik dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta para personil proyek yang mempunyai keahlian beragam, pengalaman, dan jejaring yang cukup luas.

Dinamika politik sudah termasuk dalam pertimbangan proyek pada tahun pertama, terutama berangkat dari kesadaran akan pendekatan lanskap. Harapan dan perspektif pemerintah pusat dan daerah kadang dijumpai berbeda dan bertabrakan. Pemangku kepentingan kunci pun kadang kala mengambil sikap yang berbeda terhadap konsensus yang sudah disepakati sebelumnya, padahal kesepakatannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada. Tantangan utama yang dihadapi oleh proyek KELOLA Sendang yaitu menjembatani harapan dan perspektif dari berbagai tingkatan pemerintahan dan pemangku kepentingan. Upaya menjembatani ini tidak semudah yang diperkirakan, karena komunikasi dan ego sektoral yang ada dari berbagai tingkatan pemerintahan dan para pemangku kepentingan.

Dinamika politik tidak hanya timbul dari level kelembagaan, namun juga bisa berasal dari level personal. Pendekatan pada tingkat personal memiliki peran yang cukup penting dalam menjembatani berbagai tingkatan pemerintahan dan para pemangku kepentingan. Sering kali sebetulnya para pihak ini mempunyai pandangan yang mirip, namun selama ini komunikasi yang tidak terjalin secara baik menjadi penghambat. Belum lagi, berbagai pihak ini kadang menggunakan bahasa teknis yang pemahamannya terbatas antara para personil yang sebelumnya sudah berhubungan. Bahasa teknis yang dipakai pun kadang mempunyai definisi dan operasionalisasi yang berbeda. Memahami dinamika politik merupakan faktor penting dalam memperoleh dukungan pemerintah. Pemahaman ini diperoleh hanya dengan mengadakan konsultasi intensif dan komunikasi yang cukup, serta menyesuaikan diri dengan berbagai aktor.

Beranjak pada tahun kedua (2017), fokus proyek KELOLA Sendang beralih pada pengembangan tata kelola lanskap, dengan terutama mengembangkan kelembagaan di tingkat daerah melalui Project Supervisory Unit (PSU) dan Project Implementing Unit (PIU) yang sesuai dengan tujuan dan tantangan SLM. PSU merupakan badan yang melakukan supervisi terhadap semua kegiatan di tingkat lanskap, sementara PIU merupakan badan yang melakukan supervisi untuk implementasi seluruh kegiatan. PSU terdiri dari pejabat pemerintah yang secara *ex-officio* dari pemerintah provinsi, sementara PIU terdiri

dari para pejabat pemerintah dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Manajemen proyek berkoordinasi dengan PIU untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah di tingkat provinsi dan kabupaten. Selama tahun 2017, proyek telah bekerja sama dengan PSU dan PIU untuk mengembangkan Master Plan Manajemen Sembilang-Dangku 2030, pembentukan kelompok kerja di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin yang memunyai tugas untuk mempromosikan dan menyinergikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Pertumbuhan Hijau dan SLM, serta pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas terhadap 16 dari 21 desa tempat intervensi dijalankan, melalui kegiatan-kegiatan pengembangan peta partisipatoris, mengadakan profil sosial ekonomi desa, dan penilaian atas dokumen perencanaan di tingkat desa.

Di tahun kedua ini, pengembangan data biofisik dan *biodiversity* memasuki tahap akhir, dengan sudah dirampungkannya Sistem Informasi Tata Ruang (Sitarung), *information hub* untuk berbagi data dan informasi lanskap (Portal KOLEGA), serta sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan (Sistem MER). Kemitraan dengan dunia usaha berkembang untuk menyebarkan *best management practices* dari SLM dengan perusahaan-perusahaan kehutanan dan sawit seperti PT Global Alam Lestari dan PT Hindoli. Kegiatan yang dilakukan ialah bantuan teknis kepada perusahaan dalam manajemen hidrologi, restorasi lahan gambut dan *monitoring* keanekaragaman hayati, pelatihan kepada perusahaan untuk melakukan pemantauan kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV), dan kolaborasi dengan empat perusahaan sawit untuk mengembangkan model rantai nilai yang dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Kerja sama dengan sektor publik dilakukan melalui pelatihan kepada KPH untuk mengembangkan rencana jangka menengah dan panjang serta dokumen-dokumen yang diperlukan. Selain itu juga melakukan fasilitasi terhadap dua KPH guna menerapkan instrumen SMART untuk pemantauan hutan. Bersama-sama dengan pemangku kepentingan lokal, proyek ini merumuskan strategi restorasi ekosistem untuk lanskap Sembilang-Dangku dengan para pemangku kepentingan lokal. Terkait dengan *livelihood* komunitas, proyek mengembangkan strategi pencegahan api berbasis masyarakat, resolusi konflik, Perhutanan Sosial, agroekologi, dan restorasi berbasis komunitas. Khusus dengan para petani kecil, proyek memberikan pelatihan pada 776 petani untuk mempromosikan *best management practices*, membangun demplot untuk keperluan belajar, penguatan kapasitas organisasi, dan akses pasar. SPOTT untuk perusahaan kayu serta pulp dan kertas juga berhasil diselesaikan. Perubahan manajemen proyek juga dilakukan pada bulan Mei 2017, di mana UKCCU memberikan perpanjangan waktu tanpa penambahan biaya terhadap program Forestry Land-Use and Governance (FLAG)

yang memungkinkan proyek KELOLA Sendang untuk menata ulang strategi dan luaran, merevisi indikator dan anggaran, memperbaiki desain proyek berdasarkan *lesson learned*, dan menghasilkan *outcome* yang lebih berdampak untuk mendukung visi Pertumbuhan Hijau di Sumatera Selatan.

Selama 2017, proyek KS mengamati perubahan dinamika politik dalam tataran kebijakan. Kesadaran dari para pemangku kepentingan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan supaya tidak terjadi seperti tahun 2015 meningkat. Pemerintah Pusat membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk meningkatkan manajemen hidrologi kawasan gambut melalui penelitian, koordinasi, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara pemerintah provinsi menyambut inisiatif dari pusat ini dengan membentuk Tim Restorasi Gambut Daerah (TGRD), yang telah melakukan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan manajemen lahan gambut, hutan, dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Lahirnya komitmen dari pemerintah pusat melalui Permen LHK 83/2016 mengenai Perhutanan Sosial merupakan langkah penting untuk meningkatkan akses masyarakat yang tinggal berdekatan dan di dalam kawasan hutan terhadap sumber daya hutan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial berdasarkan Keputusan Gubernur. Di samping itu, KLHK juga mengembangkan metode-metode baru untuk mengelola daerah konservasi dengan mengedepankan pendekatan kemitraan dan partisipasi masyarakat.

Pada tahun kedua proyek, berbagai kerangka kerja yang dikembangkan dan kemitraan multipihak yang didorong terjadi bersamaan dengan adanya terobosan-terobosan pada tataran kebijakan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi. Di satu sisi, terobosan-terobosan ini menyajikan peluang untuk adanya dorongan lebih lanjut dari inisiatif program dalam mendorong perbaikan tata kelola lahan. Namun, di sisi lain, berbagai terobosan kebijakan dilakukan dengan narasi yang berbeda. Kadang perbedaan narasi ini menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana kebijakan, apalagi dalam kasus di mana inisiatif di tingkat provinsi tidak sepenuhnya terintegrasi dan menginduk pada inisiatif di tingkat nasional. Belum lagi inisiatif di tingkat provinsi merupakan inisiatif lintas bidang dalam kerangka transformasi perekonomian, sementara inisiatif di tingkat nasional lebih didorong oleh perubahan tata kelola lingkungan, terutama dalam meningkatkan legitimasi negara dalam menangani masalah karhutla dan pengelolaan daerah gambut.

Memasuki tahun ketiga (2018), elemen-elemen penting dalam implementasi pendekatan lanskap—yaitu penguatan sistem,

pengembangan kelembagaan, tata kelola, dan kemitraan aksi pada tingkat tapak—sudah dinilai cukup lengkap. Proyek KELOLA Sendang juga aktif mendorong lahirnya Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 mengenai Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Di Provinsi Sumatera Selatan. Pada aspek penguatan sistem, seluruh proses penyediaan data, peta, dan informasi lanskap yang berguna untuk analisis spasial dalam rangka penguatan sistem dalam pengelolaan lanskap sudah selesai. Pemerintah provinsi juga telah mengadopsi Sitarung sebagai sarana untuk membuka akses partisipasi publik secara luas serta efisiensi dan efektivitas layanan informasi dalam penataan ruang provinsi. MER System untuk evaluasi telah diperkenalkan kepada berbagai pemangku kepentingan. Sementara itu, KOLEGA Portal telah digunakan untuk memperbarui informasi dan pembelajaran antar-mitra pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Pada aspek kelembagaan, proyek KS memperkuat PSU dan PIU dalam pembuatan Rencana Induk Pengelolaan Lanskap Sembilang–Dangku 2018–2028. Di tingkat kabupaten, proyek KS memfasilitasi lahirnya SK Bupati sebagai landasan pembentukan Pokja Pembangunan Hijau di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin, penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai pelengkap dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten, memfasilitasi Forum Multipihak Dangku Meranti, dan merintis Forum Lalan Sembilang sebagai wadah pengelolaan lanskap lintas pemangku kepentingan. Pengalaman-pengalaman proyek KS juga dijadikan bahan untuk pembelajaran bersama melalui Festival Lanskap Nusantara 2018 di Palembang.

Proyek KELOLA Sendang juga membangun kemitraan dengan sektor publik (KPH) untuk mendukung pengembangan Perhutanan Sosial di tiga desa sasaran proyek, dengan jangkauan 2.626 KK untuk kawasan seluas 13.164 hektar. Peningkatan *livelihood* juga diupayakan melalui peningkatan rantai komoditas karet dengan adanya kerja sama koperasi petani dan pabrik pengolahan karet, pengembangan skema bank sampah di Dusun Sembilang, dan beberapa produk lainnya. Kemitraan dengan sektor swasta mendorong penerapan *better management practices*, pengembangan kapasitas *monitoring* HCV dan HCS pada 11 perusahaan pemegang konsesi, restorasi areal bekas terbakar di kawasan bernilai konservasi tinggi di PT GAL dan PT Hindoli, serta kerja sama antar-perusahaan pemegang konsesi pada areal gambut untuk membangun sistem pengelolaan tata air terpadu di KHG Merang–Ngirawan.

Pergantian kepemimpinan politik terjadi di Sumatera Selatan dan di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2018 dan sudah diidentifikasi sebagai risiko proyek. Memang, pada kenyataannya terjadi perubahan yang signifikan dari perspektif Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Bila

dilakukan perbandingan, antara mantan Gubernur Alex Noerdin dan gubernur saat ini, Herman Deru, ada perbedaan kebijakan lingkungan. Mantan Gubernur Alex Noerdin mendorong pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana sebagai langkah yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemantapan stabilitas daerah, peningkatan pemerataan yang berkeadilan. Sementara Gubernur Herman Deru mendorong pembangunan Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan dengan didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Fokus pada lingkungan tidak secara eksplisit diungkapkan.

Bila dilihat sekilas, perubahan kepemimpinan provinsi ini seolah menghadirkan ancaman terhadap upaya-upaya pengembangan lanskap berkelanjutan yang sudah digagas. Mau tidak mau, suka tidak suka, inisiatif-inisiatif perubahan lanskap yang sudah terjalin memang tidak lepas dari kepemimpinan lama yang ada di provinsi. Di sinilah proyek KELOLA Sendang dituntut untuk menyikapi perubahan ini secara cerdas, yaitu dengan mencari celah, menciptakan ruang, dan mendorong kesempatan agar tujuan-tujuan program yang sifatnya makro dalam memperbaiki penataan lanskap bisa berjalan.

Merespons perubahan politik ini, para pimpinan proyek segera melakukan serangkaian proses pendekatan dan sosialisasi kepada pimpinan daerah baru. Peran pemerintah sangat penting karena program pengelolaan lanskap itu pada dasarnya dipimpin oleh pemerintah (*government-led*). Selain itu, pada tahun 2018, Taman Nasional Berbak dan Sembilang dikukuhkan sebagai Cagar Biosfer, sehingga mendorong komitmen yang lebih serius dari seluruh pemangku kepentingan. Adanya Peraturan Direktur Jenderal No. 6 Tahun 2018 mengenai kemitraan konservasi juga memberikan landasan hukum bagi proyek untuk pengembangan kemitraan dengan masyarakat dan penyelesaian konflik kawasan konservasi. Proyek KELOLA Sendang terlibat aktif dalam proses pengembangan Perhutanan Sosial bekerja sama dengan KPH, pengelolaan gambut bekerja sama dengan BRG, dan penyusunan naskah akademis yang akan didorong menjadi peraturan bupati untuk pengelolaan gambut di kabupaten. KLHS sendiri merupakan dokumen penting yang didorong bersamaan dengan pergantian kepemimpinan, karena merupakan dokumen yang penting dalam perencanaan daerah.

Tahun keempat (2019) merupakan fase akhir dari implementasi proyek KELOLA Sendang. Proyek sendiri akan berakhir pada bulan Maret 2020. Tahun 2019 adalah waktu bagi proyek KELOLA Sendang untuk mengejar capaian-capaian sesuai target dan melaksanakan serangkaian kegiatan untuk *exit strategy* melalui *engagement* dengan para pemangku kepentingan. Sehubungan dengan pergantian kepemimpinan di tingkat

provinsi pada akhir tahun 2018, para pimpinan proyek melakukan pendekatan khusus kepada pimpinan daerah baru beserta jajarannya untuk memastikan dukungan. Peran PSU/PIU dalam memaknai KELOLA Sendang sebagai *government-led project* terus didorong dengan menetapkan program prioritas dan meng-koordinasi kemitraan pada setiap area model, melakukan pemantauan lapangan di ketiga area model, dan melakukan persiapan upaya-upaya dalam menyinergikan program pemerintah daerah ke depan, pascaprojek. Ketika kebakaran besar terjadi pada bulan Agustus 2019 yang menghancurkan dua demplot Perhutanan Sosial di Desa Muara Medak, tim PSU/PIU dengan sigap berkoordinasi dengan tim proyek untuk melakukan pengecekan lapangan dan penaksiran kerugian. Sementara itu, tim proyek aktif melatih kelompok pemadaman api dari masyarakat yang dinamai REPAIR (Regu Peduli Air), yang belakangan juga didukung BRG, serta melakukan pemulihan pasca-kebakaran. Landasan untuk keberlanjutan juga ditanamkan dengan melakukan upaya pengembangan usaha-usaha di tingkat masyarakat, seperti *upcycling* pelepah pisang menjadi piring dan tempat makanan. Taman Nasional Sembilang yang semula diperkirakan hanya ada 4-5 ekor gajah, ternyata ditemukan 22 ekor gajah di ekosistem *mangrove* melalui program pemantauan pergerakan satwa liar. Proyek KELOLA Sendang juga telah menyelesaikan instrumen dan sistem dalam pengelolaan tata air terpadu yang akan ditindaklanjuti dengan pengembangan kelembagaan dan dukungan kebijakan.

Upaya-upaya yang dilakukan pada tahun terakhir ini mencoba menyikapi peluang yang tersedia dengan perubahan platform kebijakan pemerintah di tingkat provinsi. Terlihat bahwa proyek KELOLA Sendang lebih fokus untuk melakukan kegiatan operasional dan di tingkat lapang. Pelibatan pemerintah terus dilakukan sesuai dengan konsep inti, yaitu bahwa proyek KELOLA Sendang ini merupakan *government-led project*. Konsep inti ini mewajibkan bahwa manajemen proyek memunyai resiliensi terhadap perubahan politik yang terjadi. Alih-alih lebih memberikan perhatian pada perbedaan-perbedaan antara kepemimpinan tingkat provinsi sekarang dengan sebelumnya, manajemen proyek KELOLA Sendang berupaya mencari dan menciptakan ruang untuk mendorong transformasi kepada lanskap yang berkelanjutan. Salah satunya ialah dengan fokus pada kegiatan di tataran operasional dan di tingkat lapang; proyek berusaha menciptakan ruang untuk memelihara momentum yang sudah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.

Proyek KELOLA Sendang konsisten untuk mendorong transformasi menuju lanskap berkelanjutan, dengan keyakinan bahwa implementasi pembangunan berkelanjutan akan memberikan hasil akhir yang signifikan terhadap upaya-upaya pembangunan tersebut. Pembangunan

berkelanjutan bukan hanya merupakan relasi normatif dari ekonomi, sosial, dan lingkungan, tapi mendorong bagaimana relasi tersebut dapat memberikan solusi yang realistis dengan berbagai keterbatasan yang ada di depan mata. Perhatian terhadap relasi-relasi di tiga matra tersebut akan memberikan kelengkapan perspektif, bukan hanya untuk masa kini, tapi juga dengan memperhatikan kebutuhan generasi mendatang.





# BAB III

---

MENJAGA *PUYANG*<sup>5</sup>  
DAN AKSES KAWASAN HUTAN:  
STUDI KASUS PERHUTANAN  
SOSIAL AREA MODEL 1

Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) memiliki rekam jejak sebagai hewan yang dianggap memiliki kesakralannya sendiri di tanah Sumatera. Merunut dari wilayah Aceh hingga ke Lampung, masing-masing daerah memiliki mitos tersendiri mengenai harimau. Masyarakat Aceh memiliki mitos mengenai *rimueng*, yakni harimau jadi-jadian yang menjaga makam milik Teuku Cot Bada di daerah Pidie. Sementara itu, di Kerinci sendiri, mereka memercayai bahwa harimau adalah perwujudan “sahabat” dan “prajurit” dari roh leluhur mereka. Anggapan bahwa harimau sebagai manifestasi “yang dituakan” juga terdapat di wilayah Sumatera Utara dan Minangkabau, bahkan di wilayah Sumatera Utara terdapat legenda *babiat sitepang*, mengisahkan tentang harimau pincang yang menjaga seorang ibu serta seorang anak yang diasingkan ke dalam hutan. Legenda ini secara tidak langsung memengaruhi perilaku masyarakat di sana yang “meminta izin” terlebih dahulu saat memasuki hutan atau ladang kepada Babiat Sitepang sebagai penguasa hutan.

---

5 *Puyang* adalah istilah dari masyarakat lokal untuk harimau sumatera. Mereka memercayai bahwa hewan tersebut merupakan perwujudan dari nenek moyang mereka (dalam hal ini, pendiri desa). Hingga saat ini, beberapa orang masih menganggap harimau sebagai hewan yang lekat dengan hal-hal berbau sakral/mistis. Namun, semakin ke sini, banyak pula yang menganggap hal tersebut sebagai mitos belaka dan justru melihat harimau sebagai bentuk komoditas alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Isu mengenai pelestarian lingkungan merupakan hal yang sangat seksi dan “menjual”, baik dari lembaga-lembaga internasional yang berfokus terhadap konservasi, maupun pemerintah yang berusaha untuk memberikan “citra positif” terhadap khalayak dunia internasional. Berbagai program diturunkan untuk mendapatkan simpati mereka, namun program-program ini terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terkadang, proses penerapan di lapangan mendapatkan benturan-benturan dari tingkat tapak (dalam hal ini masyarakat biasa), yang merasa program-program tersebut hanya berfokus ke ranah konservasi, dan tidak memperhatikan keberadaan masyarakat yang tinggal di sekitar areal program.

Salah satu program pelestarian lingkungan yang cukup besar adalah KELOLA Sendang yang digemakan oleh ZSL, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dasar pijakan dari program ini adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk mengimplementasikan rencana Pertumbuhan Hijau di provinsi tersebut hingga 2018. Rencana tersebut berfokus pada peningkatan produksi pertanian dan kehutanan, sambil melindungi dan memulihkan hutan dan lahan gambut dengan memperkuat kemitraan antara sektor swasta, konservasi, dan masyarakat sipil. Berangkat dari fakta yang terdapat di lapangan, KELOLA Sendang membagi lanskap wilayah menjadi tiga area model yang terletak di dua kabupaten, di mana wilayah Area Model 1 merupakan wilayah yang terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin.

Cakupan wilayah pada area model ini memperlihatkan bentang kawasan berhutan, mulai dari sebelah barat yang merupakan area konsesi PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT REKI/Hutan Harapan). Bagian utara Hutan Harapan seluas 46.385 hektar membujur di wilayah Provinsi Jambi, disambung dengan luasan 52.170 hektar pada area model di bawah naungan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit IV Meranti. KPHP Meranti memiliki luasan 244.162 hektar, yang terdiri dari 134.596 hektar luasan hutan produksi, 97.587 hektar hutan produksi terbatas, dan 20.081 hektar hutan lindung.

Dalam kerangka Perhutanan Sosial, di wilayah KPHP Meranti telah terbangun dua hutan desa, di Desa Lubuk Bintialo seluas 4.992 hektar dengan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan di Desa Pangkalan Bulian seluas 1.500 hektar dengan skema Kemitraan antara KPH dan Gapoktan. KPHP Meranti berbatasan langsung dengan kawasan konservasi Suaka Margasatwa (SM) Dangku seluas 47.996,45 hektar di sebelah timur. Area model ini secara administratif terletak di 7 kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu: Kecamatan Babat Supat, Babat Toman, Batanghari Leko, Bayung Lencir, Lais, Sanga Desa, dan Tungkal Jaya.

Sebaran kawasan berhutan di area model ini dan sekitarnya sekaligus

menunjukkan fragmentasi habitat dan keterancaman populasi mamalia besar seperti harimau sumatera, gajah sumatera, beruang madu, dan tapir. Kawasan restorasi ekosistem PT REKI dan kawasan konservasi SM Dangku sama-sama menghadapi masalah pembalakan liar, perambahan kawasan, konflik pengelolaan kawasan, dan juga konflik manusia dengan satwa liar. Keberadaan KPHP Meranti, yang sebagian besar didominasi oleh kawasan hutan produksi di antara kedua kawasan tersebut, memberikan peluang dan tantangan tersendiri dalam mendorong pihak swasta pemegang izin konsesi untuk dapat berperan dan terlibat aktif dalam pengembangan koridor konservasi satwa, pelestarian kawasan ekosistem esensial, dan juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan ini masih menghadapi permasalahan mendasar, antara lain: tingkat kemiskinan yang masih tinggi, rendahnya tingkat pendidikan, minim dan rendahnya kualitas layanan dasar, dan akses masyarakat atas sumber daya dan lahan yang minim. Tata ruang pemegang izin pada KPHP Meranti pasti akan membagi wilayah dan fungsi pengelolaan areal konsesi menjadi ruang tanaman pokok, ruang tanaman kehidupan, dan ruang areal konservasi/perlindungan. Hingga saat ini, pola penataan ruang ini belum diselenggarakan secara memadai, dan diperparah dengan beberapa kasus konflik pemanfaatan lahan antara masyarakat dengan pihak swasta dan pemerintah.

Sebagai salah satu bagian dari area model yang menjadi lokasi implementasi program KELOLA Sendang, Area Model 1 terletak di dua kecamatan, yakni Kecamatan Tungkal Jaya dan Kecamatan Batanghari Leko, dengan fokus utama program terletak di Kecamatan Batanghari Leko. Meskipun beberapa desa terletak di dalam kawasan hutan lindung, namun tipologi desa-desa yang berada di dalam Area Model 1 merupakan desa yang diklaim oleh masyarakatnya sudah berdiri sebelum adanya penetapan kawasan.

## **ASPEK HISTORISITAS AREA MODEL 1**

Pada masa lampau, khususnya pada masa Orde Lama, masyarakat di Area Model 1 menggunakan sumber daya yang ada di dalam hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, antara lain berburu binatang-binatang yang ada di hutan, seperti kancil, *napo*, kijang, rusa, trenggiling, landak, dan burung. Selain itu, masyarakat juga melakukan penanaman padi ladang, dengan cara membakar petak lahan yang akan mereka gunakan untuk menanam padi ladang. Mereka juga membuka kebun karet dan melakukan penebangan kayu di hutan. Tetapi, setelah adanya

penetapan kawasan Hutan Lindung pada tahun 1986 dan larangan pembakaran hutan pada tahun 1990 oleh Dinas Kehutanan, maka masyarakat mulai menghentikan kebiasaan mereka untuk membuka padi ladang, karena adanya sanksi cukup berat yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan.

Pada masa setelah ditetapkannya penetapan kawasan hutan dan larangan pembakaran hutan, masyarakat masih ada yang menggunakan hutan sebagai mata pencahariannya, seperti berburu binatang, menebang pohon, ataupun membuka kawasan kebun. Tetapi, sudah tidak ada lagi masyarakat yang membuka padi ladang. Adanya penetapan kawasan Hutan Lindung membatasi ruang gerak mereka dalam mempergunakan hutan, terutama dalam pembukaan lahan untuk kebun. Sehingga, mereka membentuk Gapoktan bekerja sama dengan berbagai pihak, khususnya KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Meranti, yang memiliki peran dalam mengelola kawasan Hutan Lindung.

Penetapan kawasan Hutan Lindung merupakan hal yang dipertanyakan oleh masyarakat di Area Model 1, karena desa-desa tersebut telah berdiri sejak abad 18, sementara penetapan kawasan Hutan Lindung baru dilakukan pada tahun 1986 oleh Dinas Kehutanan. Maka, relasi masyarakat desa dengan Dinas Kehutanan tidak begitu baik, karena adanya anggapan aturan-aturan dari Dinas Kehutanan yang merugikan masyarakat tanpa memberikan solusi. Beberapa kelompok masyarakat juga beranggapan, ditetapkannya status hutan di atas wilayah desa diadakan dengan memanfaatkan proses pergantian sistem pemerintahan, dari yang semula marga kemudian menjadi pemerintahan desa secara definitif. Pada saat penetapan ini berlangsung di tahun 1986, pemerintahan di beberapa desa baru berjalan seumur jagung, dan ada kemungkinan kepala desa yang waktu itu menjabat belum memiliki pengetahuan yang mumpuni terhadap hal-hal yang berkaitan dengan wilayah desa dan batas-batas desa.

### **MENATA KESEIMBANGAN HUBUNGAN: MANUSIA, ALAM, DAN BUDAYA**

Masyarakat di Area Model I melihat hutan sebagai sumber penghidupan mereka. Hutan bagi masyarakat merupakan sarana pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan juga sumber penghasilan mereka. Menurut penuturan masyarakat, sebelum ada larangan membakar hutan, mereka tidak pernah kesulitan untuk hidup, karena kebutuhan hidup sehari-harinya dipenuhi dari ladang serta sumber daya alam lainnya di dalam hutan.

Adanya larangan tersebut membuat mereka tidak dapat membuka ladang di dalam hutan untuk menanam padi ladang lagi. Oleh karena itu, saat ini masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan dari dalam hutan, terutama beras, dan terpaksa harus membeli dari wilayah lain. Menurut penuturan masyarakat, mereka melihat hutan hanya sebagai sumber daya yang dimanfaatkan secara ekstraktif dan tidak memiliki nilai kesakralan khusus. Selain itu, di wilayah sekitar desa juga tidak terdapat/ditemukan situs-situs (wilayah/areal atau benda/bangunan) yang biasanya memiliki nilai histori tinggi dan dianggap sakral oleh masyarakat.

Bagi masyarakat, hal-hal yang bernilai sakral justru terdapat pada jenis tumbuhan dan satwa tertentu. Pohon sialang (*Koompassia excels*) penghasil madu, misalnya, dianggap sebagai pohon yang keramat dan harus diperlakukan dengan khusus dalam pemanfaatannya. Menurut folklor masyarakat, dalam pengambilan madu sialang harus melaksanakan ritus terlebih dahulu dengan melibatkan dukun (*piawang bongkot*) yang membaca mantra-mantra tertentu saat proses pengambilan madu dilakukan. Pohon yang dihinggapi madu sialang dianggap sebagai keramat dan diibaratkan sebagai seorang kekasih yang dirindukan. Mantra yang diucapkan *piawang bongkot* dimaknai sebagai “rayuan” kepada madu agar pengambil madu diberikan keselamatan dari serangan lebah madu sialang.

Secara umum, masyarakat di ketiga desa hanya melihat hutan sebagai nilai ekonomi. Mereka tidak memiliki kategori pengetahuan lokal yang bernilai konservasi untuk menyeimbangkan kegiatan pemanfaatan SDA hutan yang sangat ekstraktif. Namun demikian, saat ini, muncul introduksi gagasan kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan. Pandangan tersebut juga muncul karena merasa sumber penghidupan mereka yang berasal dari hutan terancam dengan keberadaan dan ekspansi perusahaan. Persoalan yang kemudian muncul ialah mereka tidak memiliki pengetahuan bagaimana harus melakukannya, atau dalam hal ini memulainya. Dalam hal ini, NGO/LSM (ZSL dan Yayasan Puter) berperan penting dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan kelestarian kawasan hutan dan proses negosiasi/advokasi dengan perusahaan ke depannya.

Masyarakat memiliki persepsi terhadap satwa-satwa hutan. Beberapa di antaranya bahkan dianggap sebagai “hewan mistis” yang terlarang untuk diburu. Beberapa satwa juga dianggap menjadi penanda tentang “hal” yang baik dan buruk bagi masyarakat yang beraktivitas di dalam hutan. Selain itu, beberapa hewan juga menjadi buruan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan.

TABEL 3.1 Daftar Jenis Satwa

Nama Satwa (Bahasa Indonesia)	Nama Satwa (Bahasa Lokal)	Nama Latin	Persepsi Masyarakat	Keterangan
Harimau	<i>Rimau</i>	<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Memiliki folklor dan ancaman saat berkebun	
Gajah sumatera	Gajah	<i>Elephas maximus sumatrensis</i>	Ancaman saat berkebun	
Beruang madu	<i>Bakol/Naneng</i>	<i>Helarctos malayanus</i>	Ancaman saat berkebun	
Rusa	Rusa	<i>Rusa unicolor</i>	Hewan buruan	
Kijang	Kijang	<i>Muntiacus montanus</i>	Hewan buruan	
Pelanduk napu	<i>Napo</i>	<i>Tragulus napu</i>	Hewan buruan	<i>Napu</i> berwarna putih dianggap sebagai hewan keramat
Kancil	Kancil	<i>Tragulus kanchil</i>	Hewan buruan	
Landak	Landak	<i>Hystrix sumatrae</i>	Hewan buruan	
Tapir	<i>Tenok</i>	<i>Tapirus indicus</i>	Hama kebun	
Kuau raja	Kuau	<i>Argusianus argus</i>	Hewan buruan	

Berdasarkan hasil studi, masyarakat memiliki pengetahuan yang luar biasa mengenai jenis satwa-satwa yang ada di dalam hutan. Mereka pun juga telah mengetahui jenis-jenis satwa yang dilindungi di dalam hutan. Namun begitu, masyarakat di ketiga desa tetap melihat satwa-satwa tersebut sebagai hewan buruan yang memiliki nilai ekonomi dan subsistensi. Masyarakat sudah tidak secara rutin memburu satwa karena biasanya dilakukan dalam rangka kegiatan rekreasi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ketika berburu, masyarakat hanya menggunakan perangkap (jerat) dan itu pun tingkat keberhasilannya rendah, karena menurut mereka satwa-satwa tersebut sudah sulit ditemukan saat ini. Oleh karena itu, masyarakat menolak disebut sebagai pemburu, namun mereka biasanya menjadi pengantar (*guide*) orang-orang dari luar yang sengaja datang untuk berburu di hutan sekitar desa. Orang-orang tersebut menurut masyarakat berasal dari Jambi atau daerah lain dari luar wilayah tiga desa.

Beberapa satwa yang favorit diburu masyarakat untuk konsumsi biasanya ialah kancil, kijang, landak, *napu*, rusa, dan trenggiling.

Satwa mamalia besar yang masuk dalam kategori rentan dan terancam punah seperti harimau, gajah, dan beruang madu tidak menjadi buruan masyarakat ketiga desa. Menurut mereka, ketiga satwa tersebut memiliki posisi tersendiri dalam kehidupan desa, meskipun menjadi ancaman kebun. Satwa yang dinilai memiliki entitas tersendiri menurut masyarakat ialah harimau.

## **HARIMAU DAN MITOS *PUYANG***

Harimau sebagai salah satu satwa hutan memiliki posisi khusus di masyarakat Area Model 1. Masing-masing desa memiliki cerita yang sama terhadap harimau. Masyarakat menganggap harimau sebagai satwa yang memiliki kekuatan tertentu. Ia merupakan bagian dari keluarga mereka dengan sebutan *puyang* atau moyang/leluhur yang sedang menjaga suatu wilayah. Lebih lanjut, menurut masyarakat ada dua jenis harimau, yaitu pertama ialah harimau satwa hutan dan kedua, harimau jelmaan. Dua jenis harimau tersebut dapat dibedakan dari jejak kakinya. Jejak tapak kaki harimau jelmaan berjumlah lima (karena merupakan manusia yang menjelma menjadi harimau), sedangkan jejak tapak kaki harimau satwa hutan asli adalah empat. Berdasarkan pandangan masyarakat, jenis harimau satwa hutan asli tidak berbahaya karena hanya memangsa manusia yang memang sudah suratan (takdir)-nya.

Cerita mengenai perjumpaan antara manusia dengan harimau merupakan bagian dari cerita rakyat. Masyarakat memiliki pengetahuan lokal tentang perilaku harimau. Harimau dianggap tidak berbahaya ketika ia dan manusia secara tidak sengaja bertemu berhadapan, jika si manusia melihatnya terlebih dahulu. Jika sang harimau melihat manusia terlebih dahulu saat bertemu, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Menurut masyarakat, salah satu cara agar tidak bertemu/menghindari bertemu dengan harimau ialah jangan selalu menengok ke belakang. Jika kita berjalan di dalam hutan dan selalu menengok ke belakang, ada kemungkinan biasanya ketika kita menengok maka harimau telah ada di belakang kita. Selain itu, ada kepercayaan di masyarakat bahwa harimau yang tidak berhasil memangsa manusia akan mengalami kesialan karena ia tidak akan mendapatkan makanan selama 40 hari, atau disebut masyarakat dengan perumpamaan 'harimau makan tanah'. Serupa dengan harimau, manusia juga akan mengalami kesialan selama 40 hari apabila bertemu dengan harimau.

Berdasarkan penuturan masyarakat, ada kecenderungan bagi mereka untuk membunuh harimau jika berjumpa karena ada rasa ketakutan untuk dimangsa, terutama jika ada harimau yang masuk ke dalam wilayah permukiman dan ingin memangsa hewan ternak milik

masyarakat. Meskipun begitu, ada pula kepercayaan masyarakat yang menganggap bahwa tabu bagi manusia dan harimau untuk bertemu. Selain itu, manusia biasanya akan menjadi kaku jika berjumpa dengan harimau karena ketakutan dan harimau akan lari ketika melihat manusia. Kendatipun demikian, peristiwa masyarakat berjumpa atau melihat harimau masih terjadi hingga saat ini.

Masyarakat bercerita bahwa pada sekitar tahun 2017, ada harimau jantan yang pernah ditembak oleh warga desa. Selain itu, masyarakat juga pernah melihat harimau di sekitar daerah Suban Burung dan sekitar pos penjagaan PT ConocoPhillips serta areal kebun masyarakat di antara beberapa desa. Menurut mereka, kita masih akan dapat bertemu/melihat harimau di wilayah KPHP Meranti.

### DINAMIKA LUBUK BINTIALO DAN PERKEMBANGANNYA

Dalam melihat Area Model 1, kami menggunakan studi kasus program Perhutanan Sosial yang dilaksanakan di Desa Lubuk Bintialo. Desa Lubuk Bintialo adalah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Desa Lubuk Bintialo ditetapkan oleh pemerintah sebagai desa yang berada pada kawasan Hutan Lindung. Sementara, menurut sejarah dan penuturan warga, Desa Lubuk Bintialo ini sudah ada sejak tahun 1802, di bawah pimpinan pemerintah kolonial Belanda.

Dapat dikatakan bahwa struktur sosial masyarakat di desa tersebut mengalami beberapa kali perubahan dari rentang tahun 1800-an hingga saat ini. Setidaknya, terdapat tiga kali perubahan struktur sosial masyarakat. Model awal struktur sosial masyarakat ialah *rompok*<sup>6</sup>, yang berubah menjadi marga dan kemudian desa. Perubahan struktur sosial pada ketiga desa ini sangat berkaitan dengan sejarah migrasi dan pembentukan permukiman mereka.

Menurut penuturan masyarakat, lingkungan di sekeliling desa dahulunya merupakan daerah hutan yang saat ini masih tersisa di beberapa bagian wilayah desa. Kondisi lingkungan desa kemudian berubah seiring dengan masuknya berbagai perusahaan perkebunan dan pertambangan di sekeliling desa secara pesat. Perubahan yang paling berdampak bagi kehidupan masyarakat ialah pembangunan jalan oleh

---

6 *Rompok* adalah satuan terkecil organisasi sosial masyarakat selain keluarga, yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja sama dalam mengolah lahan di suatu wilayah (biasanya di dalam hutan). Mereka selalu dipimpin oleh satu orang yang anggota-anggotanya merupakan satu keluarga luas atau satu komunitas dari satu atau beberapa kampung/dusun atau desa. Mereka lalu membuat pondok di dalam hutan untuk beristirahat dan supaya dapat menjaga lahan yang telah mereka olah pada malam hari dari binatang liar. Lama kelamaan, biasanya *rompok* akan terus berkembang menjadi sebuah kampung.

perusahaan pertambangan yang membujur di sepanjang wilayah desa. Setelah pembangunan jalan ini, masyarakat mengalami perubahan pola dan orientasi kehidupan, yaitu terutama berpindahnya orientasi permukiman dan ekonomi, serta akses mobilitas mereka sehari-hari.

Jalan pipa gas PT ConocoPhillips yang melalui wilayah Desa Lubuk Bintialo atau juga disebut oleh masyarakat dengan Jalan Simpang Gas, merupakan akses utama mobilitas warga desa dengan kendaraan bermotor dan khususnya bagi kendaraan-kendaraan operasional berbagai perusahaan (batubara, kayu, dan minyak bumi) yang ada di sekitar desa. Jalan Simpang Gas masih berupa jalan non-aspal yang sudah dikeraskan dengan jenis pondasi bawah (*subbase course*). Meskipun begitu, kondisi jalan tidak bisa disebut baik karena ketika musim kemarau, debu yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor dapat menghalangi pandangan mata. Secara umum, jalan yang menjadi akses mobilitas masyarakat melalui atau menuju ketiga desa merupakan jalan tanah. Kondisi jalan ini akan semakin memburuk ketika hujan, karena akan sulit dilalui oleh kendaraan bermotor.

Selain jalan, masyarakat di Desa Lubuk Bintialo juga masih menggunakan sungai untuk berkegiatan sehari-hari, terutama untuk mobilitas antardesa ketika musim hujan. Pada musim kemarau, permukaan air sungai menjadi surut sekitar 2-4 meter, sehingga akan sulit dilalui oleh perahu masyarakat desa karena banyaknya sisa-sisa batang kayu besar yang menghalangi atau bahkan membuat perahu kandas.

Selain sulitnya aksesibilitas, persoalan lain yang muncul di tiga wilayah desa tersebut adalah tumpang tindih batas wilayah desa dengan perusahaan. Berdasarkan penuturan masyarakat, ada beberapa wilayah desa yang beririsan atau bahkan masuk ke dalam areal konsesi perusahaan. Hal itu nantinya akan berkaitan dengan situasi keruangan di wilayah rencana koridor satwa, yaitu areal konsesi dan HGU beberapa perusahaan. Maka, persoalan terkait tumpang tindih pemanfaatan lahan dan klaim atas batasan desa yang tidak tetap/jelas kemungkinan akan menjadi potensi sumber konflik di masa depan.

Kondisi wilayah administratif pada ketiga desa juga terkait dengan pola permukiman masyarakat yang berubah. Masyarakat menuturkan bahwa permukiman mereka beberapa kali mengalami perpindahan. Sebelum ada Jalan Simpang Gas, permukiman masyarakat di ketiga desa terpusat pada beberapa dusun dan berlokasi di pinggir sungai. Saat ini, khususnya pada LB dan PB, permukiman masyarakat tersebar di sepanjang Jalan Simpang Gas dan masih ada beberapa dusun yang terletak di pinggir sungai serta masih terpusat dalam satu ruang lingkup kewilayahan. Sementara itu, berbeda dengan LB dan PB, pola

permukiman di SS masih terpusat dan terletak di pinggir sungai karena berlokasi jauh dari Jalan Simpang Gas.

### PRIBUMI DAN PENDATANG: SIAPA YANG BERWENANG?

Secara umum, komposisi etnik di Desa Lubuk Bintialo didominasi oleh Melayu (Sumatera Selatan dan Jambi), Jawa, serta pendatang dari Bugis. Berdasarkan hasil studi kami, masyarakat di LB, PB, dan SS bukan merupakan masyarakat asli<sup>7</sup>. Masyarakat di ketiga desa menuturkan bahwa diri mereka adalah keturunan dari kelompok-kelompok masyarakat yang umumnya berasal dari bagian selatan dan timur Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Musi Rawas, Palembang, Ogan Komering Ilir, Kayu Agung, Lubuk Linggau, Lais, Air Hitam, serta Tanjung Agung; dan ada juga sebagian yang berasal dari daerah di Provinsi Jambi. Selain itu, sebagian dari mereka juga merupakan keturunan dari orang-orang yang bermigrasi dari Pulau Jawa ke wilayah tersebut. Meskipun begitu, mereka tetap mengidentifikasi diri sebagai bagian dari masyarakat beretnik Melayu, dan yang menjadi menarik ialah mereka kemudian menyebut diri mereka sebagai ‘Melayu pribumi’.

Masyarakat ketiga desa kemudian membedakan kategori etnik Melayu di wilayah mereka menjadi ‘Melayu pribumi’ dan ‘pendatang’. ‘Melayu pribumi’ dalam hal ini mengacu kepada mereka yang telah lama tinggal di ketiga desa sejak lahir atau merupakan keturunan dari orang-orang yang pertama kali tinggal di desa tersebut. Dengan kata lain, ‘Melayu pribumi’ ialah orang-orang berbahasa Melayu dari berbagai daerah yang dibawa oleh Belanda untuk menjadi pekerja tambang pada masa kolonial. Pada akhirnya, mereka tetap bermukim dan berketurunan di wilayah ini, serta karena perkawinan di antara sesama mereka dan juga munculnya rasa senasib sepenanggungan sebagai pekerja paksa pada masa lalu, mereka kemudian mengidentifikasi diri sebagai ‘pribumi’.

Berbeda halnya dengan ‘Melayu pendatang’, yang digambarkan sebagai mereka yang baru datang/bermigrasi ke wilayah ini setelah/pada masa pemerintahan Orde Baru, atau ketika banyak perusahaan telah beroperasi, atau mereka yang bermigrasi dan kemudian tinggal di ketiga desa karena mengolah lahan, menjadi karyawan perusahaan, serta menjadi buruh kebun atau tambang minyak. Namun, ketika berbicara mengenai identitas etnik Melayu secara umum, mereka tidak

---

<sup>7</sup> ‘Masyarakat asli’ atau *native* merupakan istilah yang biasa digunakan dalam literatur untuk menggambarkan mereka yang telah mendiami dan memiliki ikatan yang kuat dengan wilayahnya (*aboriginal*). Biasanya mereka merupakan satu komunitas dalam atau mengidentifikasi diri sebagai etnik yang sama (lihat Eriksen, 2003). Berbeda halnya dengan ‘masyarakat adat’ atau *indigenous peoples* yang digambarkan sebagai masyarakat non-industrial dan menolak sistem politik negara serta terdiskriminasi (lihat Paine, 2000).

begitu membedakan antara ‘Melayu pribumi’ dan ‘pendatang’.

Penggunaan identitas ‘Melayu pribumi’ dan ‘pendatang’ baru muncul dalam perkenalan pada pergaulan sehari-hari serta dalam konteks ekonomi, dan terutama dalam konteks politik lokal desa. Secara umum, para pendatang melihat ‘Melayu pribumi’ sebagai penduduk asli dan “tuan rumah” yang baik. Sementara itu, ‘Melayu pribumi’ melihat para pendatang sebagai “tamu” yang kooperatif dan pekerja keras. Mereka juga saling melihat satu sama lain sebagai kelompok yang dapat bekerja sama dalam pembentukan dan pembangunan desa. Lebih lanjut, kontribusi antaretnis dalam pembangunan desa bisa dilihat dalam struktur pemerintahan di dalam desa serta kelompok-kelompok tani atau sebagai bagian dari komunitas tokoh-tokoh masyarakat.

### **SUMBER EKONOMI DALAM TERBATASNYA PEMANFAATAN SDA**

Secara umum, mayoritas masyarakat di Desa Lubuk Bintialo menggantungkan hidupnya pada pemanfaatan dua lokasi sumber daya alam: *yang ada di dalam lingkungan desa* dan *di hutan sekitar wilayah marga*. Komoditas yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan desa ialah minyak, karet, dan sawit. Sementara itu, untuk hutan yang terdapat di sekitar wilayah marga, masyarakat mengekstraksi kayu seperti kayu pulai, meranti, dan rotan. Masyarakat juga masih mencari ikan di sungai dan danau yang terdapat di sekitar marga sebagai sumber penghasilan tambahan dan untuk kebutuhan subsistensi, yakni sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, masyarakat juga sesekali berburu satwa-satwa yang terdapat di dalam hutan sebagai sumber penghasilan tambahan. Beberapa dari mereka juga ada yang bekerja di sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, wiraswasta (baik kayu dan minyak), pedagang, dan pegawai.

Dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berada di dalam wilayah Area Model 1 memadukan beberapa komoditas sebagai sumber penghidupan (*livelihood*) mereka. Hal tersebut merupakan cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan ekonomi harian biasanya dipenuhi oleh hasil kebun yang mereka kelola, seperti karet, sawit, atau hasil panen tanaman semusim yang laku diserap di pasar desa. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan lainnya, masyarakat mendapatkannya dari kegiatan tambang minyak tradisional atau bekerja pada perusahaan yang ada di sekitar desa. Namun demikian, berdasarkan penuturan masyarakat, pendapatan sebagai pekerja kebun atau tambang minyak tidak selalu tinggi. Hanya pemilik (lahan atau sumur) yang menghasilkan pendapatan tinggi dalam tiap bulannya.

Dalam pemanfaatannya, ada tiga jenis sumber daya alam (SDA) di ketiga

TABEL 3.2 Pendapatan Rumah Tangga

Jenis Pekerjaan	Rata-rata Pendapatan Per Bulan
Pemilik tambang minyak/pemilik sumur minyak	Rp8.000.000,00~Rp25.000.000,00
Penggesek kayu	Rp2.000.000,00~Rp5.000.000,00
Petani karet	Rp2.000.000,00~Rp5.000.000,00
Buruh tani/buruh minyak	Rp1.000.000,00~Rp2.000.000,00
Karyawan perusahaan	Rp2.000.000,00~Rp5.000.000,00
Serabutan	Tidak menentu

desa di dalam wilayah Area Model 1 yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat, baik sebagai sumber penghasilan ekonomi utama maupun pemenuhan kebutuhan subsistensi. Ketiga jenis SDA tersebut ialah lahan, perairan (sungai), dan hutan. Lahan menjadi sumber daya utama saat ini karena dimanfaatkan untuk menjadi kebun (karet) atau tambang minyak. Sungai merupakan SDA utama bagi masyarakat semenjak dahulu karena, selain sebagai akses utama mobilitas mereka sehari-hari, sungai juga merupakan tempat mereka mendapatkan ikan, baik untuk makan sehari-hari maupun dijual sebagai penghasilan tambahan. Begitu halnya dengan hutan yang juga dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bentuk hasil kayu maupun non-kayu, dalam rangka pemenuhan kebutuhan subsistensi maupun ekonomi mereka.

Lahan, hutan, dan sungai sebagai basis utama *tenurial* masyarakat yang tinggal di dalam wilayah Area Model 1 memiliki pola penguasaan masing-masing dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Alam. Umumnya, pada saat ini, di tiga desa terdapat dua macam hak terhadap lahan, yakni hak milik dan hak garap. Hak milik mengacu kepada perseorangan yang didasarkan atas surat keterangan kepemilikan ataupun klaim-klaim tertentu terhadap tanah, seperti hak ulayat atau warisan. Berbeda dengan hak garap, yaitu hak yang digunakan oleh masyarakat hanya untuk menggarap lahan (hal ini biasanya berlaku pada buruh tani).

Pada umumnya, masyarakat memperoleh hak milik lahan berdasarkan atas basis klaim terhadap luasan lahan yang dahulu mereka buka di dalam hutan, atau mendapatkan warisan dari orangtua (keluarga) atas basis yang sama. Ketika itu, masyarakat mengelola lahan dengan sistem ladang berpindah dan penentuan lokasi mana yang akan dikelola harus mendapatkan izin dari pesirah. Masyarakat membuka lahan dengan cara

TABEL 3.3 Pengelolaan *Tenurial*

<b>Basis <i>Tenurial</i></b>	<b>Objek Pengelolaan</b>	<b>Orientasi</b>
<b>Lahan</b>	Sayur	Subsisten dan ekonomi
	Karet	Ekonomi
	Minyak	Ekonomi
	Sawit	Ekonomi
<b>Hutan</b>	Kayu	Ekonomi
	Hewan buruan	Subsisten dan ekonomi
	Rotan	Ekonomi
<b>Air, sungai dan danau</b>	Ikan	Subsisten dan ekonomi

bergotong royong dan luasan lahan yang dikelola biasanya disepakati bersama, berkisar antara 2-3 hektar per rumah tangga dalam satu areal. Jika ingin memperluas lahan, maka orang tersebut harus membuka lahan baru di areal lain. Oleh karena itu, setiap rumah tangga memiliki luasan lahan yang berbeda, tergantung dari kemampuan mereka dalam membuka dan mengelola lahan.

Setelah masuknya perusahaan dan terutama sesudah pembangunan Jalan Simpang Gas, sistem praktik pengelolaan lahan masyarakat masih mengikuti pola masa lalu, kecuali saat ini lahan masyarakat sudah tidak berpindah lagi. Mereka membuka lahan di dekat jalan atas inisiatif pribadi, dengan izin atau minimal diketahui oleh kepala desa (atau dalam beberapa kasus tanpa meminta izin terlebih dahulu) di areal yang tidak dikelola oleh anggota masyarakat lain dan mengklaimnya sebagai hak milik dengan sistem penentuan luasan lahan masih menggunakan cara yang sama dengan masa pesirah. Lahan klaim hak milik tersebut dalam perkembangannya kemudian diperjualbelikan oleh masyarakat, walaupun tidak ada bukti kepemilikan (sertifikat tanah), dan masih berlangsung hingga saat ini. Ketika terjadi proses jual-beli, biasanya hanya melibatkan pihak penjual, pembeli, dan kepala desa sebagai saksi, yang dituliskan dalam secarik kertas sebagai bukti perjanjian jual beli. Hal yang menarik ialah, masyarakat memiliki bukti pajak (PBB) atas lahan mereka yang dibayarkan setiap tahun, meskipun mereka tidak memiliki sertifikat tanah. Bahkan, pembayaran PBB ternyata

telah berlangsung sebelum pemerintahan desa terbentuk, yang dikenal oleh masyarakat dengan istilah IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah).

TABEL 3.4 Penguasaan Objek-Objek *Tenurial*

Objek Penguasaan	Hak Atas Objek	Mekanisme	Pihak-Pihak yang Terlibat
Ladang & kebun (karet)	Hak milik Hak garap	Warisan dan jual-beli	Pemilik lahan, pemerintah desa, & penggarap
Pekarangan & perumahan	Hak milik	Warisan dan jual-beli	Pemilik lahan & pemerintah desa
Perairan (lebak dan sungai)	Hak garap	Lelang	Pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, & masyarakat

Saat ini, masyarakat terbentur dengan batas-batas atau areal wilayah/ lahan konsesi perusahaan dan kawasan hutan ketika ingin membuka atau mengelola lahan di wilayah Area Model 1. Hal ini kemudian difasilitasi oleh pemerintah desa (Kades) yang melakukan negosiasi dengan perusahaan atau pihak terkait, agar masyarakat dapat mengelola lahan dengan sistem meminjam lahan (hak garap) lewat model Perhutanan Sosial. Dalam praktiknya, masyarakat kemudian memperjualbelikan lahan pinjaman tersebut kepada pihak lain dengan sistem bawah tangan/kesepakatan bersama.

Lahan-lahan yang dikelola masyarakat biasanya ditanami komoditas karet dan di beberapa wilayah ditanami pula dengan tanaman pemenuh kebutuhan sehari-hari seperti sayur-mayur dan padi ladang. Pada Desa Pangkalan Bulian dan Lubuk Bintialo, apabila kemudian di lahan tersebut ditemukan minyak lalu menjadi tambang minyak, maka pemilik lahan akan mendapatkan sebagian hasil jual atau sewa kepada penggarap lahan minyak, sebesar 25 persen.

Pengelolaan SDA perairan (lebak dan sungai) sedikit berbeda dengan lahan, karena hanya ada hak garap yang diatur oleh pihak pemerintahan desa melalui mekanisme lelang. Sungai yang dilelang biasanya merupakan anak-anak Sungai Batanghari Leko dan Kapas. Pemenang lelang dari anak sungai tertentu berhak mengelola hasil yang diperoleh dari sungai tersebut selama satu tahun. Pada kenyataannya, hanya sebagian anak-anak sungai yang diperebutkan dalam lelang, karena hasil dari sungai-sungai tersebut dianggap paling menguntungkan. Sisa anak sungai yang tidak berhasil dilelang biasanya akan dibayarkan oleh kepala desa sebesar Rp100.000,00 per anak sungai. Hasil utama yang diperoleh dari sungai lelang ialah ikan, namun dalam beberapa kasus anak sungai yang dilelang digunakan untuk jalur distribusi kayu dari hutan.

Sistem pengelolaan SDA hutan tidak jauh berbeda dengan lahan, karena masyarakat membuka kebun atau ladang di dalam hutan dengan luasan tertentu, di mana saja atas izin dari pesirah dan setelahnya kepala desa. Komoditas yang ditanam oleh masyarakat di lahan dalam hutan ialah padi ladang dan sayur-sayuran. Setelah panen, masyarakat kemudian menggantinya dengan tanaman durian atau karet sebagai penanda bahwa lahan tersebut sudah pernah digarap, dan akan mencari lahan lain untuk ditanami padi (sistem ladang berpindah). Saat ini, masyarakat tidak dapat membuat ladang di dalam hutan karena adanya larangan untuk membakar lahan oleh pemerintah serta penentuan hutan kawasan dan HTI. Oleh karena itu, masyarakat hanya dapat memanfaatkan hasil karet yang pernah ditanam di lahan mereka dahulu.

Selain ladang, masyarakat juga memanfaatkan hasil hutan baik kayu maupun non-kayu, seperti satwa buruan untuk dimakan. Aktivitas berburu satwa di dalam hutan tidak diatur oleh pemerintahan marga sebelumnya. Selama ini, masyarakat berburu dengan menggunakan perangkap dan dibebaskan untuk berburu satwa apa saja, di mana saja. Meskipun demikian, masyarakat tidak pernah berburu harimau, karena satwa tersebut bukan dianggap makanan oleh mereka. Menurut penuturan informan, yang biasa berburu harimau ialah orang-orang dari luar wilayah mereka (kecamatan lain) dan mereka hanya pernah mengantarkan saja ke dalam hutan.

Hal itu juga berlaku pada pemanfaatan kayu di dalam hutan; masyarakat tidak dilarang untuk mengambil kayu apa saja, di mana pun di dalam hutan. Saat ini, masyarakat sudah jarang mengambil kayu di dalam hutan, dan walaupun harus mencari kayu, mereka biasanya mencari di daerah paling dalam dari wilayah hutan dan dekat dengan sungai. Biasanya, masyarakat memanfaatkan sisa kayu-kayu yang direndam di pinggir sungai hasil dari pembukaan lahan perusahaan, karena adanya larangan bagi perusahaan untuk mengolah kayu tersebut.

## **INTERVENSI NGO DALAM UPAYA MEMAJUKAN DESA**

Intervensi pada area model ini antara lain: dukungan produksi furnitur rotan di Desa Pangkalan Bulian (2016) dan rehabilitasi HL Sungai Merah (2016-2017) didukung oleh GIZ-Bioclime, restorasi 100 hektar kawasan HL Sungai Merah dan Sungai Batanghari Leko di Desa Lubuk Bintialo dan Desa Pangkalan Bulian didukung oleh Yapeka (2018), serta pembinaan masyarakat perambah hutan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Transmigrasi Sumsel (2018). Sejak 2017, proyek KELOLA SENDANG telah mengembangkan beberapa inisiatif di area model ini, antara lain:

- a) Penyusunan *business plan* KPHP Meranti yang difasilitasi oleh Forum DAS;
- b) Pelatihan dan implementasi SMART Patrol bagi KPHP Meranti;
- c) Penyusunan profil desa dan pemetaan batas desa partisipatif, disertai dengan pelatihan pemanenan madu sialang berkelanjutan dan budidaya lebah kelulut di Desa Lubuk Bintialo dan Desa Pangkalan Bulian dengan dukungan fasilitasi dari Yayasan Puter;
- d) Fasilitasi pengajuan izin Hutan Kemasyarakatan (HKM) oleh Gapoktan Desa Lubuk Bintialo dalam skema Perhutanan Sosial seluas 500 hektar di Desa Lubuk Bintialo;
- e) Fasilitasi penyelesaian konflik perambahan dan rehabilitasi/restorasi SM Dangku berbasis skema kemitraan multipihak sebagai *role model* yang diajukan oleh Balai KSDA Sumatera Selatan, antara lain melalui kegiatan penanaman lahan kosong pada wilayah Sungai Petai, Sungai Biduk, dan Sungai Napuh secara gotong royong bersama masyarakat, dengan jenis tumbuhan lokal dan jenis *multipurpose tree species* (MPTS) meliputi jelutung (*Dyera costulata*), bambang lanang (*Michelia champaca*), ketapang mini (*Terminalia mantaly*), tanjung (*Mimusops elengi*), sirsak (*Annona muricata*), dan durian (*Durio sp.*), perobohan puluhan pondok yang tidak dihuni dan rusak, dan penerapan pohon sela di dalam lahan yang digarap oleh masyarakat.

Pada konteks Desa Lubuk Bintialo, ZSL dianggap sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat yang berfokus terhadap pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Program-program yang dibawa oleh ZSL dan pihak ketiga (seperti Yayasan Puter dan Penabulu) banyak mendapatkan respons positif dari masyarakat Desa Lubuk Bintialo. Salah satunya adalah program pemberdayaan, seperti memberikan bantuan pelatihan penanaman dan bibit merbau, mahoni, meranti, pala, jengkol, gaharu, dan kelengkeng.

Selain itu, para petani juga mendapatkan akses terhadap jaringan-jaringan penampung hingga pemasaran yang juga mitra dari ZSL. Gapoktan juga merupakan hasil kerja sama antara petani dengan ZSL pada tahun 2016. Menurut penuturan petani di Lubuk Bintialo, ZSL mendorong para petani untuk mendapatkan SK dan HKM secara legal, juga ketika ada kegiatan negosiasi dengan perusahaan, ZSL berperan aktif untuk melakukan negosiasi tersebut. Tidak hanya pada ranah perusahaan, namun juga pihak luar, seperti dinas pemerintahan, dengan tetap melibatkan peran petani dalam diskusi yang terjadi. Interaksi para petani Lubuk Bintialo dengan KPH Meranti juga mulai dibangun dengan kehadiran dari ZSL. Adanya pihak dari ZSL yang turun ke lapangan untuk memantau keadaan lapangan secara nyata juga bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu LSM Puter dan Penabulu. LSM ini bertugas

untuk memantau program area model yang telah direncanakan, untuk selanjutnya dibuat laporan dan tindak lanjut.

LSM Puter merupakan LSM yang berperan sebagai pihak ketiga yang memantau dan mendampingi program ZSL di desa-desa yang terdapat di dalam proyek KELOLA Sendang, salah satunya adalah Desa Lubuk Bintialo. Puter juga berperan untuk memastikan program yang telah berjalan, seperti area model satu hingga empat berjalan dengan baik di masing-masing desa, melihat kendala di lapangan, dan mencari solusinya bersama dengan ZSL. Peran LSM lain adalah Penabulu yang berfokus pada program-program di ranah pemerintah untuk desa. LSM ini berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat dan memediasi pemerintah dan masyarakat desa untuk mempraktikkan berbagai program kerja.

### **PERHUTANAN SOSIAL: PENJAGAAN AKSES KAWASAN HUTAN**

Saat ini, KELOLA Sendang bersama dengan KPH Meranti telah mengembangkan program Perhutanan Sosial di wilayah Desa Lubuk Bintialo, dalam bentuk skema Hutan Kemasyarakatan (HKM). Skema ini dimaksudkan agar masyarakat desa memiliki dasar legal dalam mengakses lahan garapan yang terdapat di dalam wilayah Hutan Lindung. Hal ini dapat dilihat dari sasaran penerima program, yang merupakan masyarakat pendatang yang bermukim di wilayah Dusun 6, Desa Lubuk Bintialo. Wilayah permukiman mereka sebagian besar berada di dalam areal Hutan Lindung dan selebihnya berada di sepanjang jalan pipa gas milik PT ConocoPhillips.

Pada masa awal kedatangan<sup>8</sup> mereka ke Lubuk Bintialo, para pendatang tersebut belum tercatat sebagai penduduk desa, hal ini dikarenakan posisi permukiman mereka yang tepat berada di dalam kawasan Hutan Lindung. Kepala desa sendiri tidak berani untuk mengambil risiko, baik untuk memberikan izin secara tertulis kepada mereka untuk bermukim di wilayah sendiri, ataupun untuk membuat surat keterangan kependudukan terhadap pendatang yang berada di wilayah tersebut. Meskipun demikian, kepala desa pada waktu itu, yakni Abu Leman, tidak mempermasalahkan keberadaan mereka, selama kegiatan yang mereka lakukan tidak dikaitkan dengan Desa Lubuk Bintialo.

Interaksi mereka dengan aparat kehutanan sendiri sempat mengalami ketegangan, karena oleh aparat mereka dianggap sebagai penduduk ilegal yang berpotensi merusak areal Hutan Lindung. Hal tersebut

<sup>8</sup> Penduduk pendatang yang berasal dari etnis Jawa dan Bugis menetap di dalam kawasan Hutan Lindung pada medio tahun 2011-2012.

disebabkan pada tahun 2013, Dinas Kehutanan mulai mengunjungi kawasan tempat orang-orang Bugis bermukim di Desa Lubuk Bintialo ini. Akhirnya, mereka tetap diizinkan oleh Dinas Kehutanan untuk bermatapencaharian di kawasan Hutan Lindung, namun dilarang memperluas dan membakar.

Baru pada tahun 2016, terdapat intervensi oleh pihak ZSL untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat di Desa Lubuk Bintialo sebagai bagian dari Area Model 1. Perhutsos di Desa Lubuk Bintialo dijalankan dengan konsep pengelolaan yang menggabungkan restorasi dengan *agroforestry*. Proses dimulai dengan membuka akses kelola masyarakat, dengan membentuk kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) di tingkat desa yang turut difasilitasi oleh KELOLA Sendang. Di desa ini terdapat dua KTH yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan) Meranti Wana Makmur.

Tidak hanya membentuk kelompok, KELOLA Sendang juga memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan. Beberapa di antaranya dengan memberikan pemahaman dan pelatihan mengenai pemetaan lahan dan perencanaan penggunaan lahan desa. Selain itu, di tahun 2019, KELOLA Sendang juga merencanakan pelatihan penerapan praktik pertanian terbaik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karet. Bersama dengan Balitbang, KELOLA Sendang juga akan memberikan pelatihan teknis untuk melakukan pembibitan tanaman kehutanan.

Pembentukan kelembagaan serta kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas ini, menurut Nurohim, Ketua Gapoktan Wana Tani Makmur, telah membuka kesempatan bagi para anggota dan masyarakat lainnya untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Di sekitar Desa Lubuk Bintialo, terdapat beberapa lokasi operasional perusahaan pertambangan minyak dan gas serta perusahaan Hutan Tanaman Industri, yang membuat Desa Lubuk Bintialo sebagai ring inti bagi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sebelum Gapoktan dibentuk, Nurohim mengaku desa ini telah banyak menerima berbagai bantuan dan program pembangunan dari berbagai perusahaan, namun tidak terintegrasi sesuai kebutuhan masyarakat. Kini, Gapoktan dipercaya oleh pemerintah desa untuk meng-koordinasikan setiap bantuan dan program pembangunan terkait pertanian dan lingkungan hidup.

Di bulan Desember 2018, setelah melalui proses kelengkapan dan verifikasi, Gapoktan Meranti Wana Tani Makmur mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan melalui program Perhutsos. Berdasarkan SK 7230/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/201, wilayah kelola yang diizinkan meliputi 513 hektar, yang terdiri dari 490

hektar kawasan Hutan Lindung dan 23 hektar kawasan Hutan Produksi Terbatas. Dalam wilayah ini, dalam waktu dekat Gapoktan berencana membuat demplot dan pembibitan tanaman hutan, terutama buah-buahan lokal. Karena ke depannya nanti, masyarakat memimpikan Desa Lubuk Bintialo menjadi desa wisata buah.

Dapat dikatakan bahwa adanya fasilitasi yang dilakukan oleh KELOLA Sendang dalam meloloskan Perhutanan Sosial di wilayah Desa Lubuk Bintialo merupakan bentuk lain dari alih fungsi program yang menjadi prioritas mereka, dalam hal ini penetapan koridor satwa yang memanjang dari PT REKI hingga ke SM Dangku. Semakin dekatnya jangka waktu berakhirnya program dan masih terbatasnya ruang gerak mereka dalam melakukan penerapan koridor satwa menyebabkan pelaksana program berupaya memutar akal dalam memberikan bukti riil bahwa program konservasi yang berjalan bersamaan dengan pemberdayaan masyarakat lokal telah dilakukan. Dan dalam hal ini berbentuk Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Tentunya, keberadaan Perhutanan Sosial tersebut dapat menjadi batu lompatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan serta flora dan fauna yang terdapat di dalamnya, namun apakah dapat menjadi upaya dalam menerapkan koridor satwa di kelak hari? Kita tidak dapat menjawabnya, karena, seperti yang telah kita tahu, program KELOLA Sendang sendiri akan berakhir pada pertengahan tahun 2020 ini.

## **IMPLEMENTASI BERBAGAI AKTOR DALAM PENERAPAN PERHUTANAN SOSIAL**

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Sumber daya manusia harus mencukupi (jumlah) dan kompeten (keahlian). Meskipun komunikasi baik dan konsisten, dan telah diimplementasikan dengan benar, implementasi kebijakan tidak akan berhasil jika sumber daya manusia terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sebaliknya, jika sumber daya manusia memadai dalam jumlah dan kualitas, tetapi informasi yang diperoleh dari pengawas di atas tentang implementasi kebijakan tidak memadai, implementasi kebijakan juga tidak akan berhasil. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus memiliki konsistensi dan kelayakan antara jumlah staf yang diperlukan dan keterampilan yang mereka miliki, sehubungan dengan tugas yang mereka lakukan.

Implementasi kebijakan kehutanan sosial di UPTD KPH Reg. 1 Meranti masih terhambat oleh kekurangan personil yang terlibat di dalamnya. Staf yang terlibat dalam peran Penyuluh Kehutanan hanya 1 (satu) laki-laki. Sementara, edukasi mengenai persoalan kehutanan

dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang hutan. Situasi ini dianggap tidak diinginkan ketika mempertimbangkan jumlah komunitas petani hutan dan area kerja. Tidak hanya di Kabupaten Muba, tetapi di semua kabupaten/kota di Sumatera Selatan kondisi ini terasa merata. Distribusi staf penyuluh hutan tidak seimbang antara kabupaten tanpa memperhitungkan jumlah komunitas petani hutan dan area pengelolaan. Ini harus menjadi perhatian pelaksana kebijakan, karena agen Penyuluh Kehutanan adalah kunci untuk menghubungkan kontak kebijakan dengan masyarakat.

Salah satu faktor pendukung untuk pengelolaan kehutanan sosial di bidang ini adalah partisipasi aktif dari aktor-aktor eksternal yang berkumpul dalam anggota Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS). Pembentukan Kelompok Kerja PPS mengacu pada Perdirjen PSKL No. P14/PSKL/Set/PSL.0/11/2016 Tentang Pedoman Fasilitasi, Pelatihan Dan Prosedur Kelompok Kerja Untuk Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS). Pokja PPS didirikan di Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 154/KPTS/Dishut/2017 yang membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan pada 2017-2020, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. 58 Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018 tentang implementasi *social forestry*.

Implementasi kebijakan kehutanan sosial tidak secara otomatis dihapus dari aturan yang jelas yang menaungi strategi ini sebagai dukungan sumber daya. Aturan teknis ini akan menjelaskan yurisdiksi, kewajiban, dan tugas utama serta peran organisasi yang terlibat. Kejelasan aturan permainan adalah salah satu perbedaan dengan aturan kehutanan sosial pra-2016 yang dianggap sebagai salah satu penyebab kegagalan. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan kehutanan sosial, berbagai peraturan turunan dikeluarkan pada pedoman global, Sumatera Selatan, dan Kelompok Kerja PPS. Aturan teknis ini penting sebagai panduan, sehingga menjadi acuan dalam implementasi kehutanan sosial.

Representasi kebijakan kehutanan sosial diperkenalkan di UPTD KPH Reg. 1. Karenanya, lembaga Hutan Kita Institute (HaKI) dan Lingkar Hijau sebagai bagian dari LSM dan proyek KELOLA Sendang (ZSL) sebagai bagian dari Mitra Pertumbuhan Hijau juga berkontribusi untuk mempercepat pelaksanaan kehutanan sosial di tingkat lokasi, baik dalam hal konsultasi, sosialisasi, saran, fasilitasi persiapan rencana kerja, dan pendanaan untuk mempromosikan kegiatan ekonomi di bidang kehutanan kelembagaan.

Pelaku kebijakan yang terdiri dari negara dan pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan kebijakan tentang kehutanan sosial. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan kebijakan

bersama ini di berbagai program dan bidang seperti alokasi dana, pelepasan, dan distribusi sumber daya manusia. Dedikasi ini dipenuhi dengan pembentukan unsur-unsur pelaksana di Kementerian LHK yang memiliki tugas merumuskan dan menegakkan kebijakan teknis dan standarisasi di bidang kehutanan sosial dalam bentuk Direktorat Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL). Situasi kontradiktif ada di tingkat pemerintah desa, di mana prioritas dianggap kurang dalam pelaksanaan program kehutanan sosial. Itu bisa dilihat dari tidak adanya input dari sistem pemerintahan desa (hasil forum pengembangan desa) tentang pengelolaan Kelompok Tani Hutan dalam implementasi Perhutanan Sosial.

Situasi ini menunjukkan sulitnya pembangunan antara pemerintah desa dan kelompok-kelompok petani kehutanan memiliki dampak yang cukup besar pada pengawalan masyarakat dan lembaga desa serta internalisasi skema Perhutanan Sosial. Ini menunjukkan bahwa kehadiran Perhutanan Sosial bukan merupakan bagian integral dari pengembangan kawasan, meringankan kaum miskin sambil meningkatkan kemandirian sosial-ekonomi kaum miskin di dalam dan sekitar hutan.

SOP dapat digambarkan sebagai serangkaian perintah kerja atau langkah yang harus diikuti untuk melakukan pekerjaan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. SOP sebagai sumber, tujuan, dan panduan teknis untuk implementasi kebijakan, pemerintah daerah (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan) sebagai kelompok pelaksana regional melalui PPM dengan kewenangan yang didelegasikan kepada UPTD Wilayah 1 KPH sebagai pelaksana di tingkat lokasi memiliki kriteria yang transparan dan dapat diobservasi untuk membentuk dasar bagi implementasi kehutanan sosial. Hal ini dapat dilihat dari penerapan kebijakan tersebut sesuai dengan aturan yang relevan dan aturan teknis sederhana yang ada dalam pengelolaan kehutanan sosial Sumatera Selatan. Menurut semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan aktor eksternal (LSM dan mitra Pembangunan Sumsel Hijau), akademisi, dll., peraturan teknis yang dikeluarkan telah cukup beradaptasi dengan aturan teknis kehutanan sosial.

Setidaknya, ada 3 kunci keberhasilan dalam menerapkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, termasuk: 1) Faktor kebijakan lingkungan dalam bentuk peran LSM, karakteristik dan partisipasi kelompok sasaran, dan pengaturan kepala daerah. Proses implementasi dimulai dengan sosialisasi yang baik dengan mendampingi LSM sehingga kepentingan kelompok muncul dalam melindungi proses implementasi partisipatif; 2) Faktor ketersediaan sumber daya seperti sumber daya manusia dan sumber daya keuangan, dan; 3) Akurasi faktor instrumen

kebijakan. Beberapa masalah utama ditemukan dalam implementasi kebijakan kehutanan sosial yang menjadi penyebab perizinan yang lambat, yaitu masalah birokrasi, institusi, dan pendanaan, serta pengetahuan.

Posisi kehutanan sosial 2014-2015 yang direncanakan telah dipengaruhi oleh peralihan kewenangan dari daerah ke provinsi. Jadi, ada perubahan dan penyesuaian untuk mengumpulkan data dan alat lainnya. Tugas proposal pengawalan tingkat situs lambat, karena pergeseran wewenang memungkinkan reposisi kelembagaan di lembaga kehutanan regional terjadi. Karena itu, selama masa transisi, fungsi teknis tidak beroperasi secara optimal. Perubahan kewenangan kebijakan kehutanan sosial yang awalnya dikelola oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) dipindahkan ke Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), di samping perubahan staf teknis. Sehingga transisi juga diduga menyebabkan keterlambatan dalam mengusulkan dan memberikan izin usaha untuk penggunaan hutan.

Secara umum, kebijakan kehutanan sosial diberlakukan di wilayah kerja UPTD KPH Reg. 1 Meranti cukup bagus/efektif. Meski begitu, ada beberapa poin utama, termasuk:

1. Masih ada kekurangan dana dan layanan untuk pekerja (sumber daya manusia);
2. Mekanisme aksi bersama antara para peserta bekerja dengan baik dengan kehadiran Kelompok Kerja PPS khusus;
3. Dengan adanya SOP yang berasal dari aturan pemerintah dan pemerintah daerah, aturan teknis menjadi jelas;
4. Komunikasi berjalan dengan baik antara masyarakat (kelompok petani hutan dan anggota koperasi), pemerintah lokal dan fasilitator, tetapi tidak begitu baik antar-struktur pemerintah (perwakilan desa dan organisasi dan pemerintah daerah).

Diperlukan perubahan sikap dalam mengelola Hutan Kemasyarakatan di masa depan. Langkah kemajuan bukan lagi bidang penyediaan akses legal kepada kelompok-kelompok petani hutan, melainkan kontribusi pendapatan negara dari penggunaan hutan melalui upaya-upaya kehutanan sosial. Sehingga fokus pemerintah di masa depan tidak hanya peran regulator dan dukungan pemasok dan layanan yang membuat aturan dan keluhan serta catatan administrasi, tetapi juga sebagai fasilitator/*enabler* dan seharusnya menjadi akselerator yang berkelanjutan, inklusif dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, yang memungkinkan inisiatif dan kemandirian masyarakat.





# BAB IV

---

MIMPI BURUK  
LENYAPNYA  
IKAN BELIDA

Menjelajahi jauh ke pedalaman kawasan hutan adalah aktivitas yang mengasyikkan, menantang, dan sekaligus menegangkan bagi sebagian dari banyak orang. Salah satu hutan yang menarik dijelajahi adalah sebuah hutan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Tidak saja karena cerita flora dan faunanya yang kaya dan kini terancam punah, tetapi juga dinamika aktivitas sosial-ekonomi di dalamnya.

Menurut penelitian Rangkuti 2014, sebagian wilayah Sumatera Selatan, khususnya Palembang, merupakan wilayah rawa (*wetland*) yang dialiri Sungai Musi. Daerah basah tersebut melingkupi wilayah antara 80-100 kilometer dari garis pantai sekarang. Selain ada berbagai kegiatan ekstraktif oleh berbagai institusi modern, secara bersamaan berlangsung berbagai aktivitas yang sering kali serupa juga dilakukan beragam masyarakat, baik tempatan maupun migran. Di waktu yang sama, berbagai institusi pemerintah dan non-pemerintah, termasuk dari kalangan NGO, berjibaku dan disibukkan pada beragam kegiatan non-ekstraktif dengan tujuan rehabilitasi dan restorasi ekosistem hutan. Beragam kegiatan dari berbagai aktor tersebut sering kali berkelindan dan berkonflik satu sama lain serta memiliki dampak positif dan negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan, sosial ekonomi masyarakat, dan kelestarian hutan. Dampak positif misalnya, kelembagaan petani pengelola hutan terbentuk, seperti masyarakat peduli api. Sedangkan dampak negatif di antaranya masyarakat sebagai sekadar obyek dalam beragam proyek tersebut.

Muara Medak adalah salah satu desa yang sedikit banyak merepresentasikan fenomena tersebut di atas. Desa ini merupakan salah satu desa yang sempat mencuat namanya dan viral di berbagai media massa nasional pada 2015 dan 2019 akibat kebakaran hutan dan lahan. Salah satu laporan harian *Antara* tahun 2019, kebakaran terakhir mencapai 680 hektar. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang menerjang pada waktu itu tidak saja membuat kalang kabut masyarakat yang terkena dampak langsung, tetapi juga pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), juga aparat keamanan.

Reportase *Mongabay* 2019 menyatakan bahwa sejak 2018, Badan Restorasi Gambut (BRG) sudah membangun sekat kanal 165 unit untuk membasahi gambut di Musi Banyuasin, dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta restorasi ekosistem gambut. Namun demikian, pantauan lapangan menunjukkan sekat kanal tak berfungsi sebagai penampung air di lahan gambut, bahkan kosong dan kering. Selain BRG, berbagai institusi pemerintah seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan elemen masyarakat sipil, seperti LSM, telah bahu membahu mengendalikan karhutla. Ultimatum tembak di tempat pun dikumandangkan untuk menghentikan para pelaku pembakar dan aktivitas pembakaran hutan.

Muara Medak adalah suatu desa yang letaknya jauh di pedalaman hutan. Untuk memasuki wilayah desa tersebut memerlukan waktu sekitar 10 jam dengan kendaraan darat. Muara Medak terletak di wilayah Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan kendaraan sewaan, kami tim penulis yang terdiri dari tiga orang, menuju lokasi dari tempat penginapan kami di pusat Palembang, sekitar jam 10 pagi, dan melewati jalanan utama ke arah Provinsi Jambi.

Kami bertiga terkejut ketika mobil mulai menuju ke arah Muara Medak, melewati jalan utama menuju Provinsi Jambi. Jalanan antarprovinsi tersebut sangat buruk, bergelombang di beberapa area, dan berlubang di hampir sepanjang jalan menuju Kecamatan Bayung Lencir. Berbagai kendaraan—truk, bus, sepeda motor, dan mobil pribadi—lalu lalang melewati jalan tersebut dengan tertatih-tatih. Mosaik lubang-lubang yang cukup banyak dan dalam di sepanjang jalan membuat tubuh berguncang keras dan punggung terasa sakit. Kondisi ini terjadi hampir di sepanjang perjalanan menuju ke Medak.

Setelah hampir delapan jam berlalu, kami pun memasuki wilayah Kecamatan Bayung Lencir. Dari kecamatan menuju Desa Muara Medak berjarak kurang lebih 27 km. Untuk menuju Desa Muara Medak, mobil harus melewati jalan yang berliku dan tidak beraspal. Dengan berjalan

pelan, mobil harus melewati dua wilayah Hak Guna Usaha perkebunan sawit, salah satunya adalah PT MAS. Begitu sampai di pintu masuk kawasan HGU, kami harus meminta izin untuk melewati wilayah perkebunan tersebut.

Sepanjang jalan menuju perusahaan perkebunan tersebut kiri kanannya didominasi oleh kebun sawit rakyat dan sesekali kebun karet. Kondisi hujan sebelumnya membuat jalanan agak licin. Setelah melewati kedua perkebunan, kami memasuki kawasan hutan dan di kiri kanan juga banyak kebun sawit dan karet, sesekali ada hutan sekunder yang tampaknya akan dikonversi menjadi kebun sawit ataupun karet; terlihat ada beberapa bagian area yang telah mulai dibersihkan.

Semakin dalam menuju Desa Muara Medak, semakin buruk kondisi jalan. Jalan di beberapa bagian semakin licin dan kami melihat ada satu mobil *pick up* hitam yang membawa galon air mineral terperosok tidak bergerak. Dengan segala cara, akhirnya mobil tersebut lepas dari kubangan tanah liat yang menjeratnya. Kondisi tersebut membuat sopir mobil kami angkat tangan dan meminta berhenti untuk menunggu di sebuah gubuk yang dihuni para petani sawit yang tampaknya beroperasi di kawasan hutan. Tidak ada pilihan lain, kami kemudian memohon petani tersebut untuk menyewakan motornya kepada kami. Setelah sedikit negosiasi, kami berhasil menyewa motor dan terus berkendara menuju Desa Muara Medak. Setelah sekitar satu jam berjuang, kami pun sampai di Desa Muara Medak.

## **SEJARAH DESA DAN LINTASAN PENGELOLAAN SDA MUARA MEDAK**

Konon, menurut cerita dari berbagai sumber, Desa Muara Medak merupakan bagian dari pemerintahan marga, sebuah unit “pemerintahan tradisional-lokal”. Artinya, desa ini merupakan suatu kesatuan organis yang terbentuk berdasar wilayah dan keturunan. Marga merupakan lembaga tertinggi kemasyarakatan setelah lembaga keluarga, kampung, dan dusun. Marga biasanya dipimpin oleh seorang pesirah yang memiliki wilayah kekuasaan setara dengan camat, sedangkan desa dipimpin oleh seorang *kerio*, yang setara kepala desa.

Berdirinya Muara Medak diawali pasca-pecahnya Dusun Sako Kemang di masa penjajahan Jepang, dari sebuah marga menjadi tiga dusun, yaitu: Pulau Gading, Mendis, dan Muara Medak. Nama Medak sendiri telah digunakan masyarakat sejak tahun 1939. Kata ‘medak’ diambil dari nama jenis tanaman cempedak yang banyak tumbuh di Desa Muara Medak saat itu. Saat ini cempedak sudah jarang ditemukan dan hanya menjadi cerita lama warga. Pada saat pemerintahan marga masih diakui, Desa Muara Medak dipimpin oleh seorang *kerio* bernama Kepidin.

*Kerio* Mian adalah pemimpin Medak yang terakhir. Pasca-intervensi kebijakan politik Orde Baru melalui Undang-Undang Pemerintahan Desa tahun 1979, pada sekitar 1984 pemerintahan marga dihapuskan dan kemudian istilah '*kerio*' berganti menjadi kepala desa.

Walaupun terletak di daerah pedalaman, penduduk Desa Muara Medak terus berkembang pesat. Wilayahnya yang seksi bagi para investor bisnis ekstraktif, spekulasi lahan, dan migran yang ingin mengubah keberuntungan, telah menarik mereka untuk beroperasi di sana. Penelitian Handoyo (2019) memaparkan bahwa wilayah gambut menjadi ruang alternatif lahan mineral yang semakin terbatas untuk akumulasi kapital. Meningkatnya permintaan pasar global terhadap komoditas seperti sawit yang dapat tumbuh dan adaptif di lahan gambut telah memiliki kontribusi nyata perubahan bentang lahan gambut. Akibatnya, lahan gambut yang tadinya merupakan sumber daya yang melimpah, baik dalam hal flora dan fauna, termasuk habitat bagi ikan-ikan yang menjadi sumber pangan masyarakat tempatan dan Orang Rimba, menjadi berubah mengering dan rentan terbakar akibat aktivitas ekonomi skala massif dari berbagai kegiatan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Penelitian Handoyo (2019) mengungkapkan bahwa wilayah rawa gambut sebelumnya merupakan wilayah yang dihuni oleh orang-orang keturunan Melayu yang melanggar adat, seperti asusila, kaum preman, dan migran miskin melalui program transmigrasi. Untuk di Medak sendiri, dominasi orang tempatan dan Suku Anak Dalam atas wilayah-wilayah tersebut semakin berkurang. Berbagai kelompok etnis berdatangan untuk mengais sisa-sisa lahan yang belum dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan raksasa. Data profil desa tahun 2015 menunjukkan penduduk Medak berjumlah 13.724 jiwa dengan jumlah laki-laki 6.497 dan perempuan 7.227 jiwa. Sementara jumlah Kepala Keluarga (KK) tercatat sebanyak 2.467 KK. Akibat berbagai aktivitas ekonomi tersebut, komposisi penduduk menjadi lebih beragam. Sebagian besar penduduk Desa Muara Medak adalah pendatang dari Jambi, Batak (Medan), Aceh, Jawa, Lampung, dan Palembang.

Selain komposisi penduduk yang beragam, mata pencaharian masyarakat Muara Medak juga sangat beragam. Sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani sawit, petani karet, dan buruh tani, lalu sisanya berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri maupun swasta, buruh bangunan, nelayan, dan lain sebagainya. Sumber penghasilan masyarakat Medak adalah dari hasil penjualan komoditi pertanian, dan gaji harian atau upah sebagai buruh di perusahaan sawit.

Sampai saat ini, belum ada angka akurat berapa total luasan lahan dan/atau sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat. Hal ini lebih disebabkan oleh belum adanya pemetaan tata guna lahan secara baik, benar, dan optimal. Namun demikian, berdasarkan estimasi Yayasan Puter tahun 2017, tata guna lahan Desa Muara Medak yang dapat dilihat di Tabel 4.1 menunjukkan HGU perkebunan dan Hutan Produksi mendominasi areal. HGU perkebunan mencapai luasan lebih dari 57 ribu hektar, disusul Hutan Produksi seluas lebih dari 18 ribu hektar. Sementara itu, perkebunan rakyat luasnya lebih dari enam ribu hektar.

TABEL 4.1 Tata Guna Lahan Muara Medak

No.	Tata Guna Lahan	Luas (Ha)
1	Tanah pekarangan	-
2	Tanah perkebunan rakyat	±6.748
3	Tanah Hak Guna Usaha perusahaan perkebunan	±57.539
4	Kawasan Hutan Produksi	±18.200
5	Persawahan rakyat	-
6	Tanah kekayaan desa	-
7	Jalan provinsi dan kabupaten	±250

Sumber: Yayasan Puter Indonesia (2017)

Letak Desa Muara Medak sebagian besar berada di kawasan hutan negara. Menurut informasi dari warga, desa tersebut sudah masuk peta indikatif TORA. Namun, warga tidak tahu kapan desa mereka akan dilepaskan. Berdasarkan informasi ZSL tahun 2019, dikemukakan bahwa 91% lahan di Desa Muara Medak berstatus sebagai Hutan Produksi dan sisanya adalah Areal Penggunaan Lain. Di tahun 2004 pernah diusulkan pelepasan 100 hektar Hutan Produksi untuk permukiman dan/atau menjadi hak milik kelola masyarakat, namun hanya 41 hektar yang disetujui oleh pemerintah.

Dari hitung-hitungan Yayasan Puter tahun 2017 yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), luas potensi sumber daya alam Medak cukup besar. Perkebunan dan perikanan menjadi sektor yang sangat potensial dikembangkan, seperti terlihat dalam Tabel 4.2.

TABEL 4.2 Luas Potensi Sumber Daya Alam Muara Medak Berdasarkan RPJMDes

No.	Tata Guna Lahan	Luas (ha)
1	Lahan Hutan Produksi	54.280
2	Lahan Hutan Lindung	11.520
3	Lahan permukiman	9.600
4	Lebak	1.280
5	Lahan perkebunan perusahaan	14.720
6	Rawa-rawa	1.920
7	Tanaman perkebunan masyarakat: kelapa sawit dan karet	32.000
8	Sungai	3.200
9	Jalan desa	1.280

Sumber: Yayasan Puter Indonesia (2017)

## POTENSI KONFLIK

Khusus pelaksanaan Perhutsos di Muara Medak lebih ditekankan pada pengembangan model pengelolaan lahan gambut dan pencegahan kebakaran hutan melalui Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin-KK). Mengapa demikian? Selain karena wilayah gambut yang penting untuk direstorasi, Medak juga sering kali dihantam oleh kejadian kebakaran hutan dan lahan yang massif.

Muara Medak adalah desa yang juga berdekatan dengan Muara Merang dan Kepayang. Di Medak sendiri ada 10 dusun dengan luas wilayah sekitar 75.000 hektar. Sekitar tahun 1960-an, hutan di wilayah ini masih bagus, dengan beragam spesies tanaman kayu dan rotan yang tumbuh subur. Saat ini, kawasan hutan gambut hanya menjadi status, namun tegakan hutannya telah berubah menjadi beragam penggunaan untuk pengembangan komoditas komersial, seperti sawit, karet, serta permukiman. Di lokasi ini pada tahun 2015 terjadi kebakaran hebat, terutama di Dusun 7, 8, dan 10.

Selain komoditas komersial tersebut, ada juga masyarakat yang mengembangkan jeruk seluas 2 hektar. Di Desa Medak hampir tidak ada yang tidak punya lahan. Di Dusun 8 misalnya, ada kepala dusun (kadus) yang memiliki lahan ratusan hektar, sementara warga lain memiliki sekitar 5 hingga 20 hektar. Rata-rata migran yang datang pada

tahun 2012 ke atas memiliki lahan antara 2 sampai 5 hektar. Mereka umumnya berasal dari OKI, Jawa, Lampung, Medan, dan sebagainya. Jumlah kelompok etnis Melayu sendiri tidak besar dan mereka tinggal dekat sungai, sementara warga Muara Merang umumnya dari Jawa, Lampung, dan lokal. Di sisi lain, warga Desa Kepayang kebanyakan merupakan orang lokal. Lahan yang berada di Desa Medak masih di kawasan hutan dan hanya sekitar 20 hektar yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL).

Rata-rata mereka yang memiliki lahan secara logika mereka ini kaya, tetapi tidak demikian dengan faktanya; sebagian mereka baru mulai menanam dan banyak yang tidak memiliki modal. Orang lokal memiliki lahan lumayan luas. Namun demikian, banyak orang luar seperti Medan, Jakarta, dan Cina yang memiliki lahan seluas 30-120 hektar. Ada orang yang beli puluhan hektar lahan dan dari lahan tersebut ada yang sebagian dikelola. Sebagian lahan lagi dibiarkan terlantar. Di sekitar Medak telah banyak HGU perkebunan (PT MAS) dan HTI (WKS). Sebagian masyarakat “cemburu” karena perusahaan boleh masuk kawasan, sementara mereka tidak boleh.

Masyarakat yang memiliki lahan sempit (2-4 hektar) cenderung mengembangkan karet karena modal dan perawatannya lebih ringan dibandingkan sawit. Sedangkan masyarakat yang menguasai lahan lebih luas mengembangkan karet dan sawit. Umumnya, para petani mengembangkan karet dan sawit dengan pola monokultur. Hasil dari komoditas karet rata-rata sekitar dua juta rupiah per hektar, sedangkan sawit bisa lebih besar dari itu. Harga sawit saat ini naik lebih baik dari sebelumnya, yaitu sekitar lebih dari 1.000 rupiah per kg, dan harga karet sekitar 9.000 rupiah per kg. Khusus karet, harga naik terutama setelah ada penetapan harga patokan karet dari pemerintah. Sistem penjualan saat ini menggunakan sistem lelang.

Selain aktivitas ekonomi rakyat tersebut di atas, saat ini Desa Muara Medak dikepeng oleh berbagai perusahaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri yang saling beroperasi dan berkompetisi di ruang yang sama. Kondisi ini akan meningkatkan terjadinya potensi krisis ekologis yang berdampak pada meningkatnya potensi konflik dan kejadian kebakaran hutan dan lahan. *Mongabay* tahun 2019 mencatat bahwa Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan memiliki kawasan gambut yang hampir setiap tahun terbakar. Namun demikian, dari hasil wawancara dengan fasilitator ZSL dan juga Penabulu tahun 2019, setidaknya ada empat persoalan mendasar terkait isu dan potensi terjadinya konflik di Desa Muara Medak, yaitu dalam hal: (1) status dan batas desa; (2) pembalakan liar; (3) pencurian hasil produksi sawit perusahaan, dan; (4) akumulasi lahan akibat dari jual-beli lahan.

### **JUGGERNAUT DAN LENYAPNYA PEMPEK IKAN BELIDA**

Kawasan gambut di Desa Muara Medak adalah salah satu kawasan gambut di Sumatera Selatan yang memiliki sejarah panjang dan kelam. Dari hasil eksplorasinya, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang mengungkapkan bahwa Desa Muara Medak merupakan wilayah perairan rawa banjiran (*flood plain*). Habitat tersebut selama ini menjadi gantungan hidup Suku Anak Dalam Muara Medak. Sebelum hadirnya industri ekstraktif, rawa gambut di wilayah Medak merupakan rumah dan wilayah jelajah bagi Suku Anak Dalam atau Orang Rimba. Kehidupan mereka amat bergantung pada perikanan yang melimpah di sekitar Sungai Perjudian dan Medak. Sebelum tahun 2000, masih banyak hutan rawa di desa ini, namun saat ini vegetasi pohon sudah banyak yang rusak akibat penebangan dan kebakaran, sehingga ditumbuhi oleh rumput (suksesi vegetasi). Perubahan lanskap dari hutan rawa menjadi sabana telah berdampak pada berkurangnya ikan di perairan tersebut, seperti lais, baung, tapa, dan belida.

*Tragedy of the common* tampaknya terjadi di area tersebut, yang sekaligus membalik tesis Garrett Hardin, sebab dengan ragam pengaturan melalui berbagai regulasi, tragedi justru terjadi. Hutan rimba yang kokoh berdiri nan lebat di atas rawa gambut, mulai mengalami kerusakan setelah hadirnya perusahaan HPH pada 1980-an, yang didukung oleh berbagai regulasi. Tanpa diberi nafas sedikit pun, setelah perusahaan berhenti justru dilanjutkan dengan pembalakan liar yang dilakukan para pendatang dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, Jawa, dan Tapanuli.

Salah satu cerita buruk pasca-industrialisasi kehutanan adalah mulai lenyap dan langkanya jenis ikan endemik rawa gambut, yakni ikan belida dan ikan gabus seperti yang terjadi di Medak. Kedua ikan ini penting bagi masyarakat rawa. Dahulu mereka membuat pempek dengan bahan ikan belida dan gabus, tetapi karena semakin sulit untuk mencari kedua ikan tersebut, maka mereka menggunakan tenggiri dari laut. Langkanya kedua ikan tersebut membuat harga keduanya semakin mahal. Informasi dari fasilitator lapangan mengatakan, saat ini di pasar sekalipun sangat sulit untuk mendapatkan ikan belida, terutama belida utuh. Harga untuk sisa *fillet* ikan belida saja bisa mencapai 60.000 rupiah per kg.

Selama ini, menurut salah satu direktur urusan kelembagaan salah satu mitra KS, lahan gambut telah dikonsepsikan sebagai kawasan kehutanan, sehingga kemudian ada reduksi menjadi lahan, padahal gambut itu sendiri merupakan ekosistem air. Dalam praktiknya, kebijakan intervensi yang dilakukan memerlukan biaya yang mahal tetapi gagal,

karena membuat kanal dan parit untuk pengeringan memberi “jalan tol” bagi beroperasinya institusi-institusi kapitalis modern. Hadirnya institusi-institusi modern tersebut diibaratkan Anthony Giddens (1990) sebagai *juggernaut* atau tank raksasa yang menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Dalam tesisnya, dia menegaskan bahwa selama lembaga-lembaga modern lestari, tidak akan mudah mengendalikan secara penuh baik jalur maupun perjalanannya. Hutan dan manusia tidak akan pernah merasa aman sepenuhnya, karena daerah di sepanjang lintasannya penuh dengan risiko dengan konsekuensi yang tinggi.

Bagi Orang Rimba dan orang tempatan lainnya, hutan dan kekayaan di dalamnya bukan lagi menjadi berkah, malah menjadi kutukan seperti dipostulatkan Auty (1993). Terlebih manakala terjadi kebakaran hutan dan lahan di Muara Medak 1997–1998, oleh ekspansi perkebunan sawit dan kehadiran migran. Kawasan ini merupakan wilayah yang hampir tiap tahun mengalami kebakaran. Akibatnya, hutan habis dan sebagian besar dikonversi menjadi perkebunan sawit. Bahkan, laporan *Mongabay* pada 2019 menyatakan kejadian kebakaran hutan dan lahan 2015 lalu telah meluluhlantakkan keanekaragaman hayati, memicu perubahan iklim, dan juga berpengaruh pada kehidupan Orang Rimba yang ratusan tahun hidup di Muara Medak.

Di masa lalu, bukan hanya pembalakan liar yang terjadi di hutan gambut Muara Medak, tetapi juga transfer lahan secara ilegal. Untuk di Area Model 2, isunya lebih pada kebakaran dan akumulasi lahan. Dari laporan ZSL tahun 2019 juga terungkap fenomena yang sama. Mayoritas penduduk di Muara Medak juga melewati lintasan sejarah yang sama, yakni membeli tanah kawasan Hutan Produksi. Hampir 91% penduduk di Muara Medak adalah kawasan Hutan Produksi. Mereka kebanyakan tidak mengetahui jika tanah yang dibeli sebenarnya tidak boleh untuk diperdagangkan.

Sama dengan di beberapa tempat lain, jual-beli dan penguasaan lahan di bawah tangan terjadi secara massif. Para pihak yang diberi kewenangan seolah-olah tidak mampu mengendalikan transfer lahan ilegal. Jual-beli lahan umumnya berlangsung atas dasar Surat Keterangan Tanah. Pada tahun 2007, harga tanah berkisar antara empat sampai lima juta rupiah, dan saat ini melonjak menjadi 15-20 juta per hektar. Lahan yang sudah ditanami karet bisa mencapai 50 juta per hektar, sementara jika sudah ditanami sawit bisa jauh lebih mahal dari harga tersebut. Lahan di kawasan hutan sekitar Medak semakin habis sejak tahun 2017. Hampir semua lahan telah dikuasai masyarakat dan perkebunan. Dalam penelitian Semedi dan Bakker (2014), terungkap bahwa fenomena transfer lahan di kawasan hutan tidak hanya terjadi di Medak, tetapi telah menjadi fenomena umum di wilayah-wilayah

pengembangan komoditas sawit seperti di Kalimantan Barat.

### DAPATKAH PERHUTSOS SEBAGAI SOLUSI?

Menyadari potensi besar terjadinya krisis ekologi dan ekonomi lokal masyarakat lahan gambut akibat kebakaran hutan dan lahan, serta cenderung menjamahnya konflik ruang kelola sumber daya hutan, ZSL menetapkan Muara Medak sebagai bagian dari Area Model 2 proyek KELOLA Sendang. Justifikasi penentuan lokasi didasarkan pada beberapa kriteria seperti: (1) Wilayah kawasan yang sudah dikelola warga sebelumnya (*existing*); (2) Lokasi yang mewakili karakteristik kondisi geografis dan persoalan di lanskap Sembilang–Dangku; (3) Tingkat ketergantungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat terhadap kawasan hutan, dan; (4) Merupakan desa di wilayah KPH Lalan Mendis dan KPH Meranti (KPH dalam lanskap Sembilang–Dangku).



GAMBAR 4.1 Petani *Agroforestry* dan Bibit yang Siap Ditanam di Desa Medak

Melalui proses yang cukup panjang—sekitar enam bulan—izin Perhutsos akhirnya diberikan pemerintah. Izin Perhutsos ini digunakan untuk mendorong dan memfasilitasi penataan lahan gambut seluas 3.539,64 hektar yang dikelola masyarakat Desa Muara Medak berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup RI No. 6303/Men-LHK/PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018. Izin Perhutsos melalui pola Kemitraan ini adalah izin pertama yang berada di atas lahan gambut. Skema ini dikelola oleh 879 KK yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Hutan Berkah Hijau Lestari dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Lalan Mendis. Masyarakat pada wilayah ini tergabung dalam 14 kelompok tani. Perhutsos diarahkan untuk menjawab setidaknya

empat persoalan utama yang dihadapi masyarakat, yakni: (1) akses penguasaan lahan; (2) sistem pola pertanian; (3) pola pemanfaatan kawasan, dan; (5) pengamanan sumber daya alam.

Sebagaimana diberitakan dalam *Warta Ekonomi* (2018), manakala Presiden menyerahkan izin Perhutsos secara langsung pada Minggu, 25 November 2018, warga menyambutnya dengan antusias. Demikian juga harapan besar menyembul dari Bupati Musi Banyuasin. Ia mengatakan, “Semoga pemberian hak akses kelola kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial ini berdampak positif bagi masyarakat dan akan meminimalkan persoalan konflik teritorial di Kabupaten Musi Banyuasin.” Pertanyaan kuncinya adalah: mampukah Perhutsos menjadi instrumen mujarab kebijakan untuk menjawab beragam masalah tersebut di atas? Atau apakah justru Perhutsos akan menciptakan problem-problem baru? Siapa yang diuntungkan dari kebijakan ini?

Proyek KELOLA Sendang – ZSL Indonesia mendukung sepenuhnya program Perhutsos di Muara Medak. Proyek KELOLA Sendang di Area Model 2 melibatkan sejumlah pihak seperti Balai Penelitian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang, Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Sumatera Selatan, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balitro), Penabulu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dan yang lainnya. Direktur ZSL mengatakan bahwa pendekatan restorasi lanskap memiliki tujuan akhir yakni mewujudkan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan keanekaragaman hayati kembali pulih. Dalam pendekatan ini, wilayah kelola dibagi menjadi empat zona, yakni: (1) Konservasi Perikanan Tangkap; (2) *Agroforestry* Terbatas; (3) Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); dan (4) Sumber Benih.

Di lapangan, proses terus dibangun dan dikomunikasikan kepada masyarakat. Tujuan dari proses ini adalah membangun kesepahaman dan legitimasi pada komunitas-komunitas warga. Beberapa program kerja yang dilakukan di antaranya adalah:

1. Diskusi koordinasi penyusunan *draft outline* buku pedoman REPAIR (Regu Peduli Air);
2. Bimbingan teknis pembangunan pembibitan;
3. Pelatihan kapasitas petani, dan;
4. Pengadaan bibit dan perlengkapan sebagai persiapan pembibitan.

Penyusunan buku pedoman REPAIR juga melibatkan diskusi dengan pihak Universitas Jambi serta *stakeholders* lainnya. Materi dalam pedoman REPAIR juga akan memuat bagaimana teknis penilaian kanal dan model sekat yang akan dibangun.

Dalam proyek Perhutsos, ada beberapa jenis tanaman Hasil Hutan

Bukan Kayu (HHBK) komersial prospektif yang menguntungkan secara ekonomi bagi petani. Pinang adalah salah satu jenis komoditas prospektif yang bisa hidup di lahan gambut. Jenis pinang betara, misalkan, memunyai masa panen minimal di umur 2-2,5 tahun dengan produksi minimal 1 ton setiap hektar, dengan jarak tanam 3x3 meter (m) atau setara dengan populasi sebanyak 1.111 per hektar. Dalam sebulan, minimal 1 ton pinang bisa dipanen dengan harga buah kering yang masih cukup tinggi, yaitu Rp15.000,00–Rp18.000,00 per kg. Selain pinang, jelutung juga akan dibudidayakan karena adaptif di lahan gambut dan memiliki nilai ekonomi tinggi.

Dalam kegiatan Perhutsos, khususnya dalam hal pembibitan, dilibatkan pelaku usaha pembibitan. Pembelian bibit seperti pinang dan jelutung dari pelaku usaha tersebut dilakukan sebagai modal awal dalam pembangunan persemaian di Muara Medak. Jumlah total bibit yang dibeli adalah 25.000 bibit, terdiri dari pinang dan jelutung. Pelaku usaha juga berkomitmen untuk mau membantu/berbagi dalam hal pemasaran bibit yang telah dibuat serta berkomitmen untuk mau membimbing dalam pengelolaan persemaian.

Sementara itu, kegiatan pembuatan persemaian diarahkan untuk media pembelajaran bagi petani dan penyediaan bibit untuk Perhutsos. Pembuatan persemaian bagi Kelompok Tani Al-Barokah merupakan elemen yang sangat penting berhubungan dengan Perhutanan Sosial, terutama terkait upaya rehabilitasi lahan gambut dan usaha ekonomi di Muara Medak.

Kegiatan berikutnya adalah peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan kapasitas pengetahuan anggota kelompok tani. Salah satu materi pelatihan adalah berkaitan dengan teknik pembibitan tanaman. Pembibitan tanaman merupakan kegiatan lanjutan setelah bangunan persemaian berdiri. Peserta pelatihan berjumlah 25 orang anggota Kelompok Tani Al-Barokah Dusun 7 Muara Medak. Pelatihan juga diarahkan untuk pengembangan manajemen persemaian. Manajemen persemaian mengacu pada manajemen persemaian kelompok usaha pembibitan daerah lain yang sudah berjalan dan menjadikan persemaian sebagai usaha pekerjaan, dengan harapan model usaha yang ada bisa dicontoh dan diterapkan pada kelompok tani di Muara Medak.

#### **CAPAIAN KELOLA SENDANG: PERHUTSOS DAN AGROFORESTRY**

Salah satu kemajuan yang dicapai dari kegiatan Perhutsos ini adalah keberhasilan Gabungan Kelompok Tani Berkah Hijau Lestari. Mereka telah membuat Rencana Kerja Usaha (RKU) dengan fasilitasi proyek KS. Dalam RKU, seperti telah disinggung di bagian awal, wilayah

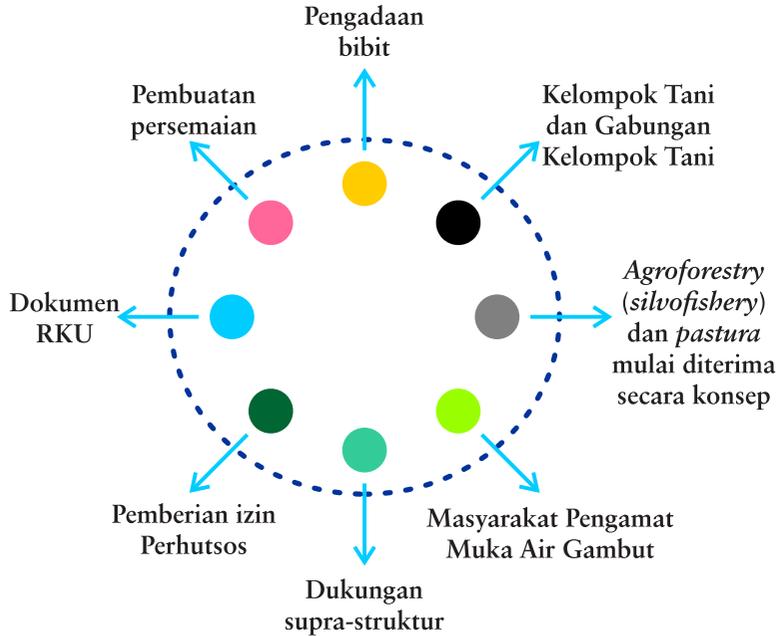
kelola dibagi menjadi empat zonasi. Pertama, Zona Konservasi Perikanan Tangkap seluas 400 hektar. Zona ini berada di area gambut dalam dan diperuntukkan bagi kehidupan 16 KK Orang Rimba yang menetap di permukiman berupa rumah-rumah panggung. Wilayah ini adalah zona gambut dalam yang rusak akibat penebangan, kebakaran, dan ekspansi perkebunan sawit masyarakat. Kedua, Zona *Agroforestry* Terbatas seluas 1.400 hektar. Zona *agroforestry* dikembangkan melalui pembuatan demplot terbatas, dengan berbagai tanaman seperti gaharu, nangka, kemiri, dan komoditas atsiri seperti serai wangi dan jeruk purut. Dalam demplot ini juga ditanam pinang dan jelutung. Ketiga, Zona HHBK dan Sumber Benih seluas 1.200 hektar. Teristimewa di Zona HHBK, akan dikembangkan bibit tumbuhan asli rawa gambut seperti jelutung. Keempat, Zona *Silvopastura* seluas 500 hektar. Kawasan ini akan dikembangkan peternakan rawa gambut dari Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Proyek ini mendorong munculnya alternatif komoditas selain sawit dan karet, melalui uji coba skema *agroforestry* dan *agrosilvofishery*. Dalam hal tersebut, pemerintah daerah hampir tidak memiliki kapasitas intervensi seperti pemberian bibit. Dari masalah tersebut di atas, Penabulu mencoba masuk dengan mengembangkan budidaya ikan, walaupun masih belum ikan lokal. Ikan yang coba dibudidayakan adalah ikan nila, gurami, dan patin. Pembudidayaan ikan lokal sulit dilakukan karena ikan tersebut sulit ditemukan. Langkah yang dapat dilakukan adalah ikan di rawa, paling tidak untuk membuat masyarakat memiliki kapasitas budidaya. Budidaya ikan ini dikembangkan di kawasan rawa dangkal dan sebagai *pilot project* membutuhkan 4 kolam. Rawa dangkal dipilih karena umumnya tingkat keasamannya (pH) cukup tinggi. Potensi pengembangan budidaya ikan ini cukup tinggi karena ada ratusan hektar kawasan rawa. Dalam rangka memperkuat fasilitas budidaya ikan di rawa, Penabulu mencoba bermitra dengan sektor swasta, yakni PT GAL. PT GAL ternyata tertarik dan mereka bersedia untuk mengusahakan bibit ikannya.

Di Area Model 2 kita menghadirkan kelembagaan yang tidak terlalu hierarkis. Lembaga ini bisa menjadi wadah untuk mendiskusikan *cross cutting issues*, di antaranya *agroforestry* dan isu lainnya. *Master plan* dan rencana aksinya sudah disiapkan produk hukumnya.

Dalam Gambar 4.2, diilustrasikan capaian-capaian kegiatan yang telah dilaksanakan.

Capaian pertama adalah terkait dengan legalitas Perhutanan Sosial.



GAMBAR 4.2 Capaian Perhutsos di Muara Medak

Kedua, pembuatan dokumen Rencana Karya Umum (RKU) yang difasilitasi oleh ahli dari Balai Penelitian Kehutanan Sumatera Selatan. Ketiga, pembuatan persemaian. Keempat, pengadaan bibit seperti gaharu, kemiri, dan nangka untuk di Dusun 1. Kelima, pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di persemaian serta *agroforestry*. Keenam, konsep *agroforestry (silvofishery)* secara konsep dan praktik mulai diterima. Ketujuh, terbentuk kelompok pengamat muka air.

### CENTANG PERENANG PROBLEM PERHUTSOS DI MUARA MEDAK

Tentunya, sungguh naif bila capaian Perhutsos hanya dilihat dari selebar izin. ZSL tidak menampik bila keberhasilan Perhutsos harus juga dilihat pascaizin. Namun demikian, tantangan pelaksanaan Perhutsos ternyata tidak sederhana. Selain faktor teknis-administratif, ada faktor lain seperti sosial-budaya, ekonomi, kelembagaan, serta politik. Dari hasil wawancara beberapa pelaksana di lapangan, terungkap beberapa persoalan yang tentunya dapat memengaruhi capaian.

Salah satu responden ZSL mengungkapkan bahwa areal Perhutsos masih ditentukan oleh PIAPS dan belum mewakili hutan-hutan yang dikelola masyarakat. Seperti kasus di Merang, terdapat areal yang jauh

dari permukiman warga. Oleh karena itu PIAPS tidak memiliki relasi organis dengan pengelolaan masyarakat. Meskipun ada mekanisme revisi, tetapi faktanya hanya sedikit kepala desa dan masyarakat yang mengetahui program Perhutsos.



GAMBAR 4.3 Bibit *Agroforestry* di Desa Medak

Selain itu, menurut responden tersebut, Perhutsos amat tergantung pada KPH dan LSM. KPH umumnya cenderung menawarkan skema Kemitraan. Walaupun di setiap provinsi terdapat Pokja Perhutsos, namun mereka tidak memiliki anggaran. Hal tersebut juga menjadi indikasi kurangnya dukungan pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan oleh anggapan bahwa Perhutsos merupakan program kehutanan, bukan program mereka.

Demikian juga misalnya dengan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Meskipun ada areal TORA yang sudah disetujui, tetapi ternyata belum tentu diketahui oleh Pemda. Begitu juga di Medak, warga hanya mengetahui seluas 200 hektar permukiman mereka akan terkena program tersebut, namun belum mengetahui pasti kapan akan terealisasi. Fakta-fakta di lapangan terkait dengan keputusan-keputusan politik seperti di atas juga akan menentukan capaian program Perhutsos di tingkat tapak. Ada ketidaksinkronan antara keputusan politik di desa, kabupaten, provinsi, dan nasional. Program Perhutsos akan sia-sia jika tidak bisa memperbaiki tata kelola sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta koneksinya dengan pembangunan desa.

Pertanyaan dasarnya kemudian adalah: siapa yang berhak memiliki akses terkait Perhutsos. Untuk menjawab pertanyaan ini memerlukan verifikasi kependudukan desa. Fakta di lapangan menunjukkan, umumnya tidak ada bukti identitas yang jelas, dan walaupun ada

ternyata tidak valid. Proses ini membuka peluang manipulasi, apalagi kalau hanya mengejar target capaian kuantitas. Dalam proses pendataan penduduk biasanya banyak kepentingan yang didorong oleh kelemahan sistem administrasi desa akibat tekanan target. Di sisi lain, kewenangan daerah tidak cukup otoritatif dan desa hanya berwenang pada pengusulan. Sehingga, skema Perhutsos rentan proses manipulatif.

Menurut responden lainnya, setelah izin keluar, pemegang izin diwajibkan untuk membuat RKU/RKT. Namun demikian, yang terjadi adalah mirip pada kasus di Perhutani yang diminta membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) secara massal; ternyata banyak yang menjiplak dokumen Rencana Karya Umum (RKU)/Rencana Karya Tahunan (RKT). Padahal, RKT ini merupakan dasar pemantauan dan evaluasi, di mana jika tidak sesuai ada sanksinya. Dalam proses pembuatan RKT terdapat proses pendampingan oleh LSM atau KPH. Pertanyaan berikutnya: bagaimana kualitasnya? Meskipun mereka bisa saja membuat dokumen, namun nyatanya tidak ada beda antara masyarakat yang memiliki izin Perhutsos dengan yang tidak memiliki izin. Oleh karena itu, pada praktiknya masih banyak petani yang menanam sawit, walaupun komoditas itu dilarang. Bedanya, ada petani yang aktivitasnya menjadi legal setelah sebelumnya ilegal, ada pula yang tetap ilegal.

### HIKMAH DARI PERHUTSOS: POLITIK TRANSFORMASI HIJAU

Transformasi Hijau melalui proyek KS dengan beragam elemen khususnya Perhutsos tidak berjalan dalam ruang kosong. Proyek tersebut beroperasi di ruang yang sangat politis. Mengapa politik dan apa yang membuatnya politis? Kami sependapat dengan Ian Scoones, Peter Newell, dan Melissa Leach (2015) yang menyatakan bahwa capaian-capaian dari Transformasi Hijau akan sangat ditentukan oleh siapa yang akan membawa transformasi tersebut dan seperti apa transformasi itu diinginkan. Swilling dan Annecke (2012) mencoba menegaskan bahwa tidak mungkin ada Transformasi Hijau di banyak negara berkembang jika isu keadilan sosial bukan bagian dari perdebatan.

Upaya politis untuk menjadikan proyek KS sebagai *government-led project* tentunya akan membawa konsekuensi-konsekuensi yang juga politis. Capaian dan keberhasilan proyek KS sangat ditentukan oleh perspektif, paradigma, serta perilaku atau kultur birokrasi dalam memandang dan menjalankan proyek KS, khususnya Perhutsos. Artinya, bagi Ian Scoones, Peter Newell, dan Melissa Leach, Transformasi Hijau akan ditentukan oleh seperti apa tata kelola yang akan dibangun, siapa yang mengaturnya, dan regulasi serta relasi kekuasaan macam apa yang akan dibangun. Pembelajaran praktik lapangan menunjukkan bahwa capaian Perhutsos

masih belum terlalu signifikan dari sisi kualitas dan kuantitas. Perdebatan panjang, baik di level konsep terkait *sustainable landscape* dan praktik di tingkat implementasi dari berbagai aktor yang terlibat dalam proyek KS, berdampak signifikan pada capaian program. Dukungan kelembagaan dan penganggaran yang boleh dikatakan tidak ada dari sektor birokrasi dan munculnya pandangan program KS program sektoral dan pusat menjadi faktor penentu capaian proyek.

Harapan besar dengan menempatkan sektor pemerintah daerah sebagai pelaku utama dan pemerintah pusat sebagai pengarah proyek agar keberhasilan proyek semakin besar, dalam praktiknya selama ini belum cukup menghasilkan kekuatan konkret untuk memacu jalannya proyek. Penempatan tanggung jawab mobilisasi keputusan dan sumber daya pada tim *ad hoc* di level eselon tiga adalah sebuah strategi yang boleh dikatakan keliru, karena rantai pengambilan keputusan menjadi lebih panjang dan kurang *powerful* dalam struktur yang birokratis.

Di sisi lain, Transformasi Hijau yang dipimpin pemerintah dalam proses pelembagaan proyek KS tidak mampu mengatasi gap perspektif dan aspirasi oleh petani Perhutsos. Misalnya saja, keinginan petani untuk mendapatkan bibit tanaman kayu komersial, seperti gaharu, masih belum terpenuhi di lapangan. Demikian juga pemberian bibit seperti nangka dan kemiri yang tidak menarik bagi petani, menyebabkan mereka kurang antusias untuk menanamnya. Kurangnya antusiasme petani sejatinya bisa disebabkan oleh pengetahuan dan kultur menanam jenis-jenis tersebut belum tersosialisasikan dengan baik. Kami sependapat dengan Hackmann dan St Clair (2012) yang menegaskan bahwa politik transformasi juga melibatkan politik pengetahuan dan budaya. Membangun jalur yang lebih berkelanjutan melibatkan transformasi dalam perilaku di tingkat pribadi dan kolektif dan didukung oleh keyakinan bahwa perubahan diperlukan dan diinginkan.

Dari hasil capaian di lapangan tersebut, maka kami sarankan perlu adanya refleksi menyeluruh terhadap kegiatan KS, termasuk Perhutsos. Refleksi ini berkenaan dengan pendekatan politik penempatan pemerintah sebagai pengendali (*government-led transformations*). Perlu ada perubahan pendekatan yang dikombinasikan dengan pendekatan transformasi dari bawah (*citizen-led transformations*). Bagi Dobson (2009), dengan kombinasi Transformasi Hijau yang lebih populis, yaitu berpusat pada kendali atas sumber daya dari elite negara, Transformasi Hijau yang disinergikan dengan aspirasi dari bawah berpotensi memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih tinggi.



# BAB V

---

MELAWAN WABAH  
SAMPAH DI TEPIAN  
SEMBILANG

Kali pertama kapal pesiar merapat di Muara Musi, para turis asing yang menumpang padanya itu bertujuan ingin melihat keelokan alam Taman Nasional Sembilang (TN Sembilang) serta kekayaan tradisi budaya masyarakat pesisir di Muara Sungsang dan sekitarnya. Disambut oleh tarian selendang dan tarian selamat datang serta sajian hidangan pindang udang, para turis asing mengakui keramahan warga Sungsang serta takjub atas atraksi wisata dan budaya, seperti yang disiarkan oleh berbagai media massa (*Gatra* dan *TribunNews*, 2019).

Namun demikian, di balik ketakjuban serta terpuaskannya rasa penasaran turis melihat migrasi burung-burung dari Siberia, terselip kisah yang ironis. Rupanya, semasa kunjungan sejumlah turis terlihat tidak nyaman. Ketidaknyamanan itu bukan disebabkan oleh pengalaman buruk selama berwisata, tetapi oleh hamparan sampah yang terlihat pada setiap sudut pandangan mata. Banyaknya sampah di Muara Musi menjadi satu tantangan bagi upaya konservasi berkelanjutan, sekaligus gambaran atas jalinan masalah yang multidimensi.

## ARAL BAGI MODEL BERKELANJUTAN DI TN SEMBILANG DAN SEKITARNYA

Sekiranya, area kunjungan kapal pesiar asing di atas adalah satu bagian di Area Model 3 KELOLA Sendang (AM 3 KS). AM 3 KS adalah kategori konseptual dari proyek KELOLA Sendang (KS). Secara administratif, AM 3 KS meliputi Kecamatan Banyuasin II<sup>9</sup> dan Kecamatan Karang Agung Ilir, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Berlokasi di pesisir timur Sumatera, luas area kerja kolaboratif itu mencapai 198.067 hektar dan wilayah di luar TN Sembilang seluas 126.303 hektar.

AM 3 KS tidak dapat terlepas dari keberadaan Taman Nasional (TN) Sembilang. Salah satu kawasan yang berpengaruh di AM 3 KS adalah TN Sembilang. TN Sembilang terletak di pesisir timur Provinsi Sumatera Selatan, yang secara geografis berada pada 104°14'-104°54' Bujur Timur dan 1°53'- 2°27' Lintang Selatan. TN Sembilang merupakan kawasan *mangrove* terluas di wilayah Indonesia bagian barat. Kawasan itu menjadi representasi dari hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan riparian (tepi sungai), serta kawasan pesisir dan sempadan sungai dengan sebaran ketinggian 0-2 meter di atas permukaan air laut.

Karakteristik bentang alam itu menciptakan habitat alamiah bagi sejumlah flora dan fauna. Secara rutin, terutama area pada TN Sembilang menjadi tempat lintasan burung-burung bermigrasi. Jumlah besar untuk burung migran dari Siberia dapat dilihat di Sembilang, mencapai klimaks pada sekitar bulan Oktober. Panggilan dari ribuan burung yang terbang dalam formasi bahkan dapat didengar di atas gemuruh ombak Selat Bangka. Area ini pun menjadi habitat bagi beragam fauna, antara lain harimau sumatera dan gajah sumatera yang kerap mencuri perhatian publik atas keberadaannya.<sup>10</sup>

Kesejarahan TN Sembilang bermula dari peningkatan status Hutan Suaka Alam Sembilang dengan luas 207.750 hektar. Berdasarkan Perda

<sup>9</sup> Kecamatan Banyuasin II pada tahun 2018 mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Karang Agung Ilir. Sebelum pemekaran, kecamatan ini memunyai wilayah seluas 370.740 hektar dan terbagi menjadi 17 desa, yang 8 desa di antaranya berbatasan langsung dengan kawasan TN Sembilang, yaitu: Desa Tanah Pilih, Desa Sungsang 4, Desa Sungsang 2, Desa Tabala Jaya, Desa Sumber Rejeki, Desa Majuria, Desa Karangsari, dan Desa Jatisari.

<sup>10</sup> Keanekaragaman hayati di TN Sembilang meliputi berbagai macam tanaman darat dan air tumbuh di taman ini, termasuk gajah paku (*Acrostichum aureum*), nipah (*Nypa fruticans*), cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*), pandan (*Pandanus tectorius*), waru laut (*Hibiscus tiliaceus*), nibung (*Oncosperma tigillaria*), jelutung (*Dyera costulata*), menggeris (*Koompassia excelsa*), gelam tikus (*Syzygium inophylla*), *Rhizophora sp.*, *Sonneratia alba*, dan *Bruguiera gymnorhiza*. Sementara, fauna adalah harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), tapir melayu (*Tapirus indicus*), siamang (*Hylobates syndactylus*), kucing emas (*Catopuma temminckii*), rusa sambar (*Cervus unicolor equinus*), buaya air asin (*Crocodylus porosus*), ikan sembilang (*Plotosus canius*), penyu air tawar raksasa (*Chitra indica*), lumba-lumba air tawar (*Orcaella brevirostris*), dan berbagai jenis burung. Spesies burung lain yang mendiami taman ini termasuk *dowitcher* asia (*Limnodromus semipalmatus*), melihat greenshank (*Pseudototanus guttifer*), putih timur Pelican (*Pelecanus onocrotalus*), bangau susu (*Mycteria cinerea*), bangau ajudan yang lebih rendah (*Leptoptilos javanicus*), dan putih-hitam bersayap tiga barang (*Chlidonias leucoptera*).

Sumatera Selatan No. 5/1994 tentang RTRW Provinsi, area itu adalah penggabungan dari kawasan Suaka Margasatwa (SM) Terusan Dalam (29.250 hektar), Hutan Suaka Alam (HSA) Sembilang seluas 113.173 hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Terusan Dalam seluas 45.500 hektar, dan kawasan perairan seluas 17.827 hektar.

Perubahan status terjadi pada tanggal 19 Maret 2003, setelah penilaian tahun 1996/1997 menyimpulkan HSA Sembilang memenuhi kriteria sebagai kawasan pelestarian dalam status Taman Nasional. Melalui SK Menteri Kehutanan No. 95/Kpts-II/2003, area seluas 202.896,31 hektar di pesisir timur Sumatera Selatan ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional dengan tiga wilayah Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN), yaitu SPTN Wilayah I Sungsang, SPTN Wilayah II Sembilang, dan SPTN Wilayah III Tanah Pilih. Pada tahun 2016, berdasarkan Permen LHK No. P.7/MenLHK/Setjen/OTL.1/2016 dilakukan penggabungan UPT TN Sembilang di Sumatera Selatan dengan UPT TN Berbak di Provinsi Jambi, menjadi UPT Taman Nasional Berbak dan Sembilang (TNBS).

Sesuai PP No. 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) Dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menetapkan wilayah yang berbatasan dengan wilayah KSA dan KPA sebagai daerah penyangga untuk menjaga keutuhan KSA dan KPA. Sejak ditetapkan pada tahun 2003 hingga saat ini, belum ada penetapan daerah penyangga untuk kawasan Taman Nasional Sembilang.

Lebih lanjut, kawasan TN Sembilang merupakan zona inti dalam kawasan Cagar Biosfer Berbak dan Sembilang yang ditetapkan pada 25 Juli 2018. Pengakuan ini diambil pada sidang ke-30 The Man and Biosphere International Coordinating Council (MAB-ICC) UNESCO di Palembang, Sumatera Selatan. Konsekuensi dari penetapan ini adalah kawasan ini akan menjadi perhatian dunia, sehingga pengembangan pemanfaatan kawasan ini untuk pendidikan dan pariwisata menjadi suatu kebutuhan.

Jika merujuk pada UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, kawasan Taman Nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang memunyai ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Hal ini mencerminkan di samping fungsi utama Taman Nasional sebagai Kawasan Pelestarian Alam (KPA), terdapat juga fungsi lain terkait dengan penghidupan masyarakat dan kegiatan ekonomi lainnya.

Merujuk pada perundangan di atas, secara ideal sekiranya pengelolaan Taman Nasional dapat mengakomodasi kepentingan konservasi dengan kepentingan pada dimensi lain, terutama penghidupan masyarakat dan kegiatan ekonominya. Namun demikian, berdasarkan temuan empiris, kawasan dan pengelolaan Taman Nasional senantiasa menghadapi permasalahan seperti pembalakan liar, perambahan wilayah, ancaman kebakaran hutan dan lahan, degradasi ekosistem, konflik antara manusia dan satwa, serta minimnya akses masyarakat atas pemanfaatan sumber daya dan lahan.

Dinamika yang terjadi di sekitar Taman Nasional berpengaruh pada konsepsi dan praktik pengelolaan, interaksi antara pengelola Taman Nasional dengan unsur kepentingan lain, termasuk masyarakat, hingga dengan pihak pemerintah serta lembaga swadaya yang berkepentingan, seperti dalam perihal program KELOLA Sendang. Jika merujuk pada narasi terkait TN Sembilang dalam rentang lima tahun terakhir, dapat terlihat pemberitaan dengan TN Sembilang sudah melampaui dari persoalan fungsi maupun tugas Taman Nasional.

Mengambil titik masa di tahun 2015 hingga di masa selanjutnya, pemberitaan terkait TN Sembilang dominanewartakan mengenai peristiwa kebakaran, penyusutan luas hutan, pembalakan liar, ekstraksi sumber daya hutan, sampai persoalan penguasaan area oleh “komunitas lokal”. Pemberitaan di atas menunjukkan bahwa TN Sembilang adalah arena kontestasi politis dengan beragam kepentingan. Persoalan konservasi serta fungsi sosial-ekonomi sebagaimana termuat dalam UU No. 5 Tahun 1990 rupanya tidak dapat mengakomodasi kontestasi yang ada. Oleh sebab itu, TN Sembilang perlu diposisikan sebagai kawasan yang berelasi dengan kepentingan di luar fungsi dan pemanfaatannya, bahkan perlu secara lugas dilihat sebagai arena yang dikontestasikan, terutama dalam konteks program KELOLA Sendang.

Dalam perjalanannya, pengelola dan para pihak di proyek KS mengembangkan model kolaboratif. Tujuannya untuk mengakomodasi karakteristik wilayah hilir sungai dan pesisir pada lanskap Sembilang–Dangku, sekaligus mengatasi kompleksitas persoalan yang terjadi di area itu. Berdasarkan pengalaman dalam proses pelaksanaan program, tidak dapat dipungkiri area tersebut menjadi arena bagi irisan serta tarik menarik antara tujuan konservasi TN Sembilang, kepentingan perusahaan pemegang konsesi di Kawasan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mendis, serta perkembangan kelompok dan organisasi sosial-ekonomi lokal.

Persoalan irisan dan tarik menarik kepentingan itu menyebabkan persoalan lapangan yang muncul di AM 3 KS terjadi secara multidimensi. Persoalan sosial, ekonomi, budaya, dan politik dapat tecermin pada

sejumlah peristiwa, antara lain: konflik pemanfaatan lahan, pembalakan liar dan perambahan kawasan, ancaman kebakaran hutan dan lahan gambut, degradasi ekosistem hutan dan lahan gambut, konflik antara manusia dan satwa, maupun potensi konflik antar-kelompok sosial atau dengan perusahaan, serta minimnya akses masyarakat atas pemanfaatan sumber daya alam.

Selain itu, sebagai representasi dari kawasan ekosistem pesisir dan *mangrove*, terdapat ancaman berupa degradasi dan konservasi lahan *mangrove* untuk kegiatan ekonomi, seperti tambak maupun area permukiman. Ancaman sampah plastik juga banyak di muara sungai, pesisir pantai, dan laut lepas, yang terbawa dari aktivitas rumah tangga dan pengelolaan sampah masyarakat yang tidak lestari, mulai dari kawasan hulu sungai dan kawasan permukiman yang dilewatinya.

Beragam persoalan serta isu di atas disadari oleh pengelola proyek KELOLA Sendang, bahwa pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dilakukan hanya terbatas pada teritorial kawasan tanpa mempertimbangkan perubahan lahan, kerusakan habitat, faktor sosial ekonomi, budaya, dan pembangunan secara umum di daerah penyangganya dan/atau pada skala lanskap yang lebih luas, sehingga pada akhirnya mendorong proyek KELOLA Sendang untuk menyusun Konsep Aksi Kemitraan di AM 3 KS.

Konsep Aksi Kemitraan sebagai refleksi kompleksnya persoalan yang multidimensi di lapangan dirumuskan agar dapat menciptakan ruang kolaboratif antarpihak dan multipihak. Ruang kolaboratif diharapkan dapat mendorong para pihak untuk dapat saling bersinergi dan bekerja sama sekaligus melakukan inisiatif dalam menghadapi persoalan di kawasan itu. Namun demikian, dalam implementasinya, dinamika serta tantangan yang terjadi menimbulkan pertanyaan tersendiri atas keberlangsungan Konsep Aksi Kemitraan di masa mendatang.

Wabah sampah yang terjadi dapat menjadi manifestasi atas kerumitan masalah di atas. Sampah sebagai produk dari olahan produksi dan konsumsi manusia, secara kasat mata menginvasi lingkungan serta kehidupan manusianya itu sendiri, namun dalam kesehariannya tidak dipandang sebagai permasalahan yang nyata. Oleh sebab itu, selayaknya bom waktu, wabah sampah di Sungsang dapat menjadi titik pijak untuk merefleksikan agenda keberlanjutan wilayah sekitar TN Sembilang.

## WABAH SAMPAH, WABAH BAGI KEBERLANJUTAN

Beberapa tahun terakhir, kita dapat menyaksikan banyak pemberitaan terkait banyaknya sampah di berbagai area konservasi di Indonesia. Salah satu yang menjadi sorotan dunia adalah wabah sampah di Taman Nasional Komodo. Dalam satu unggahan di media sosial @komodo\_national\_park, kelompok Masyarakat Peduli Sampah (MPS) Desa Papagarang bahkan sampai mengumpulkan 12 karung sampah di sepanjang pantai barat Papagarang.

Menanggapi hal di atas, Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, mengutarakan kegelisahannya, “Kasihannya wisatawan yang spesialis menyelam dan berselancar, bukannya pemandangan bawah laut indah yang mereka dapati tapi malah sampah dan dampak kerusakan ekosistem yang dijumpai,” kata Abed, seperti yang dikutip dari *Antara* (CNN, 2019). Persoalan ini bahkan menjadi sorotan dari UNESCO.

Seperti kasus di Taman Nasional Komodo, banyaknya kasus di area konservasi dan sekitarnya yang mulai mengisi laman media massa dapat dinyatakan sebagai konsekuensi dari diabaikannya sampah sebagai suatu permasalahan. Persoalan sampah yang mewabah di area TN Sembilang dan Muara Musi sekiranya luput dalam pandangan mata disebabkan keterbatasan sudut pandang dalam memahami dinamika yang terjadi selama ini.

Seperti dalam studi Keith Andrew Bettinger (2015), perubahan politik pasca-Suharto menghadapi tantangan baru bagi Taman Nasional. Perubahan politik tingkat nasional berimplikasi pada beragam tindakan akar rumput dalam rupa mengakses sumber daya di kawasan Taman Nasional, seperti menjamurnya banyak petani skala kecil yang dipandang ilegal membudidayakan komoditas pasar di kawasan konservasi.

Namun demikian, Bettinger menyimpulkan dari studi kasusnya di Taman Nasional Kerinci Seblat, reformasi politik yang mengagendakan demokratisasi dan desentralisasi menciptakan *new political space* di tingkat kabupaten dan provinsi. *New political space* tersebut mengubah kontestasi formal dan informal yang kemudian meningkatkan tekanan atas kebutuhan pada sumber daya alam dan pada akhirnya mengancam masa depan Taman Nasional.

Bettinger melihat terjadinya tiga pola konflik yang baru pada kontestasi politik tataran sub-nasional dan bersinggungan dengan area lindung konservasi. Pertama, kepentingan elite politik dalam menantang tujuan pemerintah nasional terkait persoalan konservasi. Kedua,

persoalan birokrasi dan perencanaan tidak efisien yang muncul karena ketergesa-gesaan dalam mengimplementasikan desentralisasi, sehingga menyebabkan ketidakselarasan koordinasi antara pemerintah dengan pengelola Taman Nasional. Terakhir, ketidakmampuan pemerintah pusat dalam memitigasi dampak-dampak yang muncul pada agenda desentralisasi.

Temuan dari Bettinger sekiranya serupa dengan persoalan yang terjadi di TN Sembilang maupun interaksinya dengan daerah sekitar. Persoalan perambahan sumber daya, pertikaian soal kewenangan, perselisihan sosial dan sumber daya akibat kebijakan yang timpang, dan strategi keberlanjutan di masa mendatang adalah sedikit contoh dari permasalahan yang mengemuka. Semua itu merupakan manifestasi kerumitan praktik politik yang ada, sehingga persoalan terkait masalah ekologi sering kali terabaikan atau tidak dipandang secara komprehensif.

Inilah yang terjadi dalam kasus wabah sampah di TN Sembilang dan sekitarnya. Sampah bagaikan material tidak bertuan. Material itu acap kali dilihat sebagai produk yang terbawa oleh arus laut, sungai, atau hasil perilaku sembarang masyarakat, namun tidak dilihat sebagai konsekuensi atas permasalahan yang masih terkandung dalam tata kelola lingkungan hidup.

Studi R. Mahersal dkk. (2019) di sepanjang Sungai Musi menemukan jika *macro debris* atau jenis sampah berukuran 2,4 cm–1 m dapat dengan mudah dijumpai mengambang di sepanjang permukaan air sebelum akhirnya mengendap di dasar atau terdampar di tepian sungai, muara, atau ikut mengarus ke lautan bebas. Secara umum, R. Mahersal dkk. menyimpulkan jika *macro debris* dapat berpengaruh buruk terhadap lingkungan, mengurangi nilai keindahan, mengganggu ekosistem ketika terakumulasi. Akumulasi sampah itu kelak mengganggu stabilitas area pesisir dan laut serta ketahanan dari organisme. Bahkan, *macro debris* yang terserak di area *mangrove* adalah suatu permasalahan, terutama ketika terkubur dan terpendam dalam sedimen *mangrove*.

Dalam studi R. Mahersal dkk., sampah *macro debris* terklasifikasikan ke dalam 10 jenis material yang sebagian memakan waktu ratusan tahun untuk terurai, seperti plastik, busa plastik, kain, keramik dan gelas, bahan metal, kertas dan karton, karet, kayu, dan material lainnya. Sampah-sampah itu mengarungi Sungai Musi yang sekitar 60-80% kelak akan lepas ke lautan bebas.

Sementara itu, dari hasil studinya juga, permukiman nelayan di area Sungsang memunyai angka tertinggi dalam *macro debris*, baik secara kuantitas dan material sampahnya. Temuan di area Sungsang menunjukkan bahwa area permukiman, pertanian, dan perikanan

merupakan salah satu sumber penyumbang sampah. Melihat pada kasus di perkotaan, terutama di Palembang sebagai ibukota provinsi, aktivitas pembuangan sampah ilegal diperkirakan sekitar 11% dari 2 juta penduduk kota. Mereka membuangnya di sungai dan anak sungainya. Masalahnya, Harnojoyo, Walikota Palembang, mengatakan meskipun regulasi terkait pembuangan sampah ilegal sudah tersedia, namun dalam pengimplementasiannya sulit untuk dilakukan, bahkan dirinya berseloroh penerapannya bakal membuat penjara penuh (*The Jakarta Post*, 2019).

Dengan melihat kasus di atas, kita dapat menyaksikan bagaimana persoalan sampah terkait dengan sungai adalah persoalan yang melintasi batas administrasi: dari hulu sampai hilir Sungai Musi, dari Palembang mungkin terdampar di Sungsang. Persoalan itu juga beririsan dengan berbagai dimensi, mulai dari dimensi lingkungan hingga sosial. Setiap entitas, mulai dari perusahaan, perkebunan, sampai rumah tangga turut menyumbang atas penyebaran sampah.

Hal ini kelak dapat menjadi persoalan dalam agenda keberlanjutan di AM 3 KS. Seperti diketahui, TN Sembilang sudah ditetapkan sebagai cagar biosfer dunia oleh UNESCO. Pengukuhan dilakukan pada sidang ke-30 International Coordinating Council of the Man and Biosphere Programme [ICC-MAB] di Palembang, Sumatera Selatan. Secara simbolis, pengukuhan ini dapat menjadi suatu kebanggaan, namun di sisi lain menjadi tambahan beban bagi agenda keberlanjutan, terutama dengan merujuk mewabahnya sampah.

Segala upaya dan program keberlanjutan akan menjadi tidak efektif jika persoalan sampah masih dibiarkan. Berdasarkan reportase *Mongabay* (2019a), Sustriman Dinah, jurnalis dan aktivis yang diwawancarai mengatakan, “Sampah adalah persoalan utama Sungai Musi. Hutan gundul dapat ditanam meski butuh waktu lama, tapi bagaimana membersihkan sampah yang mengendap di dasar sungai. Apalagi sampah itu masuk setiap hari.”

Jika merujuk pada data Pemerintah Palembang yang dikutip *Mongabay*, setiap hari sekitar 1.200 meter kubik sampah mengendap di aliran anak Sungai Musi. Jumlah itu belum terhitung sampah yang mengendap dan berserakan di area TN Sembilang dan sekitarnya. Dapat dibayangkan, betapa problematik serta riskannya persoalan sampah terhadap upaya dan program berkelanjutan, sehingga tidak mengherankan dalam reportase lainnya, *Mongabay* (2019b) memberikan wanti-wanti: jika masalah sampah belum teratasi, maka impian untuk menjadikan lanskap Sembilang sebagai kawasan ekowisata sulit terwujud.

## RUMITNYA MELAWAN WABAH SAMPAH

Setelah melihat ancaman wabah sampah atas agenda keberlanjutan, sekiranya upaya melawan wabah itu teramat rumit. Selain masih kurangnya data dasar atas massifnya wabah sampah secara komprehensif, dalam aktivitas keseharian, perang melawannya adalah suatu pertempuran yang pelik.

Pengenalan program ini tidak terlepas dari kondisi kehidupan sehari-hari di area Sungsang. Sebagai perkampungan nelayan, permukiman di Sungsang dapat dikatakan sangat padat, sehingga bisa terdapat 2-3 keluarga menempati satu hunian. Rumah masyarakat Sungsang umumnya terbuat dari kayu ulin dan nibung. Pondasi bangunannya selain juga dari kayu tetapi ada yang dari beton cor. Jalan utama lebarnya hanya sekitar 2,5 meter, memanjang sepanjang muara sungai.

Kepadatan penduduk dengan intensifnya perputaran ekonomi pesisir menciptakan situasi yang bagi sebagian orang dianggap sebagai perilaku konsumtif. Kondisi kasat mata atas rupa kampung yang padat serta kumuh di sisi lainnya memperlihatkan praktik yang bagi sebagian orang dapat dipandang konsumtif. Hal ini dapat dilihat pada kasus mewabahnya sampah di muara sungai di area Sungsang. Sebagai muara sungai, silih bergantinya arus sungai dan laut menyebabkan area itu menjadi lokasi terdamparnya sampah. Secara kasat mata, wabah sampah ini dapat terlihat di setiap sudut perkampungan, bahkan pekuburan warga sampai tertimbun oleh sampah.

Namun demikian, berdasar wawancara serta penuturan fasilitator lokal, pola perilaku masyarakat turut berpengaruh terhadap sampah itu. Dalam satu studi yang dilakukan oleh fasilitator, dapat dibayangkan bahwa setiap hari satu orang membuang sampah satu gelas plastik dan kalau dikalikan jumlah penduduk sebanyak 25.000 jiwa, maka tentu sudah menyumbang 25.000 sampah gelas plastik per harinya. Permasalahannya, apa yang kemudian dianggap oleh fasilitator menjadi suatu tantangan, adalah sampah belum dianggap menjadi persoalan bagi masyarakat desa. Sampah seakan menjadi bagian kehidupan, sehingga praktik memproduksi dan membuang sampah secara sembarang tidak dipersepsikan akan memengaruhi persoalan kehidupan lainnya.

Satu kasus serupa terjadi di Dusun Sei Sembilang. Berdasarkan reportase *Mongabay* (2019b), kasus sampah di dusun berpenduduk 1.430 jiwa rupanya belum ada yang memperhitungkannya. Reportase itu menggambarkan hampir setiap warga dipastikan membuang sampah plastik setiap harinya, mulai dari botol minuman air mineral, mi instan, kantong keresek, hingga bungkus kebutuhan rumah tangga seperti gula,

minyak sayur, dan lainnya. Diperkirakan dalam hitungan kasar dapat mencapai puluhan kilogram sampah.

Masalah proses pengolahannya juga menjadi masalah yang pelik. Warga dusun membakar sebagian sampah dan menimbun di beberapa tong sampah berukuran 60 liter di pinggir, sedangkan sisanya terhampar di kolong rumah warga. Selain itu juga tidak terdapat fasilitas penampung dan pengelolaan sampah. Sejak menaiki *speedboat*, tidak ada himbauan kepada pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya. Oleh sebab itu, sampah-sampah seperti botol air mineral, kemasan makanan ringan, atau kantung plastik di tepian sungai sekitar Sei Sembilang diperkirakan berasal dari sampah yang dibuang di laut, terutama dalam perjalanan menuju Sembilang sekitar 5-8 jam dari Palembang.

Berdasarkan dua kasus di permukiman area Muara Sungsang dan di Dusun Sei Sembilang yang berada di kawasan konservasi, kita dapat melihat kepelikan itu tidak sebatas pada faktor produksi sampah oleh manusia, namun tiadanya sistem pengolahan maupun manajemen keterlibatan multipihak yang dapat memitigasi dan mengarahkan adaptasi perilaku manusianya dalam mengolah sampah.

### **SAMPAH ADALAH PERSOALAN STRUKTURAL**

Lantas, bagaimana mengatasi masalah sampah? Persepsi sampah sebagai keluaran atau sisa produksi aktivitas, baik konsumsi rumah tangga hingga industri, menyebabkan sampah tidak dianggap sebagai persoalan bersama. Sampah selalu dianggap sebagai persoalan parsial dan sektoral, seperti jika sampah diproduksi oleh rumah tangga, maka dianggap tanggung jawab rumah tangga, begitu pula di sektor industri.

Persoalan semakin pelik, ketika dalam penanganannya, sampah dilihat sebagai urusan pemerintah daerah semata. Seperti dibahas dalam bab sebelumnya, pemerintah daerah yang menyatakan sudah menyiapkan regulasi dan mekanisme sampah merasa tidak berdaya menghadapi sampah yang terus menumpuk setiap harinya.

Lebih lanjut, dalam tataran elite dan pemangku kepentingan, sampah tidak dilihat sebagai permasalahan. Sebagaimana pengalaman ZSL di KS, pada mulanya, isu-isu atau permasalahan yang dikemukakan oleh para pemangku kepentingan tidak menysar pada persoalan keseharian seperti sampah. Hal ini menunjukkan jika secara teknis dalam kesehariannya, para pihak luput untuk menyadari jika sampah adalah suatu persoalan juga, sehingga lebih memfokuskan pada isu-isu atau tema yang menyinggung atau mengandung persoalan kepentingan yang eksplisit.

Oleh sebab itu, berdasarkan persoalan di atas, maka kita menyadari jika sampah pada hakikatnya adalah permasalahan struktural. Sampah yang setiap harinya jamak dijumpai mengalir di permukaan sungai, pesisir, dan perkampungan nelayan dianggap sebagai benda tak bertuan oleh banyak pihak. Sampah dipandang bukan suatu masalah atau setidaknya menjadi perihal yang mengganggu pandangan mata. Inilah konsekuensi yang muncul secara struktural. Ketika sampah adalah benda yang setiap saatnya diproduksi dari setiap lini kehidupan dan industri, namun pemerintah merasa tidak berdaya, maka tidak mengherankan jika tiada model penanganan dan pengelolaan yang terbangun secara struktural.

### **MEMBANGUN INISIATIF AKAR RUMPUT: STRATEGI PARA MITRA DALAM MENGHADAPI SAMPAH**

Masalah kesenjangan konseptual lanskap dengan implementasinya sekiranya dapat teratasi dengan mulai diubahnya pendekatan dalam pengerjaan proyek KS. Perancangan area model dengan forum kolaboratif multipihak mulai melakukan identifikasi masalah serta potensi yang kontekstual dengan area itu. Proses kolaboratif pada akhirnya merumuskan tema kemitraan “Penguatan Fungsi Penyangga Kawasan Taman Nasional Sembilang”. Pengangkatan tema kemitraan itu terkait dengan PP No. 28 Tahun 2011. Meskipun kawasan di AM 3 KS sudah mengalami berbagai kasus ekologi maupun permasalahan sosial, ironinya, sejak ditetapkannya kawasan TN Sembilang, daerah penyangga untuk TN Sembilang masih belum ditetapkan.

Tema kemitraan itu diturunkan ke dalam sejumlah prioritas program dan rencana aksi yang sekiranya akan membangun skema model edu-ekowisata. Skema model ini diharapkan dapat menjadi alternatif dalam membangun simpul kolaborasi di antara agenda konservasi, ekonomi, dan perpolitikan lokal yang masih memerlukan proses dalam membangun inisiatif dukungan.

Dengan fokus pada upaya penguatan fungsi penyangga pada implementasi di lapangan, dengan sejumlah pengembangan potensi kemitraan, yaitu penetapan dan perencanaan daerah penyangga TN Sembilang, usulan aksi kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan peran para pihak di sekitar kawasan dalam pelestarian keanekaragaman hayati di dalam kawasan TN Sembilang. Hal ini merupakan amanah dari PP No. 28/2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam, khususnya pasal 44 yang berbunyi bahwa: Pemerintah dan pemerintah daerah harus menetapkan wilayah yang berbatasan dengan wilayah KSA dan KPA sebagai daerah penyangga untuk menjaga keutuhan KSA dan KPA.

Daerah penyangga ini dapat berupa kawasan hutan, tanah negara, maupun tanah yang dibebani hak. Penyusunan rencana pengelolaan daerah penyangga ini merupakan peluang untuk mendorong partisipasi banyak pihak, terutama KPHP Lalan Mendis dan perusahaan pemegang konsesi di dalamnya yang berbatasan langsung dengan TN Sembilang, dalam pelestarian kawasan konservasi yang diintegrasikan dengan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

Pengelolaan zona khusus Dusun Sembilang. Dusun Sembilang adalah salah satu permukiman di dalam kawasan TN Sembilang. Dusun Sembilang merupakan sebuah dusun yang secara administratif menjadi bagian dari Desa Sungsang 4, Kecamatan Banyuasin II. Letak Dusun Sembilang terpisah jauh wilayahnya dari wilayah Desa Sungsang 4, dengan luas wilayah sekitar 35 hektar. Jumlah penduduk Dusun Sembilang menurut pendataan pada tahun 2017 adalah 1.340 jiwa dengan 372 KK. Mata pencaharian sebagian penduduk di dusun ini terkait dengan perikanan tangkap. Dusun Sembilang telah ditetapkan sebagai Zona Khusus dalam kawasan TN Sembilang. Zona Khusus adalah bagian dari Taman Nasional yang, karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan, telah tinggal kelompok masyarakat dan terdapat sarana penunjang kehidupan, sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai Taman Nasional.

Kemudian, pemanfaatan HHBK, pesisir, dan laut berkelanjutan. Saat ini sumber daya pesisir dan laut di kawasan TN Sembilang telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun pemanfaatan tersebut belum memiliki legalitas, sehingga menjadi hambatan dalam mengakses program-program pemerintah. Kondisi ini membuat masyarakat tidak mendapatkan peningkatan pengetahuan mengenai teknik penangkapan dan pengolahan hasil laut yang berkelanjutan, dan nilai tambah yang diperoleh masyarakat dari hasil laut tetaplah minim. Diperlukan aksi kemitraan para pihak, baik dari Balai TN Berbak dan Sembilang (TNBS), pemerintah daerah, maupun swasta dan masyarakat untuk mendukung usaha TN Sembilang dalam mewujudkan kelestarian ekosistem pesisir dan laut sekaligus memberdayakan masyarakat setempat.

Dan lainnya adalah pengembangan Eco-Education Center. Salah satu potensi pendidikan dan wisata di kawasan TN Sembilang adalah Resort Solok Buntu. Resort ini sebelumnya merupakan area tambak masyarakat. Pada tahun 2010–2015, JICA menginisiasi sebuah proyek yang melakukan uji coba penanaman *mangrove* pada areal bekas tambak seluas 200 hektar. Proyek ini juga membangun infrastruktur arboretum seluas 2,72 hektar yang menampung 28 jenis *mangrove*. Arboretum tersebut juga dilengkapi *mangrove trail* untuk kepentingan wisata. Namun sayangnya, fasilitas tersebut terbengkalai pasca-selesainya proyek. Pihak TN Sembilang tidak memiliki cukup

sumber daya untuk mengelola fasilitas tersebut. Aksi kemitraan dalam pengembangan Edu-Ecotourism Center di Resort Solok Buntu bertujuan untuk melestarikan ekosistem *mangrove*, mengembangkan fungsi pendidikan dan pariwisata Taman Nasional, dan membuka peluang mata pencaharian bagi masyarakat setempat.

Menyimak potensi aksi di atas, kita dapat melihat di AM 3 KS, pendekatannya memunyai karakteristik yang khas: permasalahan konservasi tidak dapat terlepas dari permasalahan dimensi sosial-budaya. Skema edu-ekowisata akan menjadi salah satu mekanisme penguatan fungsi kawasan penyangga, terutama pada zona konservasi TN Sembilang.

Namun, jika melihat problematikanya sampah, tindakan yang terfokus dalam membangun inisiatif akar rumput dapat dikatakan sebagai investasi kultural bagi agenda keberlanjutan di AM 3 KS. Kita sudah melihat, betapa sampah dapat menjadi ancaman atas program edu-ekowisata, seperti ketidaknyamanan sejumlah turis asing ketika mengunjungi permukiman di Muara Musi, belum lagi ancaman pada ekologi pesisir area tersebut.

Permasalahannya, produksi sampah yang begitu dekat dengan kebiasaan dan perilaku sehari-hari, baik oleh perusahaan maupun masyarakat, dalam konteks tata kelola lokal belum terbangun sistem yang memadai, seperti regulasi sudah diterbitkan, namun sulit menerapkannya, atau sebatas pada keterpaduan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Hal inilah yang kemudian mendorong para pengelola dan pihak di proyek KS untuk melakukan intervensi persoalan sampah yang menasar pada inisiatif akar rumput. Bentuk intervensinya adalah dengan mengembangkan program bank sampah berbasis ekonomi, yang harapannya ingin mengubah perilaku masyarakat untuk memilah dan menyalurkan sampah yang bernilai ekonomi, sehingga dari proses itu masyarakat pun mendapatkan pendapatan. Proses itu diharapkan dapat mengubah pola pikir, perilaku, dan akhirnya kesadaran atas keberlanjutan.

Sekiranya, sampah sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya adalah permasalahan yang muncul dalam hidup sehari-hari, namun ada kesenjangan dalam pengelolaannya. Meskipun dalam hidup sehari-hari, seseorang atau perusahaan memproduksinya, sampah dianggap bukan bagian dari permasalahan yang nyata bagi kehidupan. Inilah yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan program bank sampah.

Fasilitator pelaksana di lapangan mengisahkan, persoalan intervensi akar rumput atas pengelolaan sampah dimulai oleh tantangan kebiasaan

lama. Di masa lalu, masyarakat yang mengumpulkan sampah diberi upah sebesar 50.000 rupiah, sebagai pengganti hari kerja. Akibatnya, mereka baru mau mengumpulkan kalau ada upahnya. Dengan memperlakukannya sebagai kerja upahan, maka inisiatif tidak dapat berjalan, sementara sampah setiap harinya terus diproduksi.

Dengan pengenalan program pilot bank sampah, pengelola proyek KS sekiranya menawarkan adanya alternatif sistem pengelolaan yang lebih berbasis komunal. Sistem ini akan mengedukasi bahwa sampah adalah problem bersama di tingkatan akar rumput, sehingga produksi sampah dapat diminimalkan. Selanjutnya, dengan munculnya kesadaran bahwa sampah merupakan suatu problem bersama, maka diharapkan dapat memantik keterlibatan pihak selain masyarakat, terutama pemerintahan desa dan kecamatan. Bagaimanapun juga persoalan peningkatan kapabilitas dan infrastruktur memerlukan dukungan berbagai pihak. Terakhir, dengan dikelola secara komunal, pada dasarnya sampah yang diproses memunyai nilai ekonomis tersendiri.

Dalam pelaksanaan program pilot ini, kesadaran atas sampah sebagai suatu permasalahan mulai disadari oleh tataran akar rumput. Kunjungan turis asing dan agenda edu-ekowisata mulai menjadi wacana di keseharian bahwa area permukiman di Muara Sungsang dan sekitarnya memunyai daya tarik dan potensi ekonomis, selain dari pemasukan mata pencaharian konvensional.

Lebih lanjut, program ini mulai mendapat sambutan dari pihak pemerintah lokal. Pemerintah-pemerintah desa di area tersebut mulai berkomitmen dan mengharapkan agar sistem bank sampah dapat diimplementasikan di desanya dan oleh penduduknya. Sambutan lain datang dari pihak kecamatan, yang bahkan menyediakan kantornya serta stafnya untuk terlibat dalam pengelolaan bank sampah.

Pilot bank sampah tersebut tentunya tidak berdiri sendiri. Dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas budaya serta pengetahuan, di Area Model 3 dikembangkan pula skema pengembangan budaya dan penguatan literasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan yang cukup dan pengalaman untuk menyelesaikan ragam persoalan yang dihadapinya. Sekiranya, seiring berjalannya waktu, diharapkan proses inisiatif, peningkatan pengetahuan, dan perubahan budaya kelak akan mendukung agenda keberlanjutan pada zona penyangga kawasan TN Sembilang.

## **MENCARI PENYELESAIAN JANGKA PANJANG**

Secara ringkas, dapat disimpulkan, meskipun program intervensi akar rumput masih berada dalam lingkup yang terbatas, namun sekiranya meluaskan pemahaman kita bahwa persoalan yang muncul dan dapat mengancam segala program yang sudah dirancang adalah masalah yang begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yang ironisnya, sering kali tidak dilihat sebagai permasalahan, bahkan masih kurang dalam penanganannya.

Kasus wabah sampah di Area Model 3 memperlihatkan jika masalah yang ditangani bukan semata dari kaca mata konservasi. Masalah ini merepresentasikan kompleksitas yang terjadi, baik dalam skala tatanan politik maupun waktu. Sampah mungkin tidak dianggap sebagai sesuatu yang politis, namun mengabaikan dalam mengelolanya akan menimbulkan konsekuensi politik: tidak tercapainya agenda keberlanjutan konservasi, begitu pula terkait keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.

Kekurangan dalam ranah regulasi, koordinasi, dan penanganannya menyebabkan perang melawan wabah sampah sebagai pertarungan yang sulit untuk dimenangkan. Jika menilikinya dari sudut pandang relasi kuasa, sampah dapat dipandang sebagai persoalan elitis. Sampah tidak menjadi masalah bersama. Bukan masalah tanggung jawab atau siapa pelakunya, namun pemahaman atas konsekuensinya yang dapat berdampak di pelbagai dimensi pun belum terbayangkan secara bersama. Inilah yang membuat urusan sampah seakan hanya diurus oleh suatu pihak semata.

Peliknya, pihak yang berwenang mengurusinya seakan-akan sudah mengangkat tangan akibat tidak melihat adanya jalan untuk penyelesaiannya. Namun, yang kelak akan terlupakan adalah: siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Relasi kuasa dan ketimpangannya memberikan ruang bagi siapa yang mengambil untung dan siapa menanggung rugi. Rendahnya pemahaman atas masalah sampah mengakibatkan persoalan siapa untung-rugi menjadi samar.

Padahal jika melihat pada pandangan mata atas mengambanginya dan menumpuknya sampah di permukaan kali, permukiman, hingga di tubir-tubir pantai sepanjang Taman Nasional Sembilang, pihak yang diuntungkan tidak lain adalah para produsen sampah itu sendiri. Siapakah yang dirugikan? Jika melihat pada massifnya penyebaran sampah, maka sudah dipastikan kerugian tidak menimpa para pihak semata, tetapi juga pada sumber daya dan potensinya. Dan sialnya, jika kembali pada soal kewenangan selaku cerminan atas kuasa,

maka peliknya situasi itu tidak semestinya membebaskan pihak yang berwenang untuk lepas tangan.

Situasi inilah yang mendesak kita untuk mengartikulasikan kembali soal sampah menjadi persoalan politis yang khas. Kekhasannya adalah menyadari bahwa sampah adalah wabah yang memberikan konsekuensi secara massif dan luas, sehingga tidak lagi berkutat persoalan politis yang terkungkung oleh batas-batas kewenangan ataupun prioritas yang dirumuskan secara elitis.

Salah satu contoh dapat dilihat dalam upaya mengatasi wabah sampah dan limbah di Sungai Citarum. Kita dapat menyaksikan beragam pihak turut berpartisipasi dengan lingkup dan cara kerja yang tidak mempermasalahkan batas-batas wewenang atau kepentingan. Kita dapat menyaksikan bagaimana pemerintah daerah, pemerintah pusat, komunitas dan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, bahkan hingga pihak keamanan berpartisipasi untuk menghadapi persoalan itu.

Meskipun kita memunyai banyak pendapat dan penilaian, adakah cara semacam itu dapat sudah efektif mengatasi persoalan sampah atau limbah di Sungai Citarum, namun apa yang menjadi penting untuk diperhatikan adalah pesan politis yang tersampaikan. Sudah saatnya, sampah diposisikan sebagai masalah politis, namun upaya penyelesaiannya pun perlu dirumuskan dalam cara dan strategi yang tidak terkungkung oleh jebakan kepentingan itu sendiri.

Oleh sebab itu, jika soal sampah tidak teratasi atau kita tidak melakukan upaya untuk mengatasinya secara tidak elitis, TN Sembilang dan sekitarnya bukan saja tidak lagi dikunjungi oleh burung-burung dari Siberia, namun terkenal akan sampah yang menumpuk di tepian pantai maupun muara.





# BAB VI

---

EKOLOGI POLITIK  
DI LANSKAP PROYEK  
KELOLA SENDANG

Pelaksanaan proyek KELOLA Sendang merupakan praktik di mana para aktor, lembaga, dan tingkat tata pemerintahan berkomunikasi, mengadakan aksi-reaksi, dan mencapai konsensus atau ketidaksepakatan atas persepsi dan gagasan dari para aktor. Interaksi ini menentukan, memberi makna, mengisi, dan membentuk persepsi dari konsep penataan lanskap yang berkelanjutan untuk pelestarian keanekaragaman hayati. Tantangan terbesar dari penataan lanskap di proyek KELOLA Sendang ialah bahwa lanskap keanekaragaman hayati berada pada tempat yang sama dengan lahan yang sudah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Termasuk di dalamnya ialah lokasi penambangan, perkebunan kelapa sawit, dan konsesi kehutanan untuk industri. Situasi ini menjadi menarik karena pendekatan konservasi memerlukan fleksibilitas tanpa harus mengurangi makna dari upaya-upaya melakukan konservasi keanekaragaman hayati itu sendiri.

Dalam upaya memahami ekologi politik dalam proyek KELOLA Sendang, ada beberapa hal yang bisa dibahas dalam bagian ini. Berdasarkan pembahasan pada bagian-bagian terdahulu dan ketiga studi kasus area model, ada tujuh aspek ekologi politik yang bisa diangkat. Ketujuh aspek tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut.

Pertama, bahwa komitmen Pertumbuhan Perekonomian Hijau yang dicanangkan di tingkat provinsi terjadi dengan kondisi di mana industri

ekstraktif di Sumatera Selatan sudah cukup berkembang. Tentu saja tidak mudah untuk melakukan *turn around* dari platform perekonomian yang ada. Belum lagi, platform perekonomian tersebut terbentuk juga dari situasi politik yang terus berkembang, terutama setelah reformasi.

Agenda Pertumbuhan Hijau memang tidak memberikan perubahan signifikan terhadap jalan pembangunan di Sumatera Selatan. Perekonomian Sumatera Selatan bukan hanya berdiri sendiri, di mana intervensi di tingkat provinsi saja cukup untuk menghasilkan transformasi arah pembangunan. Perekonomian Sumatera Selatan terkait juga dengan berbagai fenomena perekonomian global dan nasional. Sektor-sektor yang dianggap mengancam lingkungan seperti pertambangan batubara, ekspansi perkebunan sawit, konversi lahan gambut, dan ekstraksi yang massif untuk sektor kehutanan, semuanya itu tidak berkembang dengan sendirinya sebagai usaha di tingkat lokal. Berbagai pelaku usaha di Sumatera Selatan—dimulai dari pengusaha besar, pengusaha yang berkaitan dengan para tokoh politik, maupun petani kecil—mengembangkan usahanya dalam menanggapi peningkatan permintaan, baik dari pasar internasional maupun nasional.

Memang, pasar bukan satu-satunya pendorong. Merebaknya industri ekstraktif tidak bisa dipisahkan dari kegamangan pengelolaan ekonomi negara untuk keluar dari deraan krisis ekonomi tahun 1997, yang sebetulnya dalam satu dan lain hal sudah didorong oleh pelambatan pertumbuhan ekonomi setelah *booming* pasar modal dan sektor keuangan sejak pertengahan tahun 1990-an. Pelambatan pertumbuhan sektor riil ini pun tidak berdiri sendiri, terkait dengan fenomena pelambatan industri global yang kemudian menyebabkan modal diinvestasikan dan dispekulasikan pada sektor keuangan. Selain itu, melemahnya peran negara dalam mengarahkan pembangunan sejak liberalisasi keuangan pada tahun 1990-an mendorong konversi kawasan hutan secara besar. Ketika kayu sudah mulai habis diekstraksi baik secara legal maupun ilegal, permintaan akan minyak sawit meningkat pada pertengahan dekade 2000-an. Bersamaan dengan itu, konversi hutan meningkat dengan maraknya akses terhadap lahan kehutanan melalui proses politik.

Pasar dan fenomena ekonomi politik di sekitarnya seolah menjadikan proses berkembangnya sektor ekstraktif tidak bisa dikendalikan lagi. Kejadian karhutla yang merebak pada tahun 2015 juga secara sekilas tidak akan berdampak fundamental terhadap transformasi dari pembangunan ekstraktif menuju pembangunan berkelanjutan. Proses-proses kebijakan yang melahirkan agenda Pertumbuhan Ekonomi Hijau disambut dengan syak wasangka bahwa akhirnya pola pembangunan ekstraktif yang akan lebih berlaku.

Di tengah berbagai pesimisme ini, dapat dikatakan transformasi menuju Perekonomian Hijau bukannya omong kosong belaka. Simulasi yang dilakukan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa, walaupun kegiatan ekstraksi barang tambang selama tahun 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan, namun di sisi lain PDRB Semi-Hijau juga memperlihatkan kecenderungan adanya kenaikan. Bila dikaitkan dengan kondisi lokal dan tantangan di level makro yang terjadi, perubahan ini memang menunjukkan transformasi menuju Perekonomian Hijau sudah mulai terjadi, walaupun masih dalam skala yang terbatas.

Proyek konservasi berbasis lanskap berkelanjutan, yang tidak hanya terpaku pada kegiatan konservasi spesies, memiliki tantangannya tersendiri untuk mendorong Perekonomian Hijau dalam segala keterbatasannya ini. Proses transformasi memang akan memakan waktu, tapi bagaimanapun kecenderungan meningkatnya PDRB Semi-Hijau merupakan indikasi bahwa proses yang dimulai tidak sia-sia. Justru yang menjadi tantangan ialah bagaimana menjaga momentum perubahan ini tetap terjadi setelah berakhirnya proyek. Sumber daya dan dukungan terhadap proses politik mungkin saja berkurang secara signifikan. Tapi bagaimana kemudian hasil-hasil ini bisa meyakinkan para pemangku kepentingan untuk mau berkontribusi mendorong peningkatan capaian yang sudah dimulai ini.

Kedua, ketika konsep pembangunan lanskap berkelanjutan yang didorong oleh proyek KELOLA Sendang ditinjau kembali, paling tidak ada dua catatan penting dari analisis sosial terhadap konsep tersebut. Catatan pertama ialah optimisme berlebihan mengenai masyarakat yang dapat berinteraksi secara timbal balik. Banyak konsep secara normatif mengandaikan interaksi timbal balik ini dan melupakan bahwa manusia berada dalam relasi sosial tertentu. Dalam tingkat masyarakat luas, relasi sosial ini membentuk strata masyarakat, di mana ada yang ditinggikan dan ada yang dipandang lebih rendah. Sementara di dalam suatu kelompok, jarang sekali ditemukan adanya kelompok di mana semua anggotanya memunyai kedudukan yang sama. Dalam satu dan lain hal pasti ada yang memunyai kuasa yang lebih karena berbagai alasan, misalnya faktor usia, kemampuan ekonomi, atau latar belakang keluarga. Dalam relasi sosial yang timpang, komunikasi yang diharapkan timbul mengalami banyak halangan. Komunikasi yang terjadi dibungkus dengan retorika, cara penyampaian dengan risiko seminimum mungkin tapi mencapai manfaat sebanyak mungkin, dan *vernakularisasi* (pemilihan istilah) sehingga memungkinkan komunikasi terjadi dalam keterbatasan antarstrata tersebut. Akhirnya, komunikasi dalam relasi sosial yang timpang itu sering kali belum tuntas dan pihak-pihak yang berkomunikasi kemudian membawa pulang kekecewaan dan ganjalan masing-masing, sementara masalah mendasar yang mau

dikomunikasikan tidak sepenuhnya terelaborasi.

Catatan kedua ialah kurang terbukanya pembahasan mengenai realitas secara kritis. Dengan berbagai alasan, realitas ekonomi politik dari suatu konstruksi sosial sering kali tidak dimunculkan. Absennya pemahaman kritis atas realitas tersebut memunyai dampak, baik dalam ranah politik maupun ranah ekonomi. Dalam ranah politik, salah satu contohnya ialah optimisme berlebihan mengenai kemampuan negara dan aktor-aktor pengambil keputusan terhadap kapasitasnya dalam menjaga program konservasi. Fakta bahwa suatu kelompok dengan kelompok lain tidak bisa membangun komunikasi karena memunyai kepentingan dan strategi politik yang berbeda. Demikian juga politik keseharian (*everyday politics*) minim hadir dalam panggung diskusi formal karena realitas yang disepakati untuk dibahas merupakan realitas yang terbatas. Komunikasi yang timbul, biarpun terbatas, sering kali dianggap sudah tuntas, sementara jurang pemisah lebar antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi akhirnya menjadi terabaikan.

Dalam ranah ekonomi, pergulatan masyarakat sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sering kali dipandang dalam simplifikasi. Utopia konservasi sering mendorong para aktor untuk menganggap apa yang baik bagi lingkungan merupakan pemecahan masalah sosial ekonomi. Padahal, tawaran dari program konservasi tidak sepenuhnya layak secara perhitungan ekonomi bagi masyarakat dalam kesehariannya. Akibatnya, tawaran penyelesaian secara ekonomi yang berasal dari konsep konservasi tidak meyakinkan dan tidak menarik bagi masyarakat yang bergulat dalam memenuhi berbagai tuntutan hidupnya. Sebagai contoh ialah ketika usaha ekowisata ataupun usaha kecil berbasis pemanfaatan keanekaragaman hayati dianggap sebagai terobosan segar dari suatu program konservasi. Padahal, secara riil, kegiatan-kegiatan tersebut belum mampu memberikan daya tarik bagi masyarakat untuk beralih dari mata pencaharian yang merusak lingkungan. Keberlanjutan dari kegiatan-kegiatan tersebut juga dalam ancaman untuk berhenti ketika proyek selesai, karena subsidi yang diberikan tidak bisa berlanjut dan kegiatan-kegiatan usaha tersebut harus beroperasi dalam ranah ekonomi secara riil.

Ketiga, pembangunan lanskap berkelanjutan tidak bisa lepas dari pemahaman akan agenda dan strategi politik dari kekuatan-kekuatan politik yang ada. Hal yang menjadi khas ialah bahwa gagasan akan transformasi menuju Perekonomian Hijau tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan politik yang menampilkan figur politik tertentu. Proyek KELOLA Sendang sendiri muncul menanggapi ruang yang tersedia bersamaan dengan adanya langkah-langkah dari Provinsi Sumatera Selatan untuk memperbaiki citra pembangunan yang merusak

lingkungan di sana. Ruang juga tercipta untuk membuka hubungan kelembagaan dan aktor yang selama ini terbatas karena berbagai alasan. Sebagai contoh ialah adanya pintu yang terbuka yang memungkinkan komunikasi intensif antara aktor-aktor pengambil keputusan publik dari tingkat nasional dan daerah, yang sejak pelaksanaan otonomi daerah mengalami kecanggungan. Kesempatan yang muncul ini dimanfaatkan tidak hanya oleh berbagai lembaga pembangunan yang membawa program dan sumber daya keuangan pembangunan, tapi juga oleh konsep-konsep dari luar yang dicangkokkan ke kebijakan dan administrasi publik di Indonesia. Kesempatan juga muncul dengan tersedianya peluang untuk menggapai *exposure* dari suatu lembaga atau aktor. Ruang dan kesempatan ini terbentuk dalam warna yang berasal dari konteks dan relasi yang terjadi di tingkat lokal.

Konsep pembangunan lanskap berkelanjutan berada dalam dinamika politik yang memberikan kemungkinan bahwa pemaknaan dari kelompok politik satu dengan kelompok politik lain berbeda. Pemaknaan ini tergantung dari agenda dan strategi politik dari kelompok-kelompok yang berinteraksi dalam panggung politik daerah di Sumatera Selatan. Bilamana kita mengacu pada masa kepemimpinan Gubernur Alex Noerdin, setelah kebakaran hutan dan lahan parah yang terjadi pada tahun 2015, Pertumbuhan Ekonomi Hijau didorong menjadi agenda yang diadopsi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Bersamaan dengan dijalankannya agenda Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Sumatera Selatan, langkah-langkah Gubernur Alex Noerdin pun memperoleh sambutan yang baik di tingkat internasional. Pengakuan di tingkat internasional ini menjadi jalan untuk berinteraksi dalam jejaring internasional, di mana tidak banyak gubernur di Indonesia yang bisa melakukannya. Isu lingkungan membuka jalan menuju panggung baru di jejaring internasional. Hubungan langsung berbuah dukungan pun berdatangan dari negara-negara donor di bidang lingkungan hidup seperti Norwegia, Inggris, dan Jerman. Selain itu, peluang-peluang bisnis baru bagi Provinsi Sumatera Selatan pun tercipta, seperti dalam bidang energi terbarukan, misalnya pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (Jepang) dan mobil dengan bahan bakar hidrogen (Inggris). Pada gilirannya, pengakuan internasional ini pun membangkitkan kepercayaan dari Pemerintah Pusat kepada Sumatera Selatan untuk menjalankan beberapa acara penting seperti di kancah olahraga, sampai saat ini. Bisa dikatakan bahwa ide pembangunan berkelanjutan diambil menjadi platform untuk membangun jejaring dan menangkap peluang baru untuk perkembangan pembangunan daerah.

Pergantian pimpinan provinsi yang terjadi tahun 2018 juga memberikan perubahan pesan kunci pembangunan yang dibawakannya. Gubernur baru Herman Deru mengangkat visi “Sumsel Maju untuk Semua”, dengan basis pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

atau pembangunan berkelanjutan. Visi baru ini dalam beberapa aspek memang tidak memberikan penekanan pada agenda Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Namun, tidak demikian halnya dengan Kabupaten Musi Banyuasin. Pada gilirannya, komitmen Kabupaten Musi Banyuasin membawa hasilnya. Kabupaten Musi Banyuasin kembali diganjar penghargaan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan kategori Pembangunan Daerah Terbaik Tahun 2019 dan Kabupaten Terbaik III dalam Perencanaan dan Pencapaian Pembangunan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga komitmen Pembangunan Hijau tidak sia-sia.

Keempat, berdasarkan refleksi dari studi kasus di Area Model 1, pendekatan lanskap kadangkala abai terhadap kultur pemerintahan Indonesia. Ada kesenjangan persepsi, ego sektoral, maupun tarik menarik kuasa antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditambah lagi dengan kompleksitas peraturan yang saling terkait antar-kementerian dan kewenangan yang kurang jelas pada pemerintah daerah dan pusat. Pola implementasi yang terorganisir secara mandiri memberikan peluang kemunculan praktik kebijakan yang, tidak tertutup kemungkinan, menabrak peraturan hukum yang ada, di mana interpretasi kebijakan dibangun oleh relasi lokal yang ada. Kurangnya badan pengawas lintas sektoral untuk mengatur apropriasi di tingkat operasional juga menjadi kelemahan. Kepemilikan lahan sering kali tumpang tindih dan peraturan dari satu kementerian sering kali bertentangan dengan kementerian lain. Dengan tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang sah, para aktor mencari mediasi dari kalangan di luar ranah eksekutif, seperti tokoh masyarakat, tokoh partai politik, dan anggota dewan.

Berbagai inisiatif telah dikemukakan dalam bentuk target. Ini termasuk hutan sosial 12,7 juta hektar (Finlayson, 2017) yang akan dikelola oleh masyarakat lokal dan asli, program reformasi tanah TORA (bertujuan untuk mendistribusikan kembali 9 juta hektar, di mana 4,5 juta hektar berasal dari hutan negara pada 2019), dan program reformasi agraria IP4T. LSM dan kegiatan masyarakat mempromosikan berbagai program seperti kehutanan sosial (dengan model mulai dari Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Rakyat (SDM), Hutan Adat (HA) dan Perkebunan Rakyat (HTR), usaha masyarakat dan komunal solusi seperti Hak Komunal). Selain itu, sektor swasta, LSM, dan pemerintah menghasilkan sejumlah besar upaya pendaftaran dan pengaturan petani di sektor minyak kelapa sawit.

Sementara itu pada tingkat tapak, khususnya di Desa Lubuk Bintialo, adanya pengawalan program Perhutanan Sosial yang difasilitasi oleh ZSL secara langsung mengubah pandangan para perambah yang berada di wilayah tersebut. Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) memberi peluang kepada wanatani (*agroforestry*). Wanatani

memungkinkan berkembangnya pola pengusahaan lahan yang memperhatikan fungsi ekologi sekaligus ekonomi seperti karet, jengkol, nangka, petai, dan sebagainya, yang selaras dengan cita-cita masyarakat setempat untuk menjadi wilayah sentra produksi buah-buahan. Penetapan Perhutanan Sosial di Hutan Lindung Sungai Merah (yang merupakan penyangga kawasan konservasi SM Dangku) membuka peluang perekonomian berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Pemanfaatan HHBK pada gilirannya dapat mempercepat kegiatan restorasi dan pencegahan pembalakan liar.

Kelima, berdasarkan refleksi terhadap studi kasus di Area Model 2, dukungan dari tata pemerintahan yang berakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memainkan peranan penting. Seperti kasus di Muara Medak, dukungan dari kepala desa dan beberapa elemen kunci masyarakat, baik dari kalangan tua dan muda dan etnisitas menjadi kunci penerimaan warga atas proyek Perhutsos. Penerimaan warga ini dapat menjadi basis legitimasi politik dari Perhutsos (KS). Namun demikian, legitimasi warga sangat dinamis dan tantangannya adalah bagaimana legitimasi tersebut menjadi dapat dilakukan, sehingga proses delegitimasi oleh beragam kepentingan dari ragam aktor dapat dihindarkan.

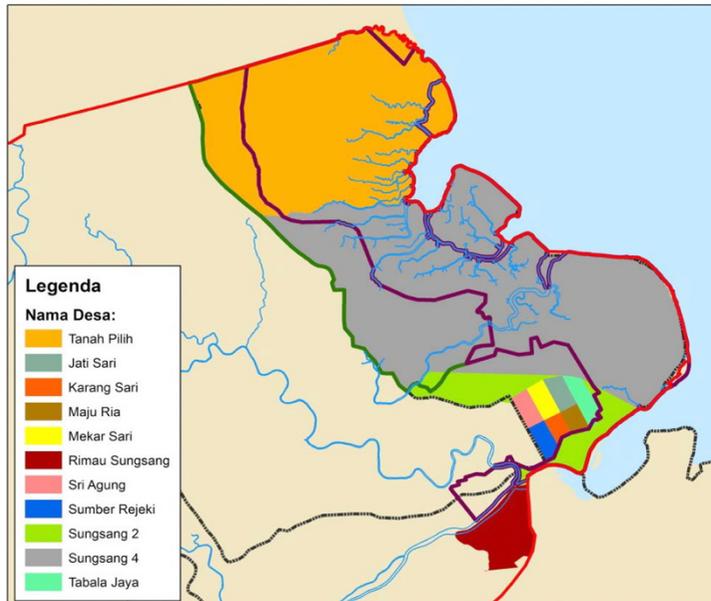
Struktur relasi kuasa yang beragam berdasarkan etnisitas (Jawa, Batak, Lampung, Melayu, serta Suku Anak Dalam) juga akan menentukan capaian Perhutsos. Sehingga membangun *polycentric governance* di tingkat lokal, dengan melihat relasi kuasa antaretnis menjadi opsi meningkatkan capaian Perhutsos. Selain itu, struktur penguasaan lahan yang beragam dari sisi luasan (misalnya ada yang hanya 2 hektar tetapi ada yang lebih dari 50 hektar) dan mekanisme kontrol (misalnya, ada yang pemiliknya menempatkan buruh atau ada yang model *absentee* dalam arti orangnya tidak di tempat) juga akan menentukan capaian program.

Sebelum ada proyek KS, relasi kuasa atas lahan kawasan gambut dibentuk oleh apa yang disebut sebagai *pseudo-institution* ataupun lembaga ekstra-legal, yang beroperasi dan dikendalikan oleh mafia lahan. Jual-beli atau apa yang disebut transfer lahan menjadi barang umum. Pihak yang terlibat pun beragam oknum, seperti pengusaha-aparat-masyarakat pendatang, didukung preman. Jaringan relasi kuasa seperti inilah yang akan menjadi kekuatan penghambat riil di lapangan.

Proses integrasi faktor ekologi politik, seperti *leadership*, legitimasi, dan struktur relasi kuasa yang dinamis dalam program KS belum berjalan mulus. Upaya mendapatkan dukungan pemerintah lanskap desa, misalnya, telah dilakukan, namun belum mampu memperoleh dukungan konkret dari kepala desa dalam bentuk anggaran desa.

Keenam, berdasarkan studi kasus di Area Model 3, penerapan dari pengelolaan lanskap berkelanjutan sudah berupaya untuk menempatkan persoalan politik melalui forum lintas pihak serta kerja kolaboratif untuk meminimalkan perbedaan kepentingan dan tujuan. Akan tetapi, di sisi lainnya, persoalan mengenai risiko yang belum teridentifikasi secara mendalam muncul dari dinamika yang terjadi belum terjamah secara komprehensif. Persoalan ini dapat terefleksi dari kasus sampah di Area Model 3. Massifnya produksi maupun distribusi sampah setiap harinya nyaris tidak tersentuh atau dipandang sebagai persoalan politik atau ekonomi. Dalam keseharian, sampah mungkin hanya berdampak pada estetika di lingkungan permukiman dan tidak pula menghentikan kegiatan operasional suatu perusahaan, sehingga menyebabkan kerugian. Namun, di sisi lain, ancaman sampah merongrong agenda konservasi berkelanjutan itu sendiri.

Penerapan *landscape approach* di AM 3 KS tidak dapat terlepas dari keberadaan TN Sembilang, desa-desa permukiman dengan area perekonomian lokalnya, serta tiga perusahaan swasta. Interaksi di antara ketiganya berpotensi menimbulkan irisan serta tarik menarik kepentingan. Sejumlah isu vital terkait di atas terlihat pada permasalahan konflik penggunaan lahan, pembalakan liar dan pertambangan, degradasi ekosistem hutan dan air tawar, serta konflik manusia dengan satwa liar.



GAMBAR 6.1 Desa-Desa di Area Model 3 KELOLA Sendang

Namun, selain isu vital yang muncul akibat tarik menarik kepentingan, satu isu lain yang sering kali tidak diperhatikan adalah permasalahan kualitas hidup di tingkat lokal. Kualitas hidup tidak saja terfokus pada persoalan masih rendahnya tingkat kapabilitas sumber daya manusia, baik pada aspek pengetahuan, kesehatan, atau daya ekonominya, namun juga perlu dilihat dalam pengaruhnya pada agenda keberlanjutan secara lebih luas, seperti terlihat pada studi kasus wabah sampah.

Menanggapi persoalan di atas, penerapan *landscape approach* di AM 3 KS terjadi secara khas, yaitu memadukan dan menyinergikan agenda konservasi dengan pemberdayaan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat, terutama melalui perancangan zona penyangga dan pengembangan edu-ekowisata. KS memunyai misi untuk mendirikan kemitraan pengelolaan untuk Taman Nasional, juga untuk memelihara dan memulihkan keanekaragaman hayati. Taman Nasional berada di bawah Perlindungan IUCN kategori II ('taman nasional'). Kemitraan itu dituangkan dalam perancangan Zona Penyangga dan pengembangan edu-ekowisata dilakukan dengan memantik inisiatif multipihak. Hal ini sekiranya menjadi salah satu inisiatif yang berpotensi untuk mengubah tata kelola ekologi pada situasi lapangan yang kompleks, terutama tantangan dari dimensi politik.

Terkait dengan AM 3 KS secara spesifik, dengan menjadikan Kecamatan Sungsang dan Karang Agung Ilir sebagai kawasan penyangga Taman Nasional Sembilang, para pihak menyadari kompleksitas yang terjadi lebih rumit. TN Sembilang pada dasarnya adalah zona konservasi yang relatif mudah terjangkau oleh masyarakat umum, sekitar dua jam waktu tempuh dengan perahu. Sejumlah kasus perambahan maupun kebakaran hutan di waktu sebelumnya menjadi gambaran atas kerentanan itu. Menanggapi kerumitan itu, dalam rangka menerapkan program yang lebih komprehensif dibandingkan di masa awal pelaksanaan proyek, program di AM 3 KS diarahkan untuk memperkuat ekonomi, budaya, dan kesadaran masyarakat agar meminimalkan ketergantungan maupun potensi mengeksploitasi area dan sumber daya di Taman Nasional.

Di area Sungsang, program yang dikembangkan adalah: 1) pemanenan air hujan; 2) perpustakaan; 3) pengelolaan sampah; 4) eduwisata, dan; 5) pengembangan budaya. Merujuk pada jenis programnya, dapat terlihat pengenalan sarana dan prasarana ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup, yang kelak dapat mengubah pola perilaku komunitas, sehingga dapat sinergis dengan agenda pelestarian.

Pengenalan program ini tidak terlepas dari kondisi kehidupan sehari-hari di area Sungsang. Sebagai perkampungan nelayan, permukiman di Sungsang dapat dikatakan sangat padat, sehingga bisa terdapat 2-3 keluarga menempati satu hunian. Rumah masyarakat Sungsang

umumnya terbuat dari kayu ulin dan nibung. Pondasi bangunannya selain juga dari kayu tetapi ada yang dari beton cor. Jalan utama lebarnya hanya sekitar 2,5 meter, memanjang sepanjang muara sungai.

Kepadatan penduduk dengan intensifnya perputaran ekonomi pesisir menciptakan situasi yang, bagi sebagian orang, dianggap sebagai perilaku konsumtif. Kondisi kasat mata atas rupa kampung yang padat serta kumuh di sisi lainnya memperlihatkan praktik yang bagi sebagian orang dapat dipandang sebagai konsumtif. Hal ini dapat dilihat pada kasus mewabahnya sampah di muara sungai di area Sungsang. Sebagai muara sungai, silih bergantinya arus sungai dan laut menyebabkan area itu menjadi lokasi terdamparnya sampah. Secara kasat mata, wabah sampah ini dapat terlihat di setiap sudut perkampungan, bahkan pekuburan warga sampah tertimbun oleh sampah.

Namun demikian, berdasar wawancara serta penuturan fasilitator lokal, pola perilaku masyarakat turut berpengaruh terhadap sampah itu. Dalam satu studi yang dilakukan oleh fasilitator, bayangkan jika per hari satu orang membuang sampah satu gelas plastik dan kalau dikalikan jumlah penduduk sebanyak 25.000 jiwa, maka tentu sudah menyumbang 25.000 sampah gelas plastik per harinya. Permasalahannya, apa yang kemudian dianggap oleh fasilitator menjadi suatu tantangan, adalah sampah belum dianggap menjadi persoalan bagi masyarakat desa secara umumnya. Sampah seakan menjadi bagian kehidupan, sehingga praktik memproduksi dan membuang sampah secara sembarang tidak dipersepsikan akan memengaruhi persoalan kehidupan lainnya.

Hal serupa terjadi pula dalam program Pemanenan Air Hujan (PAH). Selain persoalan infrastruktur, persepsi atas pengolahan air hujan sebagai layak minum masih dianggap tidak terlampau signifikan, sebab sebagai daerah di muara yang sulit untuk mengakses air untuk konsumsi, kebiasaan untuk membeli air minum olahan masih mendominasi, hingga pada akhirnya malah turut berperan atas semakin sulitnya mengatasi permasalahan sampah yang diproduksi oleh komunitas.

Berdasarkan pada dua gambaran di atas, pada AM 3 KS kita menjumpai politik budaya yang berbeda. Politik budaya yang tidak terwujud dalam suatu pertentangan perebutan sumber daya alam, namun suatu bentuk politik keseharian yang terwujud dalam gap (kesenjangan) dalam melihat permasalahan, yang bukan saja mengancam agenda konservasi, namun juga kualitas hidup masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika sejumlah agenda mendapatkan respons berbeda, terutama ketika dipersepsikan tidak menimbulkan pengaruh ekonomi secara langsung.

Persoalan terakhir adalah mengenai politik ekonomi. Merujuk pada pembahasan sebelumnya, struktur perekonomian masyarakat di AM 3 KS berperan dalam bagaimana dinamika politik ekonomi terutama dikaitkan dengan agenda konservasi. Secara deskriptif, pada perekonomian nelayan, komposisi masyarakat nelayan kecil sebanyak 80 persen dan yang berprofesi sebagai nelayan besar adalah sisanya. Nelayan ini semuanya pakai mesin dan yang paling kecil mesinnya 5 GT dan ada yang 15 GT. Kecamatan Sungsang terkenal dengan sumber daya kepiting laut (rajungan), udang, dan ikan tuna. Mayoritas komoditas perikanan adalah untuk komoditas ekspor.

Mengenai cara perikanannya, nelayan Sungsang umumnya melaut selama 3-6 hari dan kemudian kembali ke desa. Hasil dari nelayan besar bisa mencapai 4-5 juta rupiah sekali melaut, sementara nelayan kecil bisa sekitar 2 juta rupiah. Pemilik kapal biasanya mempekerjakan awak buah kapal (ABK) sebanyak tujuh ABK. Pada musim hujan ini, kebanyakan nelayan kecil menghentikan sementara menangkap ikan, karena faktor cuaca serta angin yang menyulitkan pelayaran.

Alternatif mata pencaharian ketika masa tersebut berjalan sangatlah terbatas. Sebagian pelaku bekerja serabutan, seperti menjadi tukang becak, pekerja lepas, dan sejenisnya dengan dukungan dari kaum perempuan untuk berdagang kecil-kecilan. Namun, sebagian lainnya, di masa “paceklik” mencari ikan, masih tetap memilih untuk berlayar, sebab antara berlayar atau tidak tetap mendatangkan kerugian, sehingga diputuskan untuk menangkap ikan dengan tujuan memperkecil kerugian itu.

Sementara itu, pada perekonomian pertanian dan perkebunan, produksi yang dihasilkan mendatangkan hasil sebanyak 3.350 ton/tahun untuk kelapa dan untuk sawit sekitar 303 ton/tahun dengan areal persawahan padi memunyai luas 15.242 hektar. Kesejarahan perekonomian pertanian dan perkebunan yang berakar dari komunitas transmigran menyebabkan arah peningkatan produksi cenderung tidak pada ekspansi lahan, namun upaya meningkatkan nilai tambah dan harga jual dari komoditas itu sendiri.

Namun demikian, jika direfleksikan, politik ekonomi di AM 3 KS tidaklah berjalan dalam suatu situasi sistem ekonomi yang sudah mapan; perikanan tetap bertumpu di laut atau pertanian dan perkebunan tetap dibudidayakan pada suatu area, namun pada dasarnya menyimpan sejumlah potensi risiko.

Hal ini terlihat pada kasus sempat merebaknya perambahan daerah *mangrove* atau kawasan hutan untuk mengklaimnya sebagai area usaha tambak atau mencari komoditas hutan untuk diperjualbelikan secara

ilegal. Kecenderungan merebaknya kasus-kasus semacam itu terjadi bersamaan dengan peristiwa yang lebih luas: kebakaran hutan besar, perubahan regulasi dan perpolitikan di tingkat lokal, hingga pergerakan penduduk dari luar daerah untuk mencari kehidupan layak. Warisan atas kasus-kasus semacam itu dapat terlihat pada bermunculannya area usaha atau permukiman komunal di sejumlah kawasan konservasi, yang dari sekian kasus, hanya area Dusun Sembilang yang sudah dilakukan *enclaving*.

Selain itu, risiko lain adalah ketimpangan dalam pengelolaan hasil sumber daya. Jika melihat pada pemaparan deskriptif, ketimpangan dapat segera terlihat dari perbedaan kapasitas antara nelayan “besar” dan “kecil”. Perbedaan kapasitas ekonomi mungkin tidak akan menghasilkan gesekan di antara dua jenis nelayan itu, namun risiko dapat mungkin terjadi ketika perubahan atas regulasi atau pengembangan kawasan itu sendiri, terutama kesulitan pada nelayan kecil yang memiliki keterbatasan kapasitas ekonomi untuk menyesuaikan dengan perubahan, terlebih terbatasnya alternatif atau pilihan moda ekonomi.

Lebih lanjut, struktur ekonomi di atas menyimpan ketimpangan, bukan saja pada tataran ekonomi milik masyarakat, namun juga dapat terjadi pada keberadaan sejumlah perusahaan di sekitar masyarakat berada. Selama ini, muncul persepsi umum jika relasi antara kegiatan ekonomi masyarakat dengan perusahaan tidak menimbulkan perselisihan secara tajam. Namun, di sisi lain, masyarakat pun memandang relasi antara perusahaan dengan masyarakat belum menghasilkan suatu keuntungan bersama. Hal ini berdampak pada persepsi bahkan risiko yang timbul, jika relasi di antara perusahaan dan masyarakat belum tampak atau tersosialisasikan secara meluas. Dalam suatu perspektif politik ekonomi, jenis konflik antara perusahaan dan masyarakat bukan saja muncul akibat kontestasi sumber daya, namun juga pada relasi di antaranya, terutama dengan munculnya skema kontribusi perusahaan terhadap publik, seperti kegiatan kemitraan, Corporate Social Responsibility (CSR), hingga persoalan interaksi keseharian, seperti perilaku karyawan perusahaan dengan masyarakat.

Lebih lanjut, sebagaimana dipersepsikan oleh masyarakat umum di AM 3 KS, pengembangan area Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api dinilai akan mengubah dinamika politik ekonomi yang ada. Bagi masyarakat di tingkat tapak, hal ini terlihat dari peningkatan harga jual tanah, seperti harga jual-beli kaveling yang terjadi di sepanjang jalan utama di luar desa yang memanjang ke Tempat Pelelangan Ikan, di mana luas 8 x 12 m<sup>2</sup> apabila jauh dari jalan sebesar 5-10 juta dan kalau dekat jalan 20 juta rupiah. Sedangkan di lahan transmigran, karena sudah ada sertifikat, bisa mencapai 140 juta rupiah per hektar.

Dengan menjadikan persepsi komunitas atas peningkatan harga jual tanah, maka dapat terlihat munculnya asumsi atas keterbatasan lahan serta akses untuk memanfaatkannya. Hal ini akan menjadi rumit, jika melihat pada kepadatan populasi di area Sungsang, yang tentunya akan menimbulkan konsekuensi permintaan atas lahan untuk hidup dan berekonomi di masa mendatang.

Sekiranya, gambaran ringkas politik ekonomi di atas memperlihatkan jika pengembangan moda ekonomi alternatif melalui edu-ekowisata merupakan salah satu model alternatif untuk menyasiasi struktur ekonomi yang *existing* tersebut agar tetap senantiasa meningkatkan nilai tambah bagi area yang dikategorikan sebagai daerah penyangga Taman Nasional, meskipun secara umum pengembangan model itu masih dipandang mengandung kerisikanan untuk dapat berkelanjutan.

Ketujuh, masih berangkat dari refleksi studi kasus Area Model 3, dalam proses penerapan lanskap berkelanjutan, kombinasi antara program konservasi dengan pemberdayaan lokal memperlihatkan hasil terjalannya kerja serta membangun kesepahaman antarpihak ketika melihat permasalahan dan mencari solusi penyelesaiannya. Hal itu diikuti pula oleh pengadopsian sejumlah program di atas oleh pelaksana pemerintah lokal, sehingga harapan atas keberlanjutan dari rancangan *landscape approach* di masa depan tetap terjaga.

Hal ini dapat dilihat pada sejumlah kasus, seperti pada program Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar. Pada aksi Pemanenan Air Hujan (PAH), aksi itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas air konsumsi. Instalasi PAH ini menarik minat masyarakat dan pemerintah desa karena prosesnya yang sederhana dan tidak membutuhkan biaya tinggi (sekitar 4 juta rupiah per unit), sehingga Kepala Desa Sungsang telah menganggarkan Dana Desa tahun 2020 untuk mereplikasi PAH agar bisa dipasang di lebih banyak rumah tangga di Desa Sungsang. Pada Oktober 2019, KS memasang instalasi tambahan di Kecamatan Banyuasin II dan Karang Agung Ilir. Hingga Desember 2019, sudah terpasang 11 instalasi PAH dan 1 unit di antaranya dipasang atas dana swadaya masyarakat desa.

Contoh lainnya, pada aksi bank sampah. Seperti telah diulas dalam studi kasus, sampah adalah masalah penting, sebab dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan program berkelanjutan. Pengembangan bank sampah mendapat apresiasi dari Dinas Lingkungan Hidup, bahkan Pemerintah Kabupaten Banyuasin memberikan bantuan unit motor dengan gerobak sampah dari anggaran kabupaten. Sistem bank sampah yang relatif sederhana ini dianggap mudah untuk direplikasi oleh desa-desa yang lain, seperti dilakukan oleh Pemerintah Desa Sungsang III dan Desa Muara Sungsang, yang mengalokasikan Dana Desa sebesar

masing-masing 100 juta rupiah untuk mengembangkan bank sampah dan sistem pengelolaan sampah di desanya masing-masing.

Selain itu, pada program Peningkatan Produksi Pertanian Berkelanjutan, pengembangan *Tyto alba* sebagai predator alami mendapat respons yang serupa. Pengenalan *Tyto alba* sebagai predator alami; sahabat petani untuk melawan hama tikus dilakukan dengan melakukan kunjungan belajar ke Yogyakarta, melibatkan Kepala dan Staf Desa Sungsang. Menindaklanjuti kunjungan belajar tersebut, pada Oktober 2019, dilakukan pemasangan demplot rumah *Tyto alba* dan tenggeran di Desa Sumber Rejeki dan Desa Tabala Jaya, Kecamatan Karang Agung Ilir, di areal persawahan sejumlah 5 kotak sarang di masing-masing desa. Pemasangan yang telah dilakukan dinilai berhasil mengurangi hama tikus dan meningkatkan produksi petani, sehingga mendorong terjadinya inisiatif secara mandiri oleh para petani untuk memasang kotak sarang secara swadaya di berbagai tempat.

Adapun program yang menysasar pada pemberdayaan ekonomi adalah program Peningkatan Akses Pasar Pertanian dan Perikanan Berkelanjutan, yang secara khusus menysasar pada usaha kecil yang dilakukan oleh kelompok perempuan. Melalui program Terasi Sembilang “Gragu Serbis”, KS berupaya meningkatkan akses pasar pertanian dan perikanan. Sejak 2019, rerata produksi terasi adalah 5-10 ton per bulan per musim (6-8 bulan). Pembuatan stok perlu dilakukan untuk mengisi kekosongan produk saat di luar musim udang. Pada Oktober 2019, KS melakukan pendampingan pengrajin terasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan bisnis terasi. Selain itu, dilakukan juga pembuatan *branding* dan kemasan yang akan menjadi ciri dari produk Sungsang, serta pemetaan pasar Sumatera Selatan untuk terasi Sembilang. KS juga bekerja sama dengan Bappeda Kabupaten Banyuasin yang akan membantu pemasaran, selain itu kelompok juga disambungkan dengan PT Jentera Garda Futura di Jakarta untuk pengembangan kemasan ke depan dan untuk membuka pasar nasional.

Dalam program mengembangkan potensi pertanian, KS memperkenalkan *best management practice* (BMP) kelapa. Pada September 2019, KS melakukan pertemuan dengan Bappeda Banyuasin dalam rangka penyampaian usulan desain proyek kelapa KS di Banyuasin, serta untuk finalisasi lokasi intervensi. Selain itu tim juga melakukan pertemuan dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Banyuasin. Oktober 2019, KS berkoordinasi dengan Kepala Desa Tabala Jaya, Sumber Rejeki, dan Karang Sari terkait rencana intervensi berupa praktik bertani kelapa yang baik serta pengolahan kopra putih untuk meningkatkan nilai ekonomi kelapa. Di Desa Karang Sari sudah terbentuk kelompok pemasaran kopra putih untuk penjualan sampai ke pabrik.

Lebih lanjut, Pengembangan Pariwisata Edu-Ekologi perkembangannya dapat dilihat pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang telah berkomitmen untuk mengalokasikan dana APBD sebesar 1 miliar untuk upaya pembangunan infrastruktur pendukung guna mengembangkan eko-eduwisata di Pulau Alangan Tikus, Banyuasin. KS berperan sebagai dinamisator sekaligus penghubung antara TN Sembilang, selaku pemangku kawasan, dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, serta dinas terkait lainnya (Dinas PU, Dinas Pariwisata, Dinas PMD). KS juga mendampingi Pokja Pembangunan Hijau Kabupaten Banyuasin sebagai mitra pemerintah daerah dalam membangun Zona Pemanfaatan, agar bisa mengembangkan pariwisata dengan cara benar dan melibatkan masyarakat secara aktif. Pada Oktober 2019, mitra KS – Yayasan Penabulu mengadakan FGD Penguatan Kelembagaan Edu-Ekowisata di Desa Sungsang IV yang menyepakati diadakannya uji coba paket wisata. Sebanyak 25 orang (L=10, P=15) peserta diundang pada November 2019, untuk mencoba paket wisata edukatif dengan tema “Menjadi Nelayan Sungsang”. Kegiatan ini menasar siswa SLTP-SLTA di perkotaan, dengan atraksi utama melakukan penangkapan ikan di perairan Sungsang dengan berlayar menggunakan perahu nelayan setempat. Pasca-uji coba ini, KS bersama Kelompok Peduli Pariwisata (KOMPEPAR) Desa Sungsang IV melakukan penyempurnaan kesiapan tim, berkoordinasi dengan kelompok nelayan, membuat bahan promosi, dan melakukan uji coba lain untuk memantapkan nelayan sebagai pelaku utama.

Selain itu, salah satu potensi pendidikan dan wisata di kawasan TN Sembilang adalah Resort Solok Buntu. Resort ini sebelumnya merupakan area tambak masyarakat. Pada tahun 2010–2015, JICA menginisiasi sebuah proyek yang melakukan uji coba penanaman *mangrove* pada areal bekas tambak seluas 200 hektar. Proyek ini juga membangun infrastruktur arboretum seluas 2,72 hektar yang menampung 28 jenis *mangrove*. Arboretum tersebut juga dilengkapi *mangrove trail* untuk kepentingan wisata. Namun, sayangnya, fasilitas tersebut terbengkalai pasca-selesaiannya proyek. Pihak TN Sembilang tidak memiliki cukup sumber daya untuk mengelola fasilitas tersebut. Aksi kemitraan dalam pengembangan Edu-Ecotourism Center di Resort Solok Buntu bertujuan untuk melestarikan ekosistem *mangrove*, mengembangkan fungsi pendidikan dan pariwisata Taman Nasional, dan membuka peluang mata pencaharian bagi masyarakat setempat.

Perlu diakui, merujuk pada paparan di atas, baik keterbatasan pendekatan lanskap, hambatan tantangan, maupun strategi dalam mengimplementasikan di Area Model 3 adalah awal dari agenda berkelanjutan itu sendiri. Sejumlah program yang masih berjalan diharapkan dapat menginspirasi para pemangku kepentingan lokal maupun masyarakat itu sendiri untuk menjalankan inisiatif secara

mandiri. Upaya tersebut pada akhirnya dilakukan dengan merancang *exit strategy*.

Secara khusus, Area Model 3 memberikan keunikan tersendiri dalam *exit strategy*, yaitu merancang skema ekonomi alternatif yang diharapkan dapat menjembatani antara dimensi politik, ekonomi, dan konservasi. Skema ini dituangkan melalui komitmen dan perhatian untuk membangun program edu-ekowisata di TN Sembilang dan area Sungsang.

Ketujuh aspek ini mengemuka bukan semata-mata dari upaya konservasi yang dilakukan secara spesifik di tingkat proyek KELOLA Sendang. Lebih dari itu, ternyata interaksi antara proyek dengan realitas pembangunan, kesiapan dan fleksibilitas dalam menafsirkan konsep pembangunan lanskap berkelanjutan di tataran pelaksanaan program, pemahaman agenda dan kekuatan politik yang ada, pemahaman mengenai kultur tata pemerintahan, dukungan tata pemerintahan dari praktik sehari-hari di tingkat masyarakat, upaya menempatkan faktor politik dalam kerja sama multipihak, serta kombinasi program konservasi dengan pemberdayaan masyarakat lokal. Di sinilah pentingnya untuk menarik proyek yang ada dalam kerangka yang lebih besar, dan berakar pada analisis tata pemerintahan dan ekonomi politik lokal. Dalam meletakkan proyek di tengah kompleksitas realitas sosial politik yang ada, fokus dari proyek bukan lagi pada perhatian yang eksklusif terhadap konservasi yang terpisah dengan faktor-faktor lainnya. Konservasi dan upaya penataan lanskap merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya bersama dalam memungkinkan menjaga dan mengembangkan potensi keanekaragaman hayati yang ada.





# BAB VII

---

KESIMPULAN DAN  
REKOMENDASI

## KESIMPULAN

Secara umum, dapat dikatakan bahwa proyek KELOLA Sendang mampu membangun wacana penataan lingkungan melalui *sustainable landscape approach* (SLA). Ini merupakan pendekatan baru di Sumatera Selatan. Proyek KELOLA Sendang mampu membangun kemitraan berbagai pihak. Mulai dari pemerintah, pelaku usaha, LSM lokal, dan masyarakat. Sebagai sebuah konsep, SLA mengalami dinamika dan pergeseran ketika bersentuhan dengan agenda dan strategi politik, strategi program, keterbatasan elemen-elemen yang menyusun konsep SLA, serta realitas operasional. Di satu sisi, aspek-aspek ini memberikan ruang bagi terciptanya relasi dan kesempatan untuk mengangkat konsep SLA dalam praktik. Namun, di sisi lain, aspek-aspek ini menjadi penghambat bagi diterjemahkannya SLA dalam praktik tata kelola lingkungan secara riil.

Berdasarkan pengamatan di Area Model 1, dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari adanya proyek KELOLA Sendang berupaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan antara manusia-hewan-tumbuhan yang *coexistent* satu sama lain dalam bentuk koridor satwa. Namun, pada kenyataannya, pengaturan tata kelola multisektor yang berlaku di lanskap KELOLA Sendang, baik sesuai dengan peraturan dan ketika diterapkan, dianggap tidak efektif karena sering kali terjadi *overlapping*

dalam pengimplementasian program di tingkat tapak. Selain itu, dinamika perpolitikan di tingkat provinsi hingga kabupaten untuk wilayah Sumatera Selatan turut mengambil peran dalam menentukan bagaimana kelancaran program KELOLA Sendang berlangsung, dan terkadang menyebabkan adanya mis-koordinasi antara pemerintah dengan ZSL sendiri, dalam upaya menjalankan program KELOLA Sendang.

Pengamatan pada Area Model 2 membawa kesepakatan kami dengan pendapat yang menyatakan bahwa proyek KELOLA Sendang di masa empat tahun ini masih terbaca sebagai “lanskap LSM lingkungan” yang bertarung atau bernegosiasi dengan “lanskap ekonomi dan politik”. Selain itu, KS juga masih terus disibukkan dan bergelut dengan problem ekonomi-politik lokal. Walaupun telah banyak capaian di lapangan, seperti telah turunnya izin pengelolaan melalui Perhutsos, tersusunnya dokumen Rencana Karya Umum (RKU) dan terbentuknya kelembagaan kelompok, namun capaian-capaian tersebut belum mampu menjadikan Perhutsos (KS) sebagai sebuah *flagship* bagi petani. Salah satu indikasinya adalah belum ada bedanya antara petani yang ikut KS dengan yang tidak ikut.

Sementara, pengamatan di Area Model 3 mengungkapkan bahwa pengelolaan AM 3 KS tidak terpaku pada urusan ekologi semata. Kompleksitas persoalan yang terjadi di area itu merupakan irisan serta tarik menarik antara tujuan konservasi TN Sembilang, kepentingan perusahaan pemegang konsesi di Kawasan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mendis, serta perkembangan kelompok dan organisasi sosial-ekonomi lokal.

Persoalan irisan dan tarik menarik kepentingan itu menyebabkan persoalan lapangan yang muncul di AM 3 KS terjadi secara multidimensi. Persoalan sosial, ekonomi, budaya, dan politik dapat tecermin pada sejumlah peristiwa, antara lain: konflik pemanfaatan lahan, pembalakan liar dan perambahan kawasan, ancaman kebakaran hutan dan lahan gambut, degradasi ekosistem hutan dan lahan gambut, konflik antara manusia dan satwa, maupun potensi konflik antar-kelompok sosial atau dengan perusahaan, serta minimnya akses masyarakat atas pemanfaatan sumber daya alam.

Selain itu, sebagai representasi dari kawasan ekosistem pesisir dan *mangrove*, ancaman berupa degradasi dan konservasi lahan *mangrove* untuk kegiatan ekonomi, seperti tambak maupun area permukiman, mengemuka; beserta ancaman dari sampah plastik di muara sungai, pesisir pantai, dan laut lepas yang terbawa dari aktivitas rumah tangga dan pengelolaan sampah masyarakat yang tidak lestari, mulai dari kawasan hulu sungai dan kawasan permukiman yang dilewatinya.

Beragam persoalan serta isu di atas disadari oleh pengelola proyek KELOLA Sendang; bahwa pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dilakukan hanya terbatas pada teritorial kawasan tanpa mempertimbangkan perubahan lahan, kerusakan habitat, sosial ekonomi, budaya, dan pembangunan secara umum di daerah penyangganya dan/atau pada skala lanskap yang lebih luas, sehingga pada akhirnya mendorong proyek KELOLA Sendang untuk menyusun Konsep Aksi Kemitraan di AM 3 KS.

Konsep Aksi Kemitraan sebagai refleksi kompleksnya persoalan yang multidimensi di lapangan, dirumuskan agar dapat menciptakan ruang kolaboratif antarpihak dan multipihak. Ruang kolaboratif diharapkan dapat mendorong para pihak untuk dapat saling bersinergi dan bekerja sama, sekaligus melakukan inisiatif dalam menghadapi persoalan di kawasan itu. Namun, dalam implementasinya, dinamika serta tantangan yang terjadi menimbulkan pertanyaan tersendiri atas keberlangsungan Konsep Aksi Kemitraan di masa mendatang. Pembahasan atas dinamika dan tantangan sekiranya tidak terlepas dari keterkaitan antara tiga aspek yang saling berelasi di AM 3 KS: politik konservasi Taman Nasional (TN) Sembilang, dinamika sosial-ekonomi-politik sekitar kawasan TN Sembilang, dan pada akhirnya merefleksikan persoalan keberlanjutan melalui kasus tercemarnya wilayah sekitar TN Sembilang oleh sampah plastik.

## **REKOMENDASI**

Upaya membangun relasi, persamaan persepsi, konsensus, dan pembagian peran dalam SLA sangat tergantung sekali pada komunikasi serta interaksi lembaga dan aktor. Situasi politik yang berubah, perbedaan pemahaman mendasar tentang program, pemahaman realitas ekonomi dan politik, serta menghadapi keterbatasan-keterbatasan dalam realitas operasional mensyaratkan adanya informasi yang tepercaya untuk dapat membentuk pengetahuan yang lengkap. Pengetahuan yang lengkap ini akan menuntun kepada pemahaman permasalahan, penarikan kesimpulan, serta pengambilan keputusan yang bisa lebih menjawab permasalahan.

Informasi yang tepercaya ini mensyaratkan para pengelola program untuk masuk dalam jejaring luas para pemangku kepentingan. Di sana, para pengelola program harus memahami berbagai kepentingan dan minat yang ada, dan dari titik jaringan yang mana suatu ide perubahan bisa dilontarkan dan memperoleh respons secara efektif. Ketika pemahaman akan permasalahan dan peta jaringan sudah diperoleh, para pengelola program yang terlibat dalam jejaring sosial harus

menetapkan posisi dan mengambil otoritas terbatas yang diberikan oleh program untuk mendorong perubahan. Para pengelola program juga dituntut secara taktis mengolah informasi, mengemasnya ulang sesuai konstelasi para aktor dan institusi, serta memahami diskusi makro tanpa mengorbankan tujuan sebenarnya dari program.

Terkait dengan membangun komunikasi dan interaksi dalam jejaring informasi ini, proyek KELOLA Sendang disarankan untuk lebih strategis dalam menetapkan siasat jangka pendek, namun konsisten pada strategi pencapaian tujuan jangka panjang. Kekakuan seperti yang terjadi di masa lalu pada konsep konservasi selayaknya menjadi pelajaran untuk tidak diulangi lagi. Tantangan sesudah program selesai ialah mencari kesempatan untuk melakukan *restarting* konsep melalui *framing* dan *vernakularisasi* yang lebih bisa dipahami oleh para pengambil keputusan baru, setelah transisi kepemimpinan daerah. Namun demikian, harus ada fleksibilitas untuk mengantisipasi adanya pergantian orientasi pimpinan daerah secara signifikan, yang mungkin terjadi di masa depan.

Rekomendasi mendasar terhadap program KELOLA Sendang, khususnya yang terdapat di Area Model 1, adalah perlunya pengkajian ulang terhadap wilayah yang akan dijadikan kawasan koridor satwa, karena wilayah hutan sudah terplot sebagai areal konsesi perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar wilayah Area Model 1. Hal ini perlu dilakukan, mengingat dalam kriteria biologi dan ekologi, untuk menentukan koridor satwa, wilayah yang ditentukan harus “bersih” dari areal konsesi perusahaan, terlebih kajian kehutanan terkait wilayah tersebut sangat minim ditemukan dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Selain itu, saat ini, diperlukan sosialisasi yang lebih luas dan rinci mengenai pelestarian satwa, lingkungan hutan, dan terutama koridor satwa itu sendiri kepada masyarakat di wilayah yang difasilitasi oleh tim KELOLA Sendang, mengingat sampai sejauh kajian ini dilakukan, masyarakat sangat minim pengetahuan terkait apa itu koridor satwa dan bagaimana bentuk-bentuk penerapannya. Program-program yang sudah masuk dan berjalan pun seharusnya mendapatkan fasilitasi dan pendampingan lebih lanjut, karena terlepas dari berbagai dinamika perpolitikan yang ada, program-program tersebut merupakan bentuk nyata keberadaan ZSL di tingkat masyarakat, meskipun program utama yang harusnya berjalan sampai saat ini masih belum dapat terlaksana sepenuhnya.

Untuk Area Model 2, rekomendasi yang diajukan sehubungan dengan kondisi di mana banyak pihak sampai saat ini hanya melihat proyek KELOLA Sendang sebagai sekadar proyek, seperti yang lazim dilakukan oleh pemerintah. Demikian juga masyarakat desa seperti di Medak, mereka melihat proyek tersebut sebagai proyek pembangunan lain yang

sudah acapkali dilakukan di desa. Untuk meningkatkan kompatibilitas dan akseptabilitas KS, salah satu opsinya adalah: jadikanlah KS sebagai proyek kebudayaan untuk membangun peradaban baru dalam masyarakat. Salah satu pintu masuknya adalah kenalilah struktur sosial dan nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut, termasuk aspirasi dan kepentingannya. Jadikan KS dengan pendekatan *sustainable landscape* sebagai sekadar proyek “gagah-gagahan” tetapi tidak membumi di hati masyarakat. Jadikanlah masyarakat sebagai subyek dan penghela, bukan hanya sekadar kuda yang arahnya selalu dikendalikan oleh kusir. Jadi KS harus menjadi kekuatan masyarakat sipil, terutama masyarakat petani dalam menjawab problem riil hidupnya selama ini.

Rekomendasi untuk Area Model 3 ialah menguatkan rencana keberlanjutan Zona Penyangga dan pengembangan edu-ekowisata berdasarkan prinsip Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan, yaitu inklusivitas (yang berarti melibatkan berbagai pihak), integrasi (ketertpaduan) dan sinkronisasi (keselarasan), dan berbasis data yang akurat, melalui:

1. Memberikan dukungan secara politis terhadap ruang-ruang kolaboratif yang sudah terbangun selama proyek KS;
2. Sinkronisasi regulasi dan kebijakan sosial, politik, dan ekonomi dalam tujuan keberlanjutan, sekaligus mampu mengeliminasi serta meminimalkan beban (*cost*) politik dan ekonomi yang tidak berasaskan pada kesejahteraan bersama;
3. Menghidupkan kelembagaan dari berbagai institusi dan pihak untuk mampu mengelola pengetahuan, *lesson learned*, serta memformulasikan skema-skema alternatif, terutama dalam menghadapi tantangan baru yang mungkin tidak terlalu diperhatikan dalam pendekatan konvensional, seperti dalam permasalahan sampah yang terjadi di AM 3 KS.

Ke depan, dapat direkomendasikan penelitian lebih lanjut sehubungan dengan beberapa tema. Penelitian yang mengupas secara kritis realitas ekonomi dan politik mendesak diperlukan supaya dapat dirumuskan langkah-langkah untuk mengupayakan keberlanjutan dari inisiatif-inisiatif yang sudah ada. Selain itu, ada baiknya digagas adanya penelitian mengenai tren dan arus komoditas ekonomi dalam lingkup global, nasional, dan lokal. Penelitian mengenai masalah-masalah ekologis “baru” seperti pengelolaan sampah, pemanasan global, overpopulasi, kelangkaan sumber daya alam dan energi terbarukan, perubahan iklim, maupun *ocean acidification* juga akan membantu mengidentifikasi langkah-langkah dalam mengupayakan keberlanjutan pascaprogram.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah. (2013a). “Rumus Pemilukada di Kota Palembang”. Surat Kabar Harian *Sumatera Ekspres*, 5 Februari 2013.
- Alamsyah. (2013b). “Sosiologi Elit Politik Sumsel”. Surat Kabar Harian *Sumatera Ekspres*, 5 Maret 2013.
- Alikodra, H.S., dkk. (2013). *Konsep Menuju Pembangunan Kawasan Esensial Koridor Satwa: Kawasan Hutan Harapan-Suaka Margasatwa Dangku Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang: Unsri Press.
- Antara. (2019). “Bupati Musi Banyuasin Pantau Karhutla di Desa Muara Medak.” Harian *Antara* Senin, 19 Agustus 2019. Dikutip dari <https://www.antaraneews.com/berita/1019366/bupati-musi-banyuasin-pantau-karhutla-di-desamuara-medak>. Diakses pada 2 Februari 2019
- Article 33. (2014). “Ekonomi Politik Mekanisme Distribusi Manfaat (*Benefit Sharing Mechanism*) untuk Mitigasi Deforestasi dan Degradasi Hutan: Kasus Musi Banyuasin Sumatera Selatan”. Laporan Riset 2014. Article 33 Indonesia.
- Aspinall, E. (2011). “Democratization and Ethnic Politics in Indonesia: Nine Theses”. *Journal of East Asian Studies*, 11(2), 289-319.
- Auty, R.M. (1993). *Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis* (London: Routledge, 1993).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (BPS Prov. Sumsel). (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Palembang.
- Bakker, L., & Moniaga, S. (2010). “The Space Between: Land Claims and the Law in Indonesia”. *Asian Journal of Social Science*, 38(2), 187–203. <https://doi.org/10.1163/156853110X490890>
- Beritasatu. (2019). “Karhutla di Sumatera Selatan Mencapai 1.822 Hektare.” *Beritasatu* Senin 26 Agustus 2019. Dikutip dari <https://www.beritasatu.com/nasional/571628/karhutla-di-sumatera-selatan-mencapai-1822-hektare>. Diakses pada 3 Februari 2019
- Bettinger, K. A. (2015). “Political Contestation, Resource Control and Conservation in an Era of Decentralisation at Indonesia’s Kerinci Seblat National Park”. *Asia Pacific Viewpoint*, 56(2), 252–266. <https://doi.org/10.1111/apv.12069>

- BRPPUP. (2019). *Pengelolaan Areal Pemberdayaan Suku Anak Dalam di Desa Muara Medak*. Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang (BRPPUPP). Palembang. Dikutip pada <http://bp3upalembang.kkp.go.id/posting/276-pengelolaan-areal-pemberdayaan-suku-anak-dalam-di--desa-muara-medak>. Diakses pada 2 Februari
- CNN Indonesia. (2018). “UNESCO Soroti Permasalahan Sampah di Taman Nasional Komodo”. *CNN Indonesia*. Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180423125537-269-292823/unesco-soroti-permasalahan-sampah-di-taman-nasional-komodo>. Diakses pada 25 Januari 2020
- Dewi, S., Ekadinata, A., & Leimona, B. (2016). *Sumatera Selatan: Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau*.
- Dobson A, (2009), “Citizens, citizenship and governance for sustainability”, in *Governing Sustainability* Eds W N Adger, A Jordan (Cambridge University Press, Cambridge) pp 125-141
- Duncan, C. R. (2007). “Mixed outcomes: The impact of regional autonomy and decentralization on indigenous ethnic minorities in Indonesia. *Development and Change*, 38(4), 711-733.
- Fay, C., & Michon, G. (2016). “Redressing Forestry Hegemony when A Forestry Regulatory Framework is Best Replaced by an Agrarian One”, 15, 193–209. <https://doi.org/10.1080/14728028.2005.9752520>
- Finlayson, Robert. (2017). “The role of agroforestry in climate-change adaptation in Southeast Asia”. *Appropriate Technology*. 44. 24-26.
- Forsyth, T. (2003). *Critical Political Ecology The politics of environmental science*. London: Routledge.
- Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity*. Polity Press. The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University.
- Giddens, A. 1990. *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas*.
- Hackmann, H. and Y. Asunción St. Clair. (2012). “Transformative cornerstones of Social Science research for Global change”. Paris: *Report of the international Social Science Council*. <http://www.worldsocialscience.org/documents/transformative-cornerstones.pdf>

- Handoyo, Rochmayanto, Nurfatriani, N., dan Charity D. (2018). "Pemetaan *Hidden Population* Terkena Dampak dan Valuasi Ekonomi Kerugiannya: Sebuah Tinjauan Ekonomi Politik atas Praktik Penguasaan Sumberdaya Hutan dan Lahan di Indonesia. Laporan Hasil Penelitian". Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bogor November 2018.
- Hapsari, M. (2011). "The Political Economy of Forest Governance in Post-Suharto Indonesia". In H. Kimura, Suharto, A. Javier, & A. Tangsupvattana (Ed.), *Limits of Good Governance in Developing Countries* (hal. 103–137). Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press.
- Hardin, G. (1968). "The Tragedy of the Commons". *Science, New Series. Vol 162. No. 3859* (Dec.13.1968), pp.1243-1248.
- Hein, J. (2019). "Political ecology of REDD+ in Indonesia. Agrarian conflicts and forest carbon". *Routledge studies in political economy*. Abingdon, UK; New York, NY: Routledge.
- Holmes, G. (2013). "Exploring the relationship between local support and the success of protected areas", *Conservation and Society* 11(1): 72-82.
- Kartodiharjo, H. (2020). "Politik Bencana vs Bencana Politik di Indonesia". *Forest Digest*, 13 Januari 2020. <https://www.forestdigest.com/detail/456/politik-bencana-vs-bencana-politik-di-indonesia>.
- KLHK. (2019). "Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Hektar) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2019". Diambil dari [http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas\\_ kebakaran](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_ kebakaran)
- Kurniawan. (2019). "Sampah Belum Teratasi, Sembilang Belum Siap Menjadi Kawasan Ekowisata". *Mongabay*. Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180423125537-269-292823/unesco-soroti-permasalahan-sampah-di-taman-nasional-komodo>. Diakses pada 1 Februari 2020
- Litta, H. (2012). *Regimes in Southeast Asia: An analysis of environmental cooperation*. Wiesbaden, Germany: Springer Fachmedien.

- Maxton-Lee, B. (2017). "Material Realities: Why Indonesian Deforestation Persists and Conservation Fails". *Journal of Contemporary Asia*, (in press), 1–26. <https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1402204>
- McCarthy, J. F. (2000). "The Changing Regime: Forest Property and Reformasi in Indonesia". *Development and Change*, 31(1), 91–129. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00148>
- Moeliono, M., Wollenberg, E., & Limberg, G. (2009). *The Decentralization of Forest Governance*. London: Earthscan.
- Mongabay (2019). "Kubah Gambut di Muara Medak Terbakar Lagi". *Mongabay* 16 Agustus 2019. Dikutip dari <https://www.mongabay.co.id/2019/08/16/kubah-gambut-di-muara-medak-terbakar-lagi/>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2019
- Mongabay. (2019). "Direstorasi, Gambut di Muara Medak Tidak Bakal Merana Lagi". *Mongabay* 1 Mei 2019. Dikutip dari <https://www.mongabay.co.id/2019/05/01/direstorasi-gambut-di-muara-medak-tidak-bakal-merana-lagi/>. Diakses pada Februari 2019
- Mongabay. (2019). "Karhutla Parah di Desa Muara Medak, Sebagian Warga Mengungsi". *Mongabay* 24 Agustus 2019. Dikutip dari <https://www.mongabay.co.id/2019/08/24/karhutla-parah-di-desa-muara-medak-sebagian-warga-mengungsi/>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2019
- Myers, R., Intarini, D., Sirait, M. T., & Maryudi, A. (2017). "Claiming the forest: Inclusions and exclusions under Indonesia's 'new' forest policies on customary forests". *Land Use Policy*, 66 (December 2016), 205–213. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.04.039>
- Nopriansyah, A. (2019). "Turis Asing Kagumi Keramahan Warga Sungsang Banyuasin, Akui Budaya & Wisata Sungsang Fantastis". *Sripoku.com*. Dikutip dari <https://palembang.tribunnews.com/2019/04/27/turis-asing-kagumi-keramahan-warga-sungsang-banyuasin-akui-budaya-wisata-sungsang-fantastis>. Diakses pada 2 Pebruari 2020
- Otten, F., Jonas Hein, Hannah Bondy & Heiko Faust (2020): "Deconstructing sustainable rubber production: contesting narratives in rural Sumatera", *Journal of Land Use Science*, DOI: 10.1080/1747423X.2019.1709225

- Paine, R. (2000). "Aboriginality, authenticity and the Settler world". In Anthony P. Cohen, ed., *Signifying Identities: Anthropological Perspectives on Boundaries and Contested Values*, pp. 77–116. London: Routledge.
- Paulson, S., Gezon, L. L., & Watts, M. (2003). "Locating the Political in Political Ecology: An Introduction". *Human Organization*, 62(3), 205–217.
- Peet, R., Robbins, P., & Watts, M. (2011). "Global Nature". In R. Peet, P. Robbins, & M.J. Watts (Eds.), *Global political ecology* (pp. 1–47). London: Routledge.
- Peluso, N. L. (1993). "Coercing conservation? The Politics of State Resource Control". *Global Environmental Change*, June.
- Pemerintah Kabupaten Banyuasin. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2018–2023. Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Pangkalan Balai.
- Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. (2017). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Tahun 2017–2022. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Sekayu.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2014). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013–2018. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Palembang.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019–2023. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Palembang.
- Puter. 2017. Profil Desa: Muara Medak. Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen laporan ini disampaikan oleh Yayasan Puter Indonesia untuk Zoological Society of London (ZSL), dalam rangka mendukung Proyek Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang–Dangku (KELOLA Sendang) di Provinsi Sumatera Selatan. Yayasan Puter Indonesia, Juli 2017.
- Putri, R. H. (2019). "Tiga Faktor yang Membuat Sriwijaya Jadi Kerajaan Kuat". *Historia*. Dikutip dari <https://historia.id/kuno/articles/tiga-faktor-yang-membuat-sriwijaya-jadi-kerajaan-kuat-D8J0o>. Diakses pada 16 Januari 2020
- R. Maherlsa, A. I. Purwiyanto, F. Agustriani, W. A. Putri1, Fauziyah, Ferdiansyah. 2019. "Identification of surface macro debrisin

- river flow and estuary of Musi River, South Sumatera Province, Indonesia” dalam *Journal of Physics: Conference Series, IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series* 1282 (2019) 012106
- Rachman, B. (1978). “Strategy for Smallholder Rubber Development in South Sumatera”. A Dissertation Submitted in partial fulfillment for the requirements of the degree of Master of Agricultural Development in the Australian National University October 1978. ANU. Australia.
- Rahmat, M. (2013). “Restorasi Hutan Rawa Gambut untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Tilikan di Sumatera Selatan”. Dalam Purwito, D., Komar, T.E., Subiakto, A., Kuntadi (Eds). *Prosiding Workshop Stakeholder Consultation the Application of Method and Technologies to Enhance the Restoration of PSF Ecosystem*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi. Bogor.
- Rangkuti, N. (2014). “Hunian Pra-Sriwijaya di Daerah Rawa Pantai Timur Sumatera”. *KALPATARU. Majalah Arkeologi Vol 23*. No. 2 November 2014: 81-150.
- Sari, Dwi Amalia, Sayer, Jeffrey, Margules, Chris and Boedhihartono, Agni Klintuni, (2019), “Determining the effectiveness of forest landscape governance: A case study from the Sendang landscape, South Sumatera”, *Forest Policy and Economics*, 102, issue C, p. 17-28.
- Savitri, Y. (2019). “Musi River’s tributaries diminishing”. *The Jakarta Post*. Dikutip dari <https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/23/musi-rivers-tributaries-diminishing.html>. Diakses pada 2 Februari 2020
- Sayer, J. (2009). “Reconciling Conservation and Development: Are Landscapes the Answer? Approach to Biodiversity”. *Biotropica*, 41(6), 649–652.
- Scoones, I., Leach, M., and Newell, N. (2015). “The politics of green transformations”. Angdon, *Earthscan*, 2015, 220 pp., £22.94 (pbk), ISBN 978-1-138-79290-6
- Semedi, P., and Bakker, L. (2014). “Between Land Grabbing and Farmers’ Benefits: Land Transfer in West Kalimantan Indonesia”. *The Asia Pasific Journal of Anthropology* 155:4,376-390. August 2014.
- Stott, P. A., & Sullivan, S. (2000). *Political ecology: science, myth and power*. Arnold. London, UK

- Tasmalinda. (2019). “Disinggahi 120 Wisman, Sungsang Kenalkan Pindang Udang”. *Gatra.com*. Dikutip dari <https://www.gatra.com/detail/news/412951/lifestyle/disinggahi-120-wisman-sungsang-kenalkan-pindang-udang>. Diakses pada 27 Januari 2020
- The World Bank. (2016). *The Cost of Fire: An Economic Analysis of Indonesia’s 2015 Fire Crisis*.
- Walker, P. A. (2005). “Political ecology: where is the ecology?” *Progress in Human Geography*, 29(1), 73–82.
- Walker, P. A. (2007). “Political ecology: where is the politics?” *Progress in Human Geography*, 31(3), 363–369. <https://doi.org/10.1177/0309132507077086>
- Warta Ekonomi. 2018. “Peroleh Izin Kelola Hutan, Warga Muba Ucapkan Terima Kasih pada Jokowi” - *Warta Ekonomi*, Minggu, 25 November 2018. Dikutip dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read204866/peroleh-izin-kelola-hutan-warga-muba-ucapkan-terima-kasih-pada-jokowi.html>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2019
- Wijaya, T. (2019). “Berbagai Proyek Dijalankan. Karhutla tetap Terjadi di Sumatera Selatan”. *Mongabay*, 15 November 2019. <https://www.mongabay.co.id/2019/11/15/berbagai-proyek-dijalankan-karhutla-tetap-terjadi-di-sumatera-selatan-mengapa/>.
- Yustian, Indra & Setiawan, Arum & Setiawan, Doni & Hanum, Laila & Dahlan, Zulkifli. (2017). “The Development Of Inventory, Monitoring And Information Networks System Of Faunal Diversity In South Sumatera”. *BIOVALENTIA: Biological Research Journal*. 3. 10.24233/BIOV.3.2.2017.79.
- ZSL. (2018). *A world where wildlife thrives*. London, UK.
- ZSL. Tanpa Tahun. Proposal Perhutsos: PERHUTANAN SOSIAL KELOLA SENDANG. Laporan tidak dipublikasikan diperoleh tahun 2019.
- ZSL.2019. *Social Forestry: A gateway for Better Land Managements and Civil Registration Service*. The Zoological Society of London (ZSL) Indonesia.

## BIOGRAFI PENULIS

### E. PANTJA PRAMUDYA

Penulis adalah Peneliti Senior dan Pendiri Institut Riset Sosial dan Ekonomi (INRISE).

Menamatkan pendidikan doktoral dari Wageningen University pada tahun 2018, Master ekonomi dari School of Oriental and African Studies, University of London, magister manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen – PPM, dan sarjana teknik dari Universitas Gadjah Mada. Saat ini aktif menjadi peneliti dan konsultan lepas. Sebelumnya bekerja di berbagai lembaga pembangunan yaitu Hivos, Kehati, Catholic Relief Services dan Community Recovery Programme, serta di perbankan. Penulis juga aktif di Indonesian Working Group on Forest Finance dan Perkumpulan Mindset.



Ketertarikan riset: ekonomi politik dari *sustainability governance*, keuangan berkelanjutan, *sustainable palm oil*, pembangunan ekonomi berkelanjutan, *good cooperative governance*, keuangan mikro, dan *economics as social theory*.



### LUKAS R. WIBOWO

Penulis adalah Peneliti Hukum dan Politik pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) dan Research Fellow pada Institut Riset Sosial dan Ekonomi (INRISE).

Alumni Kolese De Britto tahun 1986 dan menamatkan S1 Sosiologi UGM tahun 1992, kemudian melanjutkan S2 Wageningen University tahun 2002 dan menamatkan S3 dari Charles Sturt University, Australia tahun

2012. Sebelum bekerja di Badan Litbang Kehutanan, sempat menerima beasiswa dari Ford Foundation untuk penulisan di media massa (LP3Y) dan kemudian bekerja sebagai jurnalis di harian *Kedaulatan Rakyat* Yogyakarta tahun 1994. Pernah menjadi *research assistant* di CIFOR 2003-2005 pada proyek Forest Rehabilitation: Lessons From The Past. Saat ini tengah terlibat dalam penelitian kolaboratif dengan CIFOR terkait *tenurial* sawit (2017-2019). Pernah menulis di berbagai jurnal nasional dan internasional. Selain itu, aktif menulis di beberapa media, seperti *Kompas*, *The Jakarta Post*, *Harian Bernas*, *Harian Kedaulatan Rakyat*, dan berbagai majalah yang diterbitkan oleh LSM, seperti FKKM dan Wetland. Ketertarikan riset: *governance*, politik sumber daya alam, *tenurial* dan konflik serta *rural development*, *sustainable palm oil development*.

### IRFAN NUGRAHA

Irfan Nugraha merupakan Research Fellow dari Institut Riset Sosial dan Ekonomi (INRISE).

Alumni Antropologi Sosial UI (2004) dan Manajemen Pertahanan di Universitas Pertahanan Indonesia bekerja sama dengan Cranfield University (2014). Kini merupakan pengajar terkait metode penelitian sosial, pengolahan data kualitatif serta metode penelitian antropologi di Universitas Indonesia, selain menjadi peneliti asosiasi di Unit Kajian Antropologi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP FISIP UI) dan INRISE Indonesia. Aktif menulis di berbagai media massa maupun sejumlah media digital, seperti *Geotimes* serta *The Conversation*. Selain menulis artikel jurnal ilmiah, merupakan anggota tim penulis *Rumah Kombat*, *Rumah Koroway: Dari Tajuk Pohon di Dusun Turun ke Kampung* serta sejumlah buku lainnya.

Ketertarikan riset: kajian resolusi konflik, politik identitas dan antropologi kekerasan dengan pengalaman riset etnografi di berbagai daerah di Indonesia.



## **MAMAT RAHMAT**

Lahir di Ciamis pada tanggal 17 Agustus 1975. Dia menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor pada tahun 1999. Gelar Magister Sains bidang Perencanaan Pembangunan diperolehnya dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas pada tahun 2005. Adapun gelar doktor diperoleh dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015, dengan disertasi yang berjudul: “Dampak Perubahan Sediaan Sumberdaya Alam dan Manfaat Jasa Lingkungan terhadap Kinerja Kelestarian Pembangunan Ekonomi: Kasus Provinsi Riau”.

Riwayat karirnya dimulai dengan menjadi staf perencanaan pada perusahaan Hutan Tanaman Industri di Riau, pascalulus dari pendidikan sarjananya. Kemudian, pada tahun 2001 menjadi konsultan



penelitian pada Center for International Forestry Research (CIFOR) di Bogor, sampai akhirnya diterima menjadi peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan pada tahun 2002 dan ditempatkan di Balai Penelitian Hutan Tanaman Indonesia Bagian Barat (saat ini berubah nama menjadi Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang, sebuah Unit Pelaksana Teknis Badan Litbang dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Selama menjadi peneliti, ia telah menulis berbagai artikel yang diterbitkan

dalam jurnal ilmiah, prosiding konferensi internasional dan seminar nasional, majalah semi-ilmiah, buku, dan surat kabar.

Ketertarikan riset: isu-isu lingkungan hidup, kehutanan, dan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya, yaitu ekonomi dan kebijakan kehutanan.

### ARIA A. SATWIKO

Aria A. Satwiko merupakan Research Fellow dari Institut Riset Sosial dan Ekonomi (INRISE). Penulis juga merupakan peneliti di Unit Kajian Antropologi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) FISIP UI dan konsultan GAIA-DB. Pada tahun 2015 menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana Sosial di Universitas Indonesia pada Jurusan Antropologi Sosial, dan pada tahun 2019 hingga saat ini sedang menempuh studi Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia. Selain disibukkan dengan kegiatan riset dan perkuliahan pascasarjana, kesibukan lainnya adalah menjadi sukarelawan untuk layanan diskusi *online* di *BagiKata.com*.



Ketertarikan riset: *rural development*, teritorialisasi, *tenurial*, globalisasi.

### DEWI RATNA KURNIASARI



Dewi Ratna Kurniasari merupakan peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada tahun 2001 menempuh jenjang pendidikan Sarjana Kehutanan di Universitas Lampung pada Jurusan Manajemen Hutan. Kemudian di tahun 2007 melanjutkan pendidikan pascasarjana di Institut Pertanian Bogor pada Program Studi Konservasi Biodiversitas Tropika. Saat ini tergabung dalam Kelompok Peneliti Politik dan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di P3SEKPI.

Ketertarikan riset: pemberdayaan masyarakat di hutan konservasi, perhutanan sosial, mediasi konflik, *tenurial* sawit, dan kebijakan.

## DWI ARIS SUBAKTI

Penulis saat ini merupakan peneliti dan pengelola program di SatuDunia (OneWorld Indonesia) dan juga di Penabulu Institute Riset. Memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil. Pernah bekerja di lembaga internasional seperti Research Triangle Institute, PACT Inc, KOMPAK-DFAT. Penulis juga pernah menjadi konsultan dan peneliti lepas untuk Indonesia Business Council for Sustainable Development, SNV, PT JAPFA Comfeed, dll. Penulis merupakan lulusan Ilmu Sejarah Universitas Sebelas Maret (2006) dan Master Ilmu Komunikasi dengan spesialisasi Media dan Komunikasi Politik dari Mercubuana University (2014). Memiliki ketertarikan dalam dunia fotografi dan menulis karena pernah menjadi wartawan dan memimpin institusi pers kampus.



*Ketertarikan riset: sustainable development, public health and inclusive development, public-private-community partnership, organization capacity building, knowledge management, community empowerment, sustainable market, environments and climate change.*

